BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PERUBAHAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 284 Peraturan Menteri *Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan* Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanakan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara *Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran* Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanakan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2OI3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20I3 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan rnemperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMD-P adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Perubahan Tahun 2014-2019.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Recana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Visi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi daerah.
13. Strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
15. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan masyarakat untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dalam suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan.
18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi datam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Pasal 2

(1) RPJMD-P ini merupakan penjabaran dari visi, Misi, Arah Kebijakan, Tujuan, sasaran dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, serta menyesuaikan perubahan kebijakan nasional berkenaan dengan kewenangan daerah, perubahan perangkat daerah, serta penyesuaian target dan indikator kinerja daerah.

(2) RPJMD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi:
   a. SKPD dalam menyusun Renstra SKPD Perubahan Tahun 2014-2019 dan Renja SKPD Tahun 2018 dan 2019;
   b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2018 dan Tahun 2019.

BAB II
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD-P terdiri atas:
   a. BAB I : PENDAHULUAN.
   b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
   c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.
   d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.
   e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.
   f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.

g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.
h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
i. BAB IX : PENUTUP.

(2) Isi dan uraian RPJMD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pasal 4

(1) RPJMD-P ini menggunakan dan dilengkapi dengan KLHS RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.

(2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisahkan dari RPJMD-P ini.

(3) Dokumen KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD-P ini.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD-P ini.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melakukan penyempurnaan dan/atau perubahan terhadap RPJMD-P ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Bupati melakukan evaluasi RPJMD-P yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen RPJMD-P, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian target dan sasaran RPJMD-P ini.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD periode berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 Januari 2017

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 25 Januari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 5

a. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait Dokumen RPJMD Perubahan ini kepada *stakeholder* yang terkait.
b. Target-target yang telah tercantum didalam RPJMD Perubahan agar didukung oleh semua OPD maupun *stakeholder* melalui berbagai program dan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, konsistensi, transparansi, inovatif, dan rasa tanggung jawab tinggi.
c. RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 ini menjadi pedoman dan perhatian bagi seluruh SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD Perubahan Tahun 2014-2019.
d. Dokumen RPJMD Perubahan ini menjadi penyelaras antara dokumen rencana jangka panjang, sekaligus sebagai penghubung dengan dokumen jangka pendek dibawahnya, diharapkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan secara terarah, terpadu, berkelanjutan dan terhindar dari duplikasi-duplikasi dalam Implementasinya di SKPD sesuai dengan prinsip berkesinambungan (*continuity*) dan berkelanjutan (*sustainability*).
e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Perubahan ini.

Akhirnya, semoga RPJMD Perubahan ini bisa menjadi acuan bersama bagi segenap elemen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan tata kelola pemeritahan dan proses pembangunan, sehingga terwujud **Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing.**

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 25 Januari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu : (1) meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam pembangunan, serta (2) meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan upaya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kubu Raya menjadi masyarakat yang adil dan makmur, maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyusun perencanaan pembangunan daerah melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Dalam RPJPD tersebut ditetapkan Visi pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2029 yaitu "***Kabupaten Kubu Raya yang Mandiri dan Sejahtera***" dengan penjelasan sebagai berikut :

Mandiri : mengandung makna bahwa Kabupaten Kubu Raya menjadi kabupaten yang memiliki keunggulan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang kompetitif, maju dan terdepan di Kalimantan Barat dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Sejahtera : mengandung makna bahwa telah terpenuhinya segala kebutuhan dasar, fisik, mental-spiritual, rasa aman, nyaman, tertib, cerdas, sehat dengan fungsi lingkungan hidup yang lestari dan sistem kehidupan masyarakat yang religius, toleransi, dan berbudaya yang tinggi.

Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi yaitu :

1. Meningkatkan masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia, religius, bertoleransi, berbudaya yang tinggi, mengembangkan modal sosial dan nilai kearifan lokal, serta meningkatkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, mengembangkan penelitian, mendorong inovasi, kreativitas dan kemandirian daerah di berbagai bidang, serta meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja aparatur pemerintah, mengefektifkan reformasi birokrasi, menerapkan *Good Governance* dan *Clean Government*;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, agroindustri, teknologi, jasa, kemitraan, dan meningkatkan sarana, prasarana, dan infrastruktur wilayah yang merata dan berkualitas, serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan, maka RPJPD dijabarkan kedalam rencana pembangunan jangka menengah, dimana RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2029 dibagi dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan prioritas arah kebijakan tiap tahapan sebagai berikut:

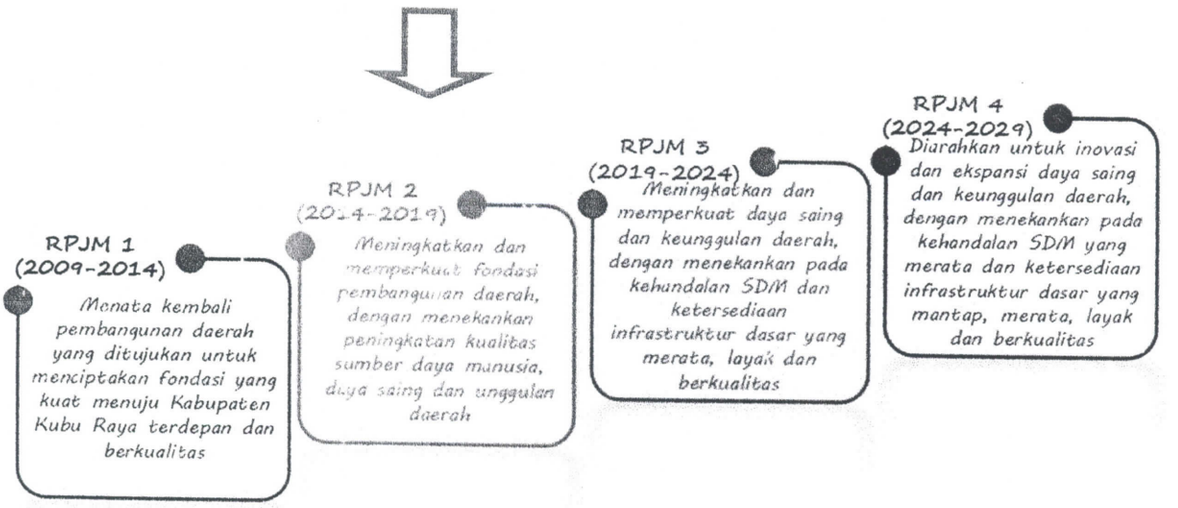

Gambar 1.1
Tahap Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPD 2009-2029

Sesuai dengan tahapan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Kubu Raya saat ini, merupakan RPJMD fase kedua dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. RPJMD adalah penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 telah dilaksanakan dengan 5 (lima) pendekatan, sebagaimana pendekatan-pendekatan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dan telah dilaksanakan secara konsisten selama ini. Adapun kelima pendekatan tersebut adalah :

1) Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini,

rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD melalui pembahasan di DPRD Kabupaten Kubu Raya, yang mengacu pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik;

2) Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
3) Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki (melalui Forum Konsultasi Publik, Musrenbang, dan lain-lain) ;
4) Pendekatan Atas-Bawah *(top-down)* dan Bawah-Atas *(bottom-up),* pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam rangka menjalankan fungsi pengendalian dan evaluasi yang diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Bappeda Kabupaten Kubu Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut, melakukan evaluasi terhadap Dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2019 pada Tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut direkomendasikan untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa target capaian kinerja setelah memperhitungkan waktu yang tersisa dan kemampuan pendanaan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, serta perkembangan situasi dan perubahan kebijakan nasional yang mendasar. Disamping itu juga berdasarkan hasil review RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang difasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2017, maka dilakukan penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 264 Ayat (5) disebutkan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil

pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, dilandasi dasar hukum antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028.
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Perubahan Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dinyatakan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sejalan dengan prinsip-prinsip diatas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen terkait lainnya yang bersifat perencanaan sektoral.

1.3.1. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2015-2019

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025 Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah **"Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur"** yang akan menjadi sasaran dua puluh tahun sampai dengan tahun 2025. RPJPN dibagi kedalam empat tahapan RPJMN. Awalnya RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memperhatikan RPJMN tahap kedua, yaitu RPJMN Tahun 2010-2014, sedangkan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memperhatikan RPJMN tahap ketiga, yaitu RPJMN Tahun 2015-2019.

Prioritas utama RPJMN Tahun 2015-2019 adalah Memantapkan Pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyelaraskan rencana pembangunan daerah RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJMN Tahun 2015-2019 akan dijabarkan dalam Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

1.3.2. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029

Penyusunan RPJMD Perubahan ini selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih periode 2014-2019, harus berpedoman juga pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan RPJMD tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Adapun prioritas RPJMD Tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar untuk menunjang aksesibilitas dan investasi daerah;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rangka pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan daerah dan pengembangan daya saing/keunggulan daerah dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
4. Peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip *Good Governance dan Clean Government.*

Oleh karena itu, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi didalam RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 dan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, maka disusunlah RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, diharapkan terwujud sinergisitas antara kondisi saat ini dengan sasaran proritas pembangunan yang ingin dicapai.

1.3.3. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 telah ditetapkan dengan visi **"Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat;
2. Meningkatnya Kecerdasan Sumberdaya Manusia;
3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
4. Meningkatnya Sumberdaya Aparatur dan Pelayanan Publik;
5. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar;
6. Meningkatnya Kemampuan Pembiayaan Pembangunan; dan
7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya.

Penetapan prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Kubu Raya dalam RPJMD Perubahan ini harus memperhatikan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat dengan pertimbangan adanya persamaan kepentingan atau tujuan strategis yang harus disinergiskan, adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama, dan adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan. Keterkaitan Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 akan dijabarkan dalam Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

1.3.4. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan Renstra SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dibawah koordinasi dan verifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menjaga kesinambungan, konsistensi perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik dan memastikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dijabarkan dan diakomodir dalam Renstra SKPD. Dengan ditetapkannya RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dan dengan dibentuknya SKPD baru sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016, maka setiap SKPD harus menyesuaikan Renstranya dengan melakukan penyusunan Renstra SKPD Perubahan Tahun 2014-2019.

1.3.5. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Perubahan Tahun 2014-2019 setiap tahun akan dijabarkan ke dalam RKPD khususnya RKPD Tahun 2018 dan 2019 sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam Rangka memberikan arah dalam pentahapan pencapaian visi jangka menegah daerah akan ditentukan arah kebijakan tahunan yang akan menjadi tema RKPD sesuai dengan periodesasi tahunan dalam RPJMD Perubahan ini. Penentuan tema RKPD tahunan akan dijabarkan dalam Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2 berikut:

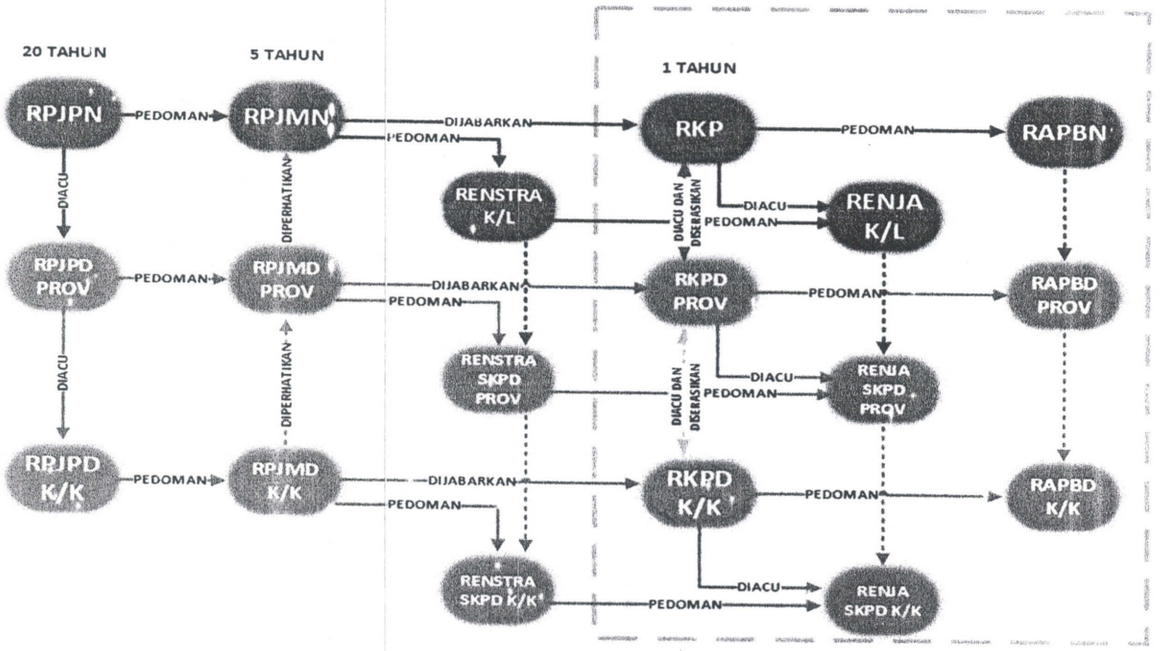

Gambar 1.2
Hubungan Antara RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

1.3.6. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RTRW Kabupaten Kubu Raya

Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 mengintegrasikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pengembangannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya meliputi:

1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya;
3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 akan menjadi acuan penyusunan program-program prioritas dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur dan prasarana wilayah akan mengacu pada rencana struktur ruang yang meliputi:

1. Rencana Pusat-Pusat Kegiatan;
2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan
3. Rencana Sistem Prasarana Lainnya.

Sedangkan program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan akan memperhatikan rencana pola ruang yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Selain itu, dalam menyusun RPJMD Perubahan ini selain berpedoman pada RTRW Kabupaten Kubu Raya juga memperhatikan RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota berbatasan, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang. Hal ini perlu dilakukan untuk sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah serta keterpaduan struktur dan

pola ruang kabupaten/kota berbatasan, terutama yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah, yakni Kawasan Metropolitan Pontianak.

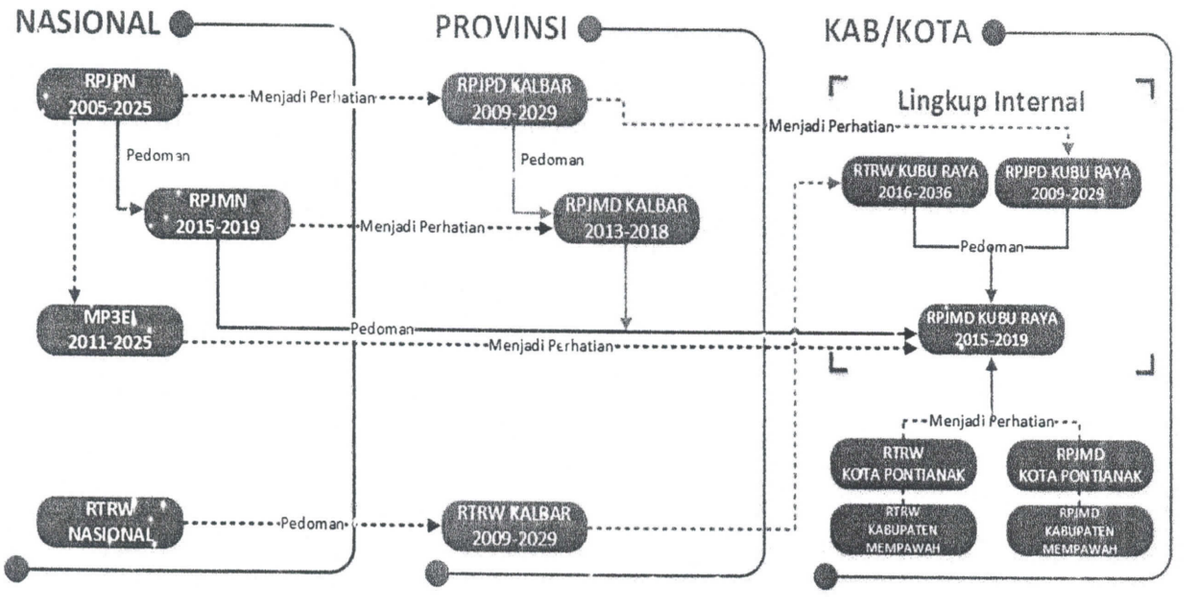

Gambar 1.3
Hubungan Antara RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Dengan Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Sekitar

1.4 Sistematika Penulisan

RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Perubahan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah, yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, serta fokus pada pencapaian visi dan misi daerah,

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran hasil pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan daerah masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu, dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran,

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan, serta program pembangunan daerah disertai pagu indikatif.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .

Bab ini memuat dan menjelaskan indikator kinerja daerah untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IX PENUTUP.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, RPJM Provinsi Kalimantan

Barat 2013-2018, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, serta berbagai aspirasi seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

2. Sebagai acuan dan pedoman bagi Kepala SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Perubahan Tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan 2019 dan Rencana Kerja SKPD Tahun 2018 dan 2019 serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kubu Raya secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga, yang pada gilirannya akan mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator - indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan disusunnya RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 antara lain meliputi :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan dapat disesuaikan dan dilaksanakan dalam sisa waktu menjelang akhir periode perencanaan Tahun 2014-2019 ;
2. Sebagai rujukan bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kubu Raya, APBD Provinsi Kalimantan Barat dan APBN, serta sumber dana lainnya, secara efektif, efisien dan fokus pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan ;
3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD, antara Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
4. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

5. Menjamin terwujudnya konsistensi, sinergi dan integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
6. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergisitas, koordinasi, sinkronisasi, dan inovasi oleh masing-masing pelaku pembangunan (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha);
7. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
8. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional, baik melalui Pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah, dan Bawah-Atas serta pendekatan secara Holistik, Integratif, Tematik, dan berbasis Spasial ;
9. Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
10. Menyesuaikan dengan Perubahan dan Perbaikan Regulasi dan Aturan yang Terkait dengan Pemerintahan Daerah, Perencanaan, dan Penganggaran.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demographi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten yang memiliki wilayah daratan dan perairan/kepulauan yang tersebar menjadi beberapa wilayah kecamatan pesisisr. Kabupaten Kubu Raya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 dengan luas wilayah defenitif ± 6.985,24 km² atau 698.524 Ha yang terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah kecamatan dengan jumlah 120 desa.

Posisi geografis Kabupaten Kubu Raya terletak disisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada koordinat 00 13' 27" Lintang Utara sampai dengan 10 00' 15" Lintang Selatan dan 1090 02' 47" sampai dengan 1090 58' 17" Bujur Timur. Batas -batas administratif Kabupaten Kubu Raya :

Sebelah Utara	:	berbatasan dengan Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Landak
Sebelah Timur	:	berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang
Sebelah Selatan	:	berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara
Sebelah Barat	:	berbatasan dengan Selat Karimata

Secara administratif Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan dan 120 desa (dua desa pemekaran lainnya sudah mendapatkan persetujuan DPRD, dan sedang menunggu Registrasi dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu desa Padi Jaya Kecamatan Kuala Mandor B dan desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap). Deskripsi mengenai wilayah dan jumlah desa menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH DESA MENURUT KECAMATAN KABUPATEN KUBU RAYA

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Luas (Km^2)	Persentase (%)
1	Batu Ampar	Padang Tikar	15	2.002,70	28,67
2	Terentang	Terentang	10	786,40	11,26
3	Kubu	Kubu	20	1.211,60	17,35
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	14	291,90	4,18
5	Sungai Kakap	Sungai Kakap	13	453,17	6,49
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	6	111,07	1,59
7	Sungai Raya	Arang Limbung	20	929,30	13,30
8	Sungai Ambawang	Ambawang Kuala	15	726,10	10,39
9	Kuala Mandor B	Kuala Mandor	5	473,00	6,77
Kabupaten Kubu Raya			**120***	**6.985,24**	**100**

Sumber : Disospemdes Kubu Raya dan BPS Kubu Raya Tahun 2017
* 2 (dua) desa masih dalam proses registrasi Kemendagri (Desa Padi Jaya dan Desa Parit Keladi)

2. Letak dan Kondisi Geografis

Dari perspektif geostrategis Kabupaten Kubu Raya memiliki posisi yang sangat strategis. Dalam rencana tata ruang *Pontianak Metropolitan Area,*, beberapa cluster rencana yang akan dikembangkan bersingungan secara langsung dengan wilayah administratif kecamatan yang merupakan wilayah hinterland Kota Pontianak. Rencana pengembangan Ring Road Tol Laut, serta rencana pergudangan di wilayah pesisir desa Sungai Rengas, akan menjadikan daerah-daerah tersebut menjadi daerah tujuan investasi baru. Selain itu, rencana pengembangan koridor jalan Ahmad Yani 3 yang menghubungkan wilayah Kakap-Punggur-Rasau Jaya, merupakan kawasan-kawasan yang diperkirakan akan menjadi Central District Bussines (CDB) baru, yang akan menjadi pemicu pengembangan wilayah bagian dalam Kecamata Sungai Raya dan sekitarnya. Sementara itu, di wlayah Timur Kabupaten Kubu Raya, aktivitas trasportasi di jalan Trans Kalimantan, secara bertahap mempu mendorong berkembangnya wilayah tersebut, sebagai salah satu pusat pemukiman dan kegiatan perdagangan serta jasa termasuk pergudangan

Sebagai Kabupaten yang memiliki wilayah daratan dan pesisir/kepulauan, aktivitas pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara umum masih terpusat di wilayah Kecamatan. Wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, relatif jauh dari pusat pembangunan sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih memgedepankan pembangunan di wilayah terluar tersebut.

Karakteristik wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

- Pantai pesisir Kabupaten Kubu Raya, di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna, meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Kakap (12 Desa), Kecematan Kubu (19 Desa), Kecamatan Teluk Pakedai (14 Desa) dan Kecamatan Batu Ampar (14 Desa) dengan panjang pantai 194 Km;
- Parairan wilayah, sampai 4 (emapt) mil atau 7.408 Km dari garis surut terendah dikali dengan panjang pantai 194 Km = 1.630 K2 (7.408 Km x 194 Km = 1.630.68 Km2);
- Perairan Selat dalam wilayah Kabupaten (Selat Padang Tikar, Sebagian Selat Maya dan Perairan sekitar Tanjung Bunga) dengan kondisi perairan Estaurina, (pertemuan air asin dari Laut Natuna dengan air Tawar dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak) dengan luas perairan Estaurina tersebut = 42.260 Ha.
- Hutan Mangrove yang berada disepanjang selat dan pesisir terdiri dari luas hutan mangrove pada kawasan hutan =143.460 Ha. dan luas mangrorove di luar Kawasan Hutan = 328.905 Ha;
- Luas Hutan Lindung Bakau (HLB) diwilayah Kabupaten Kubu Raya seluas 63.362.20 tersebar di 4 (empat) kecamatan
- Pesisir, berlokasi di sebelah Utara Kecamatan Batu Ampar, sebelah utara sampai barat Kecamatan Kubu dan pada pantai Barat Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Sungai Kakap; kawasan hutan selengkapnya dapat dilihat sebagaimana tabel 3 berikut ini.

Pulau-pulau Kecil di Kebupaten Kubu Raya, berdasarkan Berita Acara Verifikasi Penamaan Pulau di Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 28 Juni 2008 oleh Direktotarat Jendral Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri RI, berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) buah Pulau-pulau Kecil.

Tabel 2.2.
NAMA DAN POSISI PULAU TIAP KECAMATAN
DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	Kecamatan, Nama Pulau	Koordinat	
		Lintang	Bujur
A	KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG		
1	Hanyut	00.01.24	109.24.21
B	KECAMATAN BATU AMPAR		
2	Gelanggang	00.44.45	109.33.36
3	Padang Tikar	00.48.37	109.20.35
4	Selatseh	00.53.42	109.21.43
5	Tenggara Mandi	00.53.08	109.24.25
6	Perling	00.39.04	109.27.41
7	TelukAir I	00.43.47	109.33.51
8	Telukair II	00.45.32	109.36.06
9	Telukair III	00.43.39	109.35.19
10	Sejenuhairtawar	00.41.34	109.36.48
11	Pulaibuntung	00.41.04	109.37.59
12	Munggu'linang	00.44.03	109.39.02
C	KECAMATAN SUNGAI KAKAP.		
13	Kurnia	00.11.12	109.07.04
14	Nyamok	00.05.37	109.10.23
15	Keladi	00/11.18	109.06.27
16	Sepok laut	00.13.37	09.07.22
17	Sepokperupuk	00.08.22	109.06.31
18	Tanjungsaleh	00.07.10	109.09.21
19	Tempurung	00.06.39	109.07.20
20	Taiminyak	00.05.37	109.10.23
21	Betingtengah	00.11.35	109.04.11
D	KECAMATAN KUBU		
22	Burungbesar	00.36.45	109.18.33
23	Burungkecil	00.36.37	109.18.42
24	Dabong	00.35.57	109.16.06
25	Tiga	00.36.34	109.17.39
26	Muarakubu	00.34.36	109.19.46
27	Bidara	00.36.37	109.22.58
28	Pakawal	00.40.02	109.30.21
29	Berembang	00.41.25	109.29.27
E	KECAMATAN TELUK PAKEDAI		

30	Pelombak	00.21.23	109.11.30
F	KECAMATAN SUNGAI RAYA		
31	Tanjungsapi	00.22.08	109.37.05
32	Limbung	00.13.52	109.48.58
33	Buntutlimbung	00.16.06	109.45.59
34	Keranji	00.12.35	109.47.42
35	Telukbayur	00.15.05	109..54.46
36	Jambu	00..13.57	109.56.49
37	Separoh	00. 11.23	109.55.23
38	Benuang	00.12.34	109.53.35
39	Sekancil	00.09.33	109.54.19

Sumber : Berita Acara Verifikasi Penamaan Pulau di Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jendra Pemerintahan Umum DEPDAGRI RI Tahun 2008

Pada tahun 2016, Kementerian Desa dan Transmigrasi merelease perkembangan Indek Desa Membangun seluruh Indonesia melalui surat Nomor 30 tahun 2016. Berdasarkan data IDM tersebut, dari 116 desa yang di nilai, sebagian besar desa (72 %) di Kabupaten Kubu Raya masuk dalam katagori sangat tertinggal dan tertinggal. Kendatipun terdapat metode perhitungan penilaian kemandirian desa berdasarkan versi Bappenas, kondisi IDM menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, untuk melakukan pengatan pemerintahan di desa, sehingga dapat memenuhi dan memperbaiki standar pelayanan publik di desa menuju desa berkembaang – desa mandiri.

Tabel 2.3
STATUS KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA 2016

Kecamatan	Status				Jumlah
	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	
Batu Ampar	2	11	2	0	15
Terentang	1	7	1	0	9
Kubu	7	11	2	0	20
Telok Pa"kedai	3	9	2	0	14
Sungai Kakap	0	6	5	2	13
Rasau Jaya	1	3	0	2	6
Sungai Raya	3	8	7	2	20
Sungai Ambawang	3	9	2	0	14
Kuala Mandor-B	2	3	0	0	5
Jumlah*	**22**	**67**	**21**	**6**	**116**

Sumber : Status Kemandirian Desa , Surat Keenterian Desa dan Transmigrasi Republik Indoneisa, No.30/2016. * = jumlah yang dinilai sementara 116 desa

3. Topografi

Topografi Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dataran rendah, sebagian besar datar, bergelombang dan sebagian kecil berbukit/bergunung dengan kemiringan 0% - >60%. Rata-rata bentang alam Kabupaten Kubu Raya berelief datar dan rawa-rawa dengan ketinggian < 10 m dan kemiringan < 2%. Pada beberapa wilayah, masih dapat dijumpai daerah dengan relief >10 m dan dengan kemiringan berkisar antara 2 - >60.

4. Geologi

Peta geologis, Kabupaten Kubu Raya sebagian besar terdiri dari endapan aluvial, pasang surut, danau, rawa dan undak dengan formasi aluvium dan endapan rawa (Qa) yang merupakan formasi paling muda. Formasi ini terdiri dari kerikil, pasir, lanau, lumpur dan gambut. Endapan ini menutupi dataran aluvial dan pasang surut di bagian barat, lembah sungai kapuas dan lembah-lembah sungai besar lainnya yang mengalir ke terain perbukitan yang terpotong-potong dan kedalam dataran aluvial.

Bagian barat dan selatan terdiri dari endapan-endapan laut dan sungai baru berumur paling muda dan menempati seluruh zona pertanian bagian barat Kabupaten Kubu Raya. Zona pantai terdiri dari cekungan liat yang tertutup oleh rawa-rawa gambut dan dilintasi danau-danau dangkal dan rawa yang terkena banjir secara periodik yang berada diantara teras-teras tertutup gambut.

Jenis tanah yang ditemui di wilayah Kabupaten Kubu Raya yaitu jenis tanah aluvial, gleisol, organosol dan regosol.

1. *Aluvial,* jenis tanah Aluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, berumur masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai (hasil dari lumpur yang mengendap), dataran aluvial pantai, dan daerah cekungan (depresi).
2. *Gleisol,* tanah yang selalu jenuh air sehingga berwarna kelabu atau menunjukkan sifat-sifat hidromorfik lain.
3. *Organosol Gley Humus* atau *Tanah Gambut* atau *Tanah Organik*, jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rerumput rawa, dengan ciri dan sifat: ketebalan lebih dari 0.5 meter, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak

berstruktur, konsistensi tidak lekat hingga agak lekat, kandungan organik lebih dari 30% untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20% untuk tanah tekstur pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4.0), kandungan unsur hara rendah.

4. *Regosol,* tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%, hanya mempunyai horison penciri ochrik, histik atau sulfurik.

5. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Kubu Raya terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional karena melintasi beberapa kabupaten bahkan beberapa provinsi. Adapun wilayah sungai di Kabupaten Kubu Raya, meliputi :

1. Sungai besar terdapat di Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar, dan Sungai Landak; dan
2. Sungai kecil terdapat di Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Bara Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sopar, Sungai Krawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Sekapau, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Empat dan Sungai Nibung.

Sedangkan Daerah rawa terdiri dari :

1. Daerah Rawa (DR) Nasional, terdiri atas 27 DR, yaitu; DR. Kapuas Kecil I, DR. Kapuas Kecil II, DR. Kapuas Kecil III, DR. Jawi - Kalimas – Betutu, DR. Punggur- Selat Kering, DR. Rasau Jaya I, II, III ,IV (Bintang Mas), DR. Sungai Bulan, DR. Sungai Asam - Bengkarek, DR.Tebang Kacang, DR. Pinang Komplek, DR. Jangkang I + II, DR. Air Putih, DR. Kubu Komplek (Kelang, Tl.Nangka, Sungai Terus), DR. Sungai Terus, DR. Olak Olak Kubu, DR. Dabung - Dabung SP II, DR. Sungai Selamat - Seruat, DR. Kerawang Komplek, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Mendawak Linda, DR. Sungai Nipah, DR. Teluk Pakedai, DR. Radak I + II, DR. Terentang, DR. Terentang Hulu;
2. Daerah Rawa Provinsi, terdiri atas 3 DR, yaitu: DR Ambangah, DR. Kuala Karang, dan DR Sungai Selamat;

3. Daerah Rawa Kabupaten, terdiri dari 68 DR, yaitu; DR. Sepuk Keladi, DR. Sepuk Perupok, DR. Sepuk Laut, DR. Tanjung Saleh, DR. Pulau Nyamuk, DR. Tanjung Wangi, DR. Pematang Tujuh, DR. Sangkar Dunia, DR. Teluk Bakung, DR. Kuala Dua, DR. Kapur, DR. Mekar Baru, DR. Dusun Obyek Sungai Durian, DR. Teluk Kapuas, DR. Pulau Limbung, DR. Gunung Tamang, DR. Pelita Jaya, DR. Bemban, DR. Ambawang, DR. Kampung Baru, DR. Mengkalang, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Suka Maju, DR. Padang Tikar I, DR. Padang Tikar II, DR. Padang Tikar, DR. Sungai Jawi, DR. Ambarawa, DR. Tasik Malaya, DR. Tanjung Harapan, DR. Sungai Deras, DR. Arus Deras, DR. Selat Remis, DR. Teluk Gelam, DR. Tanjung Bunga, DR. Sungai Nibung, DR. Karya Jaya, DR. Betuah, DR. Teluk Empening, DR. Teluk Bayur, DR. Permata, DR. Terentang Hilir, DR. Sungai Ambawang Kuala, DR. Durian, DR. Jawa Tengah, DR. Simpang Kanan, DR. Puguk, DR. Pasak Piang, DR. Pasak, DR. Loncek, DR. Tamang, DR. Korek, DR. Lingga, DR. Pancaroba Sungai, DR. Pancaroba, DR. Lais, DR. Tapah, DR. Teluk Lerang, DR. Biong, DR. Lintang Batang, DR. Jalo, DR. Benuah, DR. Kuala Mandor A, DR. Kuala Mandor B, DR. Sungai Enau, DR. Kubu Padi, DR. Retok;
4. Daerah Irigasi Kabupaten, meliputi Daerah Irigasi Baharu Ambawang, Daerah Irigasi Bemban Timur, Daerah Irigasi Bemban Barat, Daerah Irigasi Ence Manan, Daerah Irigasi Nuri, Daerah Irigasi Padu Ampat dan Daerah Irigasi Samak di wilayah Kecamatan Kubu dengan keseluruhan seluas 944 Ha dan setelah perubahan menjadi 3.360 Ha.

6. Hidrologi

Sebagai daerah tropis yang dilalui garis khatulistiwa, Kabupaten Kubu Raya memiliki suhu dan kelembaban udara yang relatif tinggi sehingga memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2012 rata-rata curah hujan di Kabupaten Kubu Raya adalah 256,8 mm. Curah hujan terendah berdasarkan catatan BMG Supadio, tercatat pada bulan Agustus yaitu 73 mm dan tertinggi tercatat pada bulan Desember yaitu sebesar 502 mm. Sedangkan rata-rata banyak hari hujan pada tahun 2012 adalah 18 hari. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November yaitu 30 hari, sedangkan terendah terjadi pada bulan Juni yaitu 6 hari. Temperatur udara rata-rata di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012, yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Supadio, berkisar antara 22,1^{0}C sampai dengan 32,9^{0}C. Suhu terendah tercatat pada bulan Agustus yang tercatat sebesar

22,1°C sedangkan temperatur udara tertinggi tercatat pada bulan April yaitu sebesar 32,9°C.

7. Penggunaan Lahan

Perubahan terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya, relatif cukup besar. Analisa terhadap Peta RBI dengan menggunakan Citra Satelit, terdapat spot-spot baru yang diduga sebagai bentuk aktivitas pemukaan lahan. Sebagian besar perubahan penggunaan lahan/alih fungsi lahan di dorong oleh aktivitas pembangunan permukiman dan sebagai akibat kegiatan pertanian/perkebunan skala besar. Secara umum, penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016 masih didominasi oleh kawasan hutan (hutan negara dan hutan rakyat), sebesar 59,02% dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya, yang tersebar di semua kecamatan, kemudian diikuti dengan sawah (meliputi sawah irigasi sederhana, sawah tadah hujan, dan sawah pasang surut) sebesar 9,88%,dan perkebunan sebesar 9,68%.

Tabel 2.4
PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015

NO	Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Tegalan/ Ladang	31.651,75	4,53
2	Semak	42.308,06	6,06
3	Perkebunan Rakyat	55.278,85	7,91
4	Perkebunan Besar	175.496,83	25,12
5	Kebun Campuran	9.955,67	1,43
6	Hutan Sejenis	53.737,70	7,69
7	Hutan Lebat	150.508,14	21,55
8	Hutan Belukar	173.993,00	24,91
9	Sawah	5.594,00	0,80
Jumlah		698.524,00	100,00

Sumber : BPS, Kubu Raya, 2016

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam RTRW Nasional, Kabupaten Kubu Raya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional untuk mendukung pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Kota Pontianak dan daerah hinterland Mempawah-Singkawang-Sambas serta koridor daerah pedalam Sanggau-Kapuas Hulu.

Tabel 2.5
SISTEM PUSAT-PUSAT KEGIATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	PKN	No	PKL	No	PPK	No	PPL
1.	Kawasan Metropolitan Pontianak (I/C/1)	1.	Sungai Kakap (I-III/B/D/2)	1.	Padang Tikar Dua (Kec.Batu Ampar)	1.	Sungai Kerawang (Kec. Batu Ampar)
		2.	Rasau Jaya (I-III/B/D/2)	2.	Terentang Hilir (Kec. Terentang)	2.	Sungai Asam (Kec. Sungai Raya)
		3.	Kubu (I-III/B/D/2)	3.	Selat Remis (Kec. Teluk Pakedai)	3.	Sungai Rengas (Kec. Sungai Kakap)
		4.	Batu Ampar (I-III/B/D/2)	4.	Kuala Mandor B (Kec. Kuala Mandor B)	4.	Korek (Kec. Sungai Ambawang).

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya, Nomor 7 Tahun 2016

I – IV : Tahapan pengembangan

A : Percepatan pengembangan kota-kota utama Kawasan Perbatasan

A/1 Pengembangan/peningkatan fungsi

A/2 Pengembangan baru

A/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

B : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis Otonomi Daerah

C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional

C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi

C/2 Pengembangan baru

C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

D : Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana

D/1 Rehabilitasi kota akibat bencana alam

D/2 Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis mitigasi bencana

E : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi

E/1 Pengembangan/peningkatan fungsi

E/2 Pengembangan baru

E/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

Ditingkat lokal, kewilayahan Kabupaten Kubu Raya dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dengan fungsi utama mencakup :

a. PKN yaitu kawasan metropolitan Pontianak yang mencakup bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya (Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Sungai kakap);
b. PKL meliputi Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kubu dan Batu Ampar;
c. PPK meliputi Padang Tikar Dua (Kecamatan Batu Ampar), Terentang Hilir (Kecamatan Terentang), Selat Remis (Kecamatan Teluk Pakedai) dan Kuala Mandor B (Kecamatan Kuala Mandor B); dan
d. PPL meliputi Sungai Kerawang (Kecamatan Batu Ampar), Sungai Asam (Kecamatan Sungai Raya), Sungai Rengas (Kecamatan Sungai Kakap) dan Korek (Kecamatan Sungai Ambawang).

Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kawasan strategis Kabupaten Kubu Raya mencakup kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis wilayah kabupaten Kubu Raya dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi :

a. kawasan pusat perdagangan dan jasa terpadu (*central business district*, CBD) di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang;
b. kawasan pengembangan pelabuhan terdapat di Kecamatan Batu Ampar dan Sungai Kakap;
c. KTM Rasau Jaya meliputi Kecamatan Rasau Jaya, Kubu, Sungai Raya dan Teluk Pakedai;
d. kawasan wisata strategis di Kecamatan Sungai Kakap;
e. kawasan minapolitan dengan sektor unggulan perikanan, terdiri dari :
    1) minapolitan Batu Ampar meliputi Desa Padang Tikar Satu, Padang Tikar Dua, Nipah Panjang, Batu Ampar, dan Sungai Jawi;
    2) minapolitan Kubu meliputi Desa Air Putih, Desa Kubu dan Desa Dabong;
    3) minapolitan Sungai Kakap meliputi Desa Sungai Rengas, Sungai Kakap, Sungai Kupah, Tanjung Saleh dan Sepok Laut; dan
    4) minapolitan Teluk Pakedai meliputi Desa Sungai Nibung, Teluk Gelam, Kuala Karang, dan Tanjung Bunga.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan perlindungan bakau (*mangrove*) di Kecamatan Batu Ampar, Kubu, dan Teluk Pakedai.

Selain kawasan strategis dari sudut kepentingan Penataan Ruang, Kabupaten Kubu Raya memiliki kawasan Perdesaan yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi komoditi yang diunggulkan. Kawasan perdesaan berfungsi mendukung percepatan pembangunan desa dan saat ini Kabupaten Kubu Raya memiliki 9 Kawasan Perdesaan dengan luas 231.428,39 Ha berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2017. Kawasan Perdesaan yang sudah masuk dalam Prioritas Pembangunan Nasional (KPPN) adalah Kawasan Perdesaan Rasau Raya. Sedangkan kawasan perdesaan lainnya masih dalam tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

C. Wilayah Rawan Bencana

Secara umum Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi rawan terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana lainnya. Potensi kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya, mencakup :

a. Kawasan rawan abrasi.
   1) Kawasan rawan abrasi pantai terdapat di Kecamatan Teluk Pakedai, Kubu, Batu Ampar dan Sungai Kakap; dan
   2) Kawasan rawan abrasi tebing sungai terdapat di Kecamatan Kubu, Sungai Kakap, Sungai Raya dan Rasau Jaya.
b. Kawasan rawan gelombang pasang.
   Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat di wilayah kabupaten.
c. Kawasan rawan banjir.
   Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Kuala Mandor B, Sungai Kakap, Sungai Raya, Terentang, Kubu, Teluk Pakedai, Rasau Jaya dan Sungai Ambawang.
d. Kawasan rawan angin puting beliung atau angin kencang.
   Kawasan rawan angin puting beliung atau angin kencang terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, Sungai Raya, Rasau Jaya, Teluk Pakedai dan Terentang
e. Kawasan rawan kebakaran.
   Kawasan rawan kebakaran, terdiri atas :

1) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terdapat di wilayah Kabupaten; dan
2) Kawasan rawan kebakaran perumahan dan permukiman terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang.

D. Demografi

1. Perkembangan kependudukan

Kabupaten Kubu Raya memiliki distribusi penduduk yang terpencar-pencar. Jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya sesuai data BPS 2016 (proyeksi penduduk) tercatat sebanyak 554.811 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 281.175 jiwa dan 273.636 jiwa penduduk perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan (rasio jenis kelamin) sebesar 103, sedangkan tingkat kepadatan penduduknya mencapai 79 jiwa/kilometer persegi dengan laju pertumbuhan sebesar 1,7 persen.

Penduduk Usia Kerja (PUK) Kabupaten Kubu Raya sebagian besar merupakan penduduk usia produktif. Jumlah PUK Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 (angka proyeksi) sebanyak 389.735 jiwa meningkat sebanyak 15.405 jiwa dibandingkan tahun 2015 yang sebanyak 374.330 jiwa. Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), perkembangan TPAK Kabupaten Kubu Raya sejak tahun 203 sampai dengan tahun 2015, terus mengalami peningkatan.

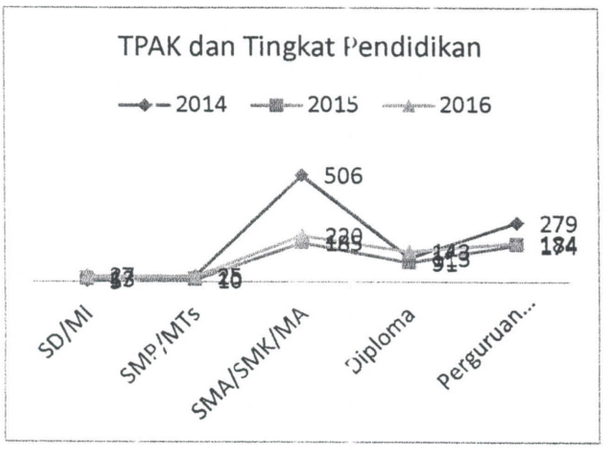

Prosentase TPAK tahun 2013 sebesar 63,97% dan bertutut-turut tahun 2014 dan tahun 2015 masing-masing 65,01% dan 67,67%. Peningkatan TPAK berarti semakin banyak penduduk di Kabupaten Kubu Raya yang terlibat dalam kegiatan usia produktif. Sementara prosentase angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kubu Raya kendatipun cenderung menurun akan tetapi cukup mengkhawatirkan. Prosentase pengangguran terbuka tahun 2015 relatif lebih baik dibandingkan dengan prosentase angka pengangguran terbuka di tahun 2014 dan tahun 2016. Prosentase angka

pengangguran terbuka di tahun 2014 sebesar 6,08%, dan kembai turun di tahun 2015 (angka proyeksi) dengan prosentase angka pengangguran terbuka sebesar 6,11 persen.

Tabel 2.6.
TINGKAT PARTISIPASI TENAGA KERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

NO	Indikator Ketenagakerjaan	2014	2015	2016*
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,01	67,60	67,67
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,08	6,18	6,11

Sumber : *BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2015,* * proyeksi diolah untuk kebutuhan analisa

Berdasarkan release data BPS mengenai penduduk yang sedang mencari pekerjaan terdaftar, pada tahun 2016 jumlah pencari kerja terdaftar (berdasarkan Kartu Kuning/AK1), sebanyak 599 pencari kerja atau lebih rendah sebesar 26,63% dari tahun 2016. Dari jumlah tersebut pencari kerja yang sudah ditempatkan sebanyak 266 orang.

Tabel 2.7
TINGKAT PARTISIPASI TENAGA KERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

NO	Uraian	Tahun		
1	Pendidikan	2014	2015	2016
2	SD/MI	5	13	27
3	SMP/MTs	25	10	25
4	SMA/SMK/MA	506	185	220
5	Diploma	113	91	143
6	Perguruan Tinggi	279	174	184
	Jumlah	928	473	599

Sumber : *BPS,Kubu Raya, 2017*

Tabel 2.8
KONDISI KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016

No.	Komponen	Jumlah	%
1	Penduduk Seluruh	554.811	100%
2	Angkatan Kerja (15 Tahun ke atas)		
	a. Bekerja	228.528	
	b. Mencari Kerja	Lihat dari K.Kuning	
	c. Mempersiapkan Usaha		
	d. Tidak mungkin mendapatkan pekerjaan		
	c. Belum mulai bekerja	14.599	
	f. Bersekolah	41.513	
	g. Mengurus rumah tangga	69.288	
	h. Lainnya	20.401	
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja		
	a. Bekerja >=60 jam	27.272	12,21%
	b. Bekerja <35 jam >	154.923	63,65%
	c. Bekerja < 15 jam >	51.781	21,28%
	c. Bekerja < 15 jam	9.410	3,87%
	d. Pengangguran terbuka	15.848	

Sumber: Sakernas Kubu Raya, 2016,

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2005-2009 diuraikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kubu Raya pada 2016 ditunjukkan oleh peningkatan terhadap laju pertumbuhan ekonomi (LPE)

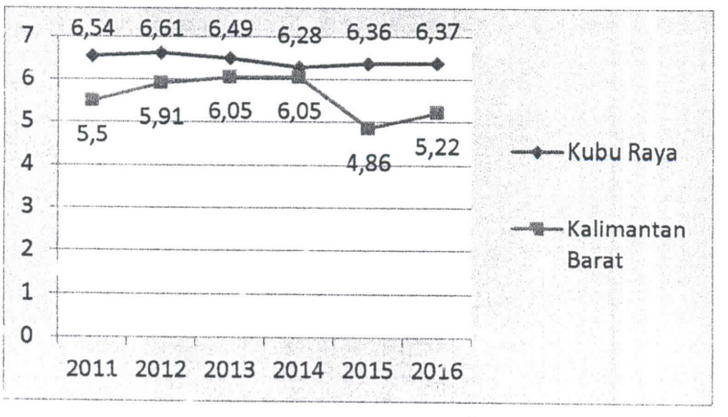

Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, yang mengalami kenaikan dari 6,37 persen di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 6,36 persen. Walaupun secara nominal, PDRB ADH konstan tahun 2016 meningkat sebesar 38,11 juta perkapita pertahun akan tetapi laju pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2016 mengalami perlambatan sebesar 4,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebear 5,07 persen. Walaupun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya sedikit melambat selama 3 (tiga) tahun terakhir, akan tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya selalu berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat.

Kategori industri pengolahan secara total tumbuh sebesar 5,12 persen pada tahun 2016. Kondisi ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,76 persen pada tahun 2015. 2016. Kondisi ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,76 persen pada tahun 2015. Setelah kategori industri pengolahan, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi terbesar kedua terhadap seluruh total perekonomian. Secara umum kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 3,69 persen pada tahun 2016. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 1,59 persen di tahun 2015.

Mereview komponen pembentuk laju pertumbuhan Kabupaten Kubu Raya selama 6 (enam) tahun terakhir, sebagai besar komponen pembentuk laju pertumbuhan merupakan sektor yang tidak terkait langsung dengan aktivitas yang memberikan multi player efect terhadap kegiatan ekonomi ikutannya. Kendatipun dari sisi pertumbuhan kategori non-tradable menunjukan kinerja yang tinggi, akan tetapi hal tersebut justreru berdampak tidak baik terhadap neraca pembayaran (surplus-defisit) sebagai akibat penurunan secara relatif terhadap kondisi riil perekonomian Kabupaten ini. Secara umum kondisi dimana katagori nontradeble cenderung lebih tinggi dibandingkan katagori tradeble, hal tersebut dalam jangka panjang akan menyebabkan turunnya lapangan kerja serta tingginya angka pengangguran.

Grafik 2.1.
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2011-2016

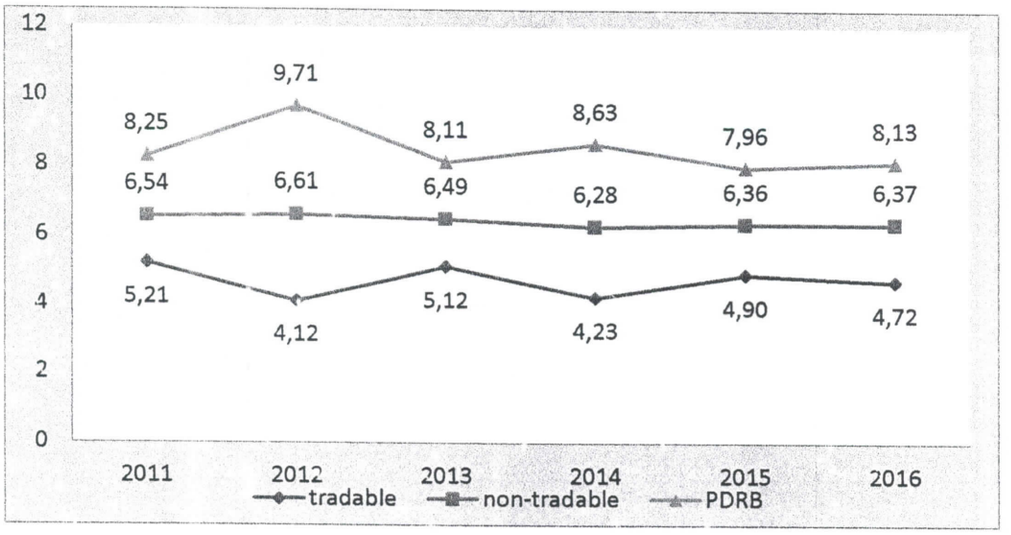

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017

Berdasarkan PDRB harga berlaku dan PDRB ADH konstan, peranan sektor industri pengolahan masih menjadi sektor yang paling besar memberikan sumbangan bagi pembentukan PDRB Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2016 kategori ini tercatat menyumbang sebesar 31,82 persen bagi PDRB Kabupaten Kubu Raya, sedikit menurun dibandingkan tahun 2012 yang menyumbang sebesar 32,89 persen. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya peranan subkategori industri kayu dan sejenisnya serta penurunan subkategori industri karet. Stabilitas sektor ini sebagaisektor tumuan di tunjang oleh masih eksisnya subkategori industri makanan dan minuman serta indusri pengolahan kelapa sawit.

Diagram 2.1
PERBANDINGAN STRUKTUR PEREKONOMIAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010 – 2016

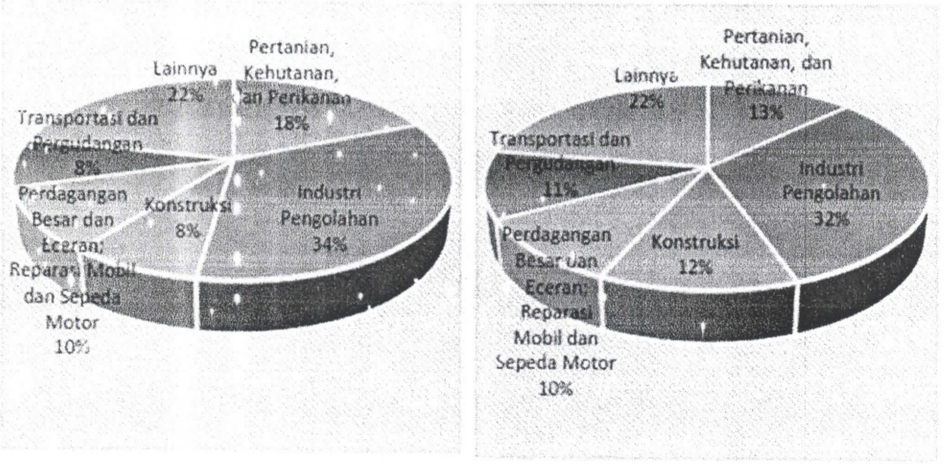

Sementara kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar kedua dalam perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2016, kategori ini menyumbang sebesar 12,72 persen terhadap total PDRB. Namun kontribusi kategori ini perlahan terus menurun. Diduga penurunan sektor ini disebabkan menurunnya peranan seluruh subkategori pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Kategori berikutnya yang menjadi penggerak perekonomian Kabupeten Kubu Raya adalah kategori konstruksi. Pembangunan infrastruktur selama lima tahun terakhir mampu meningkatkan peranan kategori ini terhadap total perekonomian. Pada tahun 2016, kategori konstruksi mampu menyumbang sebesar 12,06 persen terhadap PDRB Kabupaten Kubu Raya. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang memberikan sumbangan sebesar 9,29 persen.

Tabel 2.9.
DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN KUBU RAYA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2012-2016 (PERSEN)

No	Kategori	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,01	16,34	14,66	13,30	12,72
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,18	3,07	2,96	3,28	3,27
3.	Industri Pengolahan	32,89	32,02	32,32	32,11	31,82
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,18	0,22	0,29
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
6.	Konstruksi	9,29	10,32	11,19	11,92	12,06
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,58	10,36	10,44	10,16	10,12
8.	Transportasi dan Pergudangan	8,64	9,21	9,69	10,24	10,75
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,76	1,73	1,71	1,71	1,66
10.	Informasi dan Komunikasi	3,31	3,10	3,06	3,19	3,20
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,47	1,52	1,44	1,41	1,41
12.	Real Estate	2,99	3,10	3,03	2,99	3,02
13.	Jasa Perusahaan	0,45	0,45	0,44	0,45	0,43
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,84	3,07	3,13	3,29	3,53
15.	Jasa Pendidikan	3,61	3,79	4,02	4,04	4,11
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,79	0,77	0,77	0,71
17.	Jasa Lainnya	1,00	0,95	0,94	0,90	0,87
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kubu Raya Menurut Lapangan Usaha 2012-2016

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Kubu Raya masuk dalam konteks deversifikasi Arthur Lewis (teori migrasi) yang membagi perekonomian atas perekonomian perdesaan dan perkotaan. Di kotomi Dalam prespektif perekonomian, transformasi ideal sektor perekonomian ditunjukan dengan perubahan sektor pertanian ke industri sebagai mesin penggerak ekonomi suatu derah (pattern of develomment, hollis chenery). Terkait dengan hal tersebut, pergerakan struktur ekonomi Kabupaten Kubu Raya, ditunjang dengan tingginya peran sektor industri yang didukung dengan sektor pertanian dan jasa penunjang lainnya. Namun demikian, secara perlahan terjadi kondisi lompatan, dimana sektor jasa (terseiser) mengambil alih peran sektor sekunder, sebagai penunjang sektor pertanian (primeri). Dari sisi ini, pergeseran terhadap sektor basis tersebut, diikuti dengan sektor lainnya yang selama ini merupakan sektor dimana cukup besar dalam menyerap tenaga kerja penduduk lokal.

Tabel 2.10
PDRB PER KAPITA KABUPATEN KUBU RAYA ADH BERLAKU DAN ADH KONSTAN TAHUN 2000 TAHUN 2013-2016

URAIAN		2013	2014	2015	2016
A	ADH BERLAKU				
	PDRB (Triliun)	14.70	16,66	18,90	21,14
	PDRB Per Kapita (Juta)	27,763	30,929	34,653	38,110
B	ADH KONSTAN 2000				
	PDRB (Triliun)	12,82	13,63	14,49	15,42

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2016

2. Laju Inflasi

Tingginya pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada melonjaknya tingkat inflasi di Kabupaten Kubu Raya. Perhitungan angka inflasi lebih reliable dilakukan dengan pendekatan PDRB ADH berlaku karena lebih menggambarkan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Kubu Raya rata-rata masih di bawah 1 (satu) digit. Hal itu berarti gejolak perubahan perekonomian global yang sempat mendera perekonomian ditataran Nasional tidak terlalu berpengaruh terhadap indeks kesejahteraan masyarakat secara umum.

Di tingkat produsen, rata-rata angka inflasi tahunan Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 tercatat sebesar 5,17 persen lebih renah dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 6,63 persen. Hal yang perlu

diwaspadai terkait dengan perkembangan inflasi di Kabupaten Kubu Raya adalah inflasi yang dihitung atas dasar Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflkasi IHK, dihitung dengan mencermati pegerakan 7 harga barang terutama pada komponen makanan, terhadap kota terpilih yang dianggap sebagai supplayer berbagai kebvutuhan barang pokok di masyarakat (survey IHK dilakukan di Kota Pontianak dan Kota Singkawang).

Tabel 2.11.
PERTUMBUHAN PDRB DAN LAJU INFLASI DI KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertumbuhan PDRB	6,61%	6,49%	6,28%	6,36%	6,37%
2.	Laju Inflasi	3,61%	5,30%	6,70%	6,63%	5,17%

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2016

Pehitungan inflasi dengan metode IHK di tahun 2016 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015. Rata-rata tahunan angka inflasi IHK tahun 2015 tercatat sebesar 6,17 persen lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 9,38 persen. Di tahun 2016 angka inflas IHK turun secara drastis ke angka 3,88 persen. Pada 7 kelompok bahan yang diamati, kelompok bahan kelompok makanan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau merupakan angka yang tertinggi inflasi IHK nya.

Tabel 2.12.
INFLASI MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2012-2016 (PERSEN)

No	Kelompok Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Bahan Makanan	10,03	5,96	8,34	9,98	5,31
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,61	7,11	10,87	8,42	6,12
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	6,86	12,64	9,08	8,35	3,37
4.	Sandang	4,39	1,89	5,6	3,75	4,95
5.	Kesehatan	8,16	10,23	9,39	8,09	3,24
6.	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	0,82	8,8	3,4	3,15	4,98
7.	Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan	8,31	16,96	12,92	-1,62	-0,18
8.	Umum	0,47	8,18	9,38	6,17	3,88

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2017

Dampak riil pergerakan inflasi yang dihitung berdasarkan IHK akan terasa memberikan dampak secara riiil terhadap terhadap daya beli masyarakat Kabupaten Kubub Raya. Dengan kondisi geografis yang terpisahkan oleh wilayah perairan, tekanan perubahan IHK terhadap biaya distribusi ke wilayah-wilayah pedalaman, akan dibebankan kepada konsumen, sehingga purchasing power menjadi rendah.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator utama pendidikan mencakup angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, dan indikator utama kesehatan mencakup angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. APK adalah persentase anak usia sekolah yang memperoleh kesempatan pendidikan. APK SMP dan SMA mulai tahun 2008-2010 sudah di atas 100 %.

Tabel 2.13.
KINERJA PENDIDIKAN

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Angka Melek Huruf (%)	97,30	97,68	97,74	97,75
2.	Rata Lama sekolah (Thn)	6,16	6,41	6,56	6,57
3.	Angka Harapan Sekolah	12,14	12,34	12,55	12,84
4.	Angka Partisipasi Kasar				
	- SD/MI/Paket A	115,71	112,94	113,82	113,83
	- SMP/MTs/Paket B	89,04	90,89	92,27	95,64
	- SMA/SMK/MA/Paket C	72,31	72,45	72,67	72,70
5.	Angka Partisipasi Murni				
	- SD/MI/Paket A	97,12	98,45	98,74	99,72
	- SMP/MTs/Paket B	73	75,71	81,37	89,08
	- SMA/SMK/MA/Paket C	53,96	65,54	65,94	66,27
6.	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) (%)				
	- SD/MI/Paket A	100	100	100	100
	- SMP/MTs/Paket B	98.67	99.14	99.77	99.97
	- SMA/SMK/MA/Paket C	99.63	99.74	99.78	99.98

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kubu Raya Tahun 2017

Permasalahan utama kinerja di bidang pendidikan adalah rata-rara lama sekolah (release IMP, BPS,2015) di Kabupaten Kubu Raya yang hanya sampai tamatan SD. Sementara itu, hasil evaluasi terhadap angka kelulusan sekolah di Kabupaten Kubu Raya menempati posisi ke 12 terendah dari 14 Kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat. Perkembangan APK di tingkat SD, walaupun rata-rata tinggi, akan tetapi terdapat kemungkinan peserta didik dengan usia yang belum layak untuk memasuki dunia pendidikan di tingkatan SD, serta adanya perpindahan SD dari daearah lain yang mendongkrak kinerja APK Kabupaten Kubu Raya. Demikian pula halnya dengan perkembangan APM jenjang pendidikan di jenjang SMU, masih belum dianggap memuaskan. Dengan rata-rata 60,18 maka masih ada penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan ini yang putus sekolah dan memilih untuk bekerja membentu ekonomi keluarga. Sedangkan angka melek huruf, dengan prosentase rata-rata mencapai 85 % - 88 %, sudah dianggap relative cukup baik. Sisa penduduk yang tidak bisa baca-tulis, diperkirakan merupakan penduduk usia tua.

2. Kesehatan

Indeks kemakmuran selain dilihat dari aspek ekonomi juga dapat tergambarkan melalui Indek Pembangunan manusia (Human Development indeks). Di Kabupaten Kubu Raya dari sisi Indeks Pembangunan Manusia

(BPS, 2015) Kabupaten Kubu Raya yang mengalami peningkatan sebagai dampak dari motode perhitungan baru yang digunakan oleh BPS. Di tahun 2014 - 2015 ranking IPM Kabupaten Kubu Raya menempati urutan ke-3 (tiga) dari 14 Kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Kendatipun secara relative terjadi perbaikan terhadap peringkat IPM, akan tetapi pemerintah daerah masih perlu membenahi beberapa komponen pembentuk IPM, terutama yang terkait dengan indikator di bidang pendidikan. Untuk rata-rata lama hidup, komponen IPM ini mencapai 69,74 tahun lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 dan tahun 2013 dengan usia harapan hidup masing-masing sebesar 69,64 tahun dan 66,83 tahun. Peningkatan terhadap usia harapan hidup ditunjang dengan semakin membaiknya pelayanan kuratif dan terutama preventif yang diberikan SKPD Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.14.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013 - 2016

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016*
1.	Angka IPM	63,94	64,51	65,02	65,54
2.	Peringkat	4	3	3	3

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2015, * Angka Proyeksi

Tabel 2.15.
KINERJA KESEHATAN

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Angka Kematian Bayi per/1000 kelahiran Hidup (kasus)	35	48	25	49
2.	Umur Harapan Hidup	66,83	69,64	69,74	*
3.	Prevelensi Gizi Buruk	18	24	30	29
4.	Prosentase Stanting	-	21,2%	19,1%	24,6%**

*Sumber : Profile Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2016 , * Angka BPS untuk 2016 belum diterbitkan, ** Angka berdasarkan Riset Kesehatan daerah, Provinsi Kalimantan Barat*

Penanganan kasus-kasus kematian bayi, gizi buruk termasuk stanting, pada dasarnya bersifat mulitisektor yang memerlukan intervensi dari SKPD lain. Angka kasus kematian Bayi di Kabupaten Kubu Raya terus menunjukan trend yang meningkat, kendatipun masih di bawah rata-rata

angka nasional. Banyak penyebab terjadinya kasus kematian bayi. Faktor yang dianggap dominan adalah akibat perilaku kurangnya kesadaran BUMIL dalam melakukan pemeriksaan rutin (K1-K4) di unit-unit kesehatan yang disediakan, sehingga terlambat terdekteksi secara dini resiko pra dan pasca persalinan. Beberapa data yang dirujuk terkait dengan partisipasi aktif BUMIL memeriksakan kandungannya (K4) ke unit layanan kesehatan Puskesmas, tidak ada yang mencapai 100 persen, bahkan ada yang hanya mencapai 58,10 persen (puskesmas Rasau Jaya).

Dari 49 kasus kematian bayi yang terdeteksi di tahun 2016, faktor penyebab kematian disebabkan oleh Asfiksia 18 bayi (36,73%), Berat Bayi Lahir Rendah/BBLR sebanyak 10 kasus (20,41%), Tetanus Neonatorum sebanyak 7 kasus (14,29%) dan penyebab lainnya (icterus sepsis) sebanyak 14 kasus kematian (28,57%). Sementara itu, beberapa kasus disebabkan oleh penanganan persalinan yang tidak ditangani oleh tenaga medik terlatih. Kondisi gizi buruk serta angka stanting memeliki keterkaitan dengan kemiskinan serta aspek lingkungan seperti sanitasi maupun kebiasaan hidup sehat. Tindakan promotif seperti "gerakan masyarakat" sangat relevan dilaksanakan dalam upaya menurunkan angka gizi buruk dan stanting yang cenderung meningkat setiap tahun.

3. Kemiskinan

Dalam hal penanganan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut setiap tahun. Perhitungan penduduk miskin absolut yang dilakukan oleh BPS, dihitung atas dasar kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan pokok dasar (basic need) dengan pendekatan theory Maslow dan Sayogyo (menghitung kemiskinan berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan minimum bahan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari). Kebutuhan pokok dasar tersebut dikonversi dalam bentuk rupiah yang digunakan untuk memetakan garis kemiskinan absolut dan pada bebebarap pihak digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Upah Minumum Regional (UMR).

Di tingkat Kalimantan Barat angka kemiskinan Kabupaten Kubu Raya terendah ke 2 (dua) setelah Kabupaten Sanggau, dengan jumlah penduduk miskin absolut tahun 2016 tercatat sebanyak 27.830 orang. Mencermati pergerakan jumlah penduduk miskin absolut maupun prosentase kemiskinan, terlihat bahwa terjadi trend penurunan terhadap

populasi penduduk miskin Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2016, prosentase penduduk miskin Kabupaten Kubu Raya sebesar 5,04 persen yang merupakan prosentase terendah di badingkan dengan tahun 2013 sampai tahun 2015.

Tabel 2.16.
KINERJA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
INDIKATOR KEMISKINAN

No.	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	32.100	29.470	28.380	27.830
2.	Prosentse Kemiskinan (%)	6,04	5,45	5,22	5,04

Sumber : BPS, Kubu raya Dalam Angka, 2016

Terkait dengan kemiskinan, walupun secara absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya dapat ditekan, akan tetapi analisa kemiskinan yang utama adalah dengan membandingkan indeks kemiskina yang meliputi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan diantara penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya, terus membaik setiap tahun. Dalam rentang enam tahun (2012), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berhasil mengurangi kesenjangan penduduk miskin walupun masih di bawah kemampuan rata-rata Provinsi Kalimatan Barat.

Di tahun 2016 indeks P1 (kedalaman kemiskinan) Kabupaten Kubu Raya mencapai 0,75 dan indeks P2 (keparahan kemiskinan) mencapai 0,17. Sementara di rata-ratya Provinsi indeks P1 sebesar 1,19 dan P2 sebesar 0,27. Dengan asumsi semakin tinggi nilai indeks, maka semakin berdampak baik kepada upaya mengurangi derajat kesejahteraan diantara penduduk miskin, maka dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya, tidak berkolerasi positif dengan mengecilnya disparitas penduduk.

Tabel 2.17.
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) KABUPATEN KUBU RAYA DAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012-2016

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	
	Kubu Raya	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Kalimantan Barat
2011	0,55	1,47	0,08	0,39
2012	0,58	1,24	0,12	0,33
2013	0,45	1,30	0,06	0,32
2014	0,52	1,26	0,10	0,35
2015	0,77	1,29	0,16	0,32
2016	0,75	1,19	0,17	0,27

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Sementara itu, membandingkan data TPN2K terhadap indikator kesejahteraan diantara penduduk miskin (basis perbandingan BPDT 2011 vs BPDT 2015), terlihat bahwa terjadi kondisi dimana indeks kesejahteraan penduduk miskin, semakin membesar. Pada kondisi Desil 1 BPDT 2011 dari 117.510 jumlah rumah tangga yang di data, terdata sebanyak 6.865 rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2015, pada dasil yang sama, dari 132.769 jumlah rumah tanggayang didata, terdata 9.643 rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia. Kondisi perubahan terhadap kluster-kluster yang terkelompok dalam desil 2, desil 3 dan desil 4, menunjukan kencenderungan peningkatan yang sama.

Grafik 2.2.
PERBANDINGAN BPDT TPN2K PADA 2011 DAN 2015
DESIL 1 : (RUMAH TANGGA/INDIVIDU DENGAN KONDISI KESEJAHTERAAN SAMPAI DENGAN 10% TERENDAH DI INDONESIA)

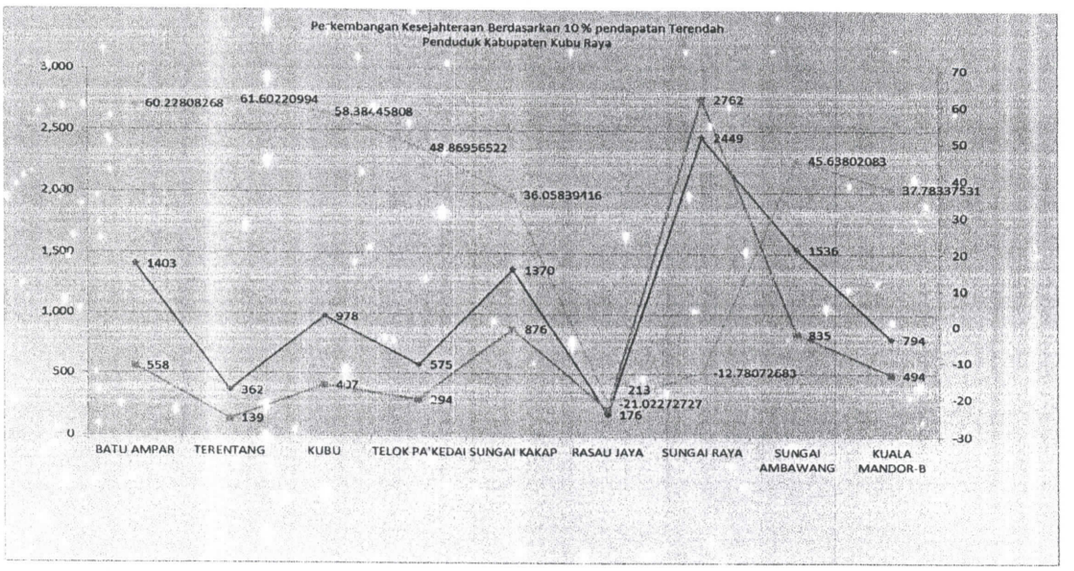

Grafik 2.3.
PERBANDINGAN BPDT TPN2K PADA 2011 DAN 2015
DESIL 14 : RUMAH TANGGA/INDIVIDU DENGAN KONDISI KESEJAHTERAAN DIATAS 30% - 40% TERENDAH DI INDONESIA)

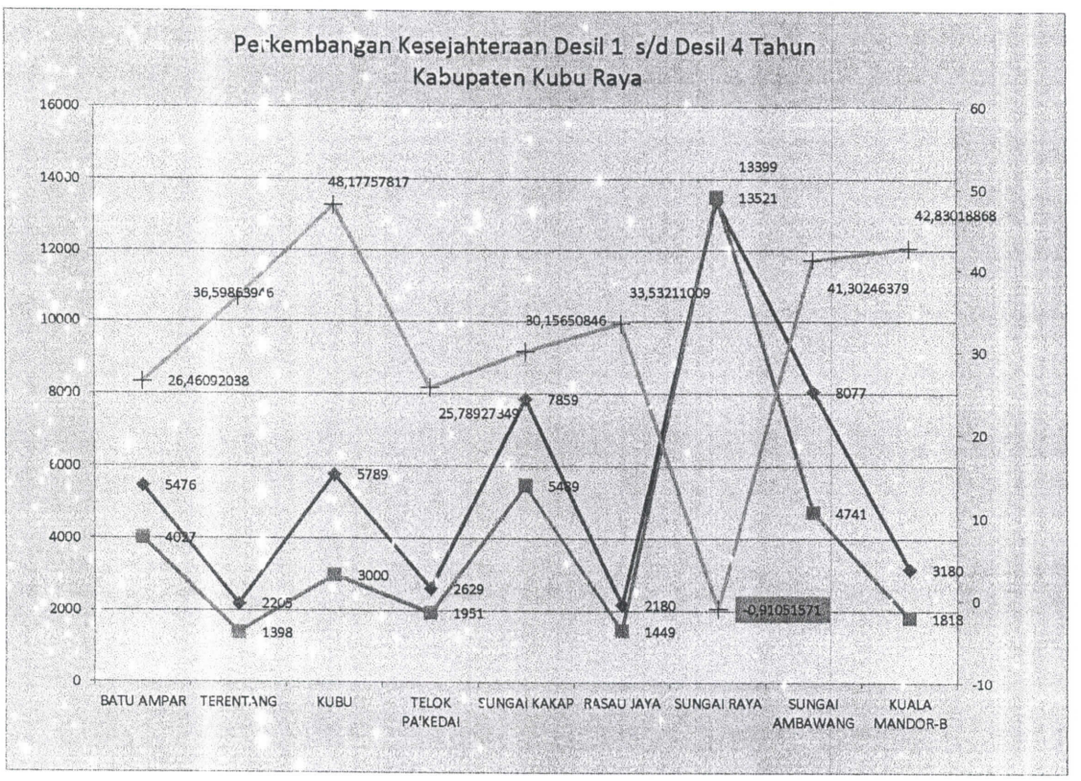

Tabel 2.18.
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KUBU RAYA PER KECAMATAN BERDASARKAN STATUS KESEJAHTERAAN

KECAMATAN	Jumlah Rumah tangga	Jumlah Rumah Tangga								TOTAL	%
	Base KDA 2011	Desil 1	%	Desil 2	%	Desil 3	%	Desil 4	%		
BATU AMPAR	7,976	558	7.00%	1,454	18.23%	1,587	19.90%	4,346	54.49%	4,027	50.49%
TERENTANG	2,74	139	5.07%	518	18.91%	492	17.96%	249	9.09%	1,398	51.02%
KUBU	8,615	407	4.72%	916	10.63%	1,091	12.66%	586	6.80%	3	34.82%
TELOK PA'KEDAI	4,278	294	6.87%	649	15.17%	679	15.87%	329	7.69%	1,951	45.61%
SUNGAI KAKAP	23,677	876	3.70%	1,73	7.31%	1,86	7.86%	1,023	4.32%	5,489	23.18%
RASAU JAYA	5,884	213	3.62%	435	7.39%	534	9.08%	267	4.54%	1,449	24.63%
SUNGAI RAYA	44,001	2,762	6.28%	4,6	10.45%	4,28	9.73%	1,879	4.27%	13,521	30.73%
SUNGAI AMBAWANG	14,839	835	5.63%	1,535	10.34%	1,588	10.70%	783	5.28%	4,741	31.95%
KUALA MANDOR-B	5,5	494	8.98%	582	10.58%	503	9.15%	239	4.35%	1,818	33.05%
	117,51	**6,578**		**12,419**		**12,614**		**9,701**		**37,394**	

KECAMATAN	Jumlah Rumah tangga	Jumlah Rumah Tangga								TOTAL	%
	Base KDA 2015	Desil 1	%	Desil 2	%	Desil 3	%	Desil 4	%		
BATU AMPAR	8,901	1,403	15.76%	1,689	18.98%	1,436	16.13%	948	10.65%	5,476	61.52%
TERENTANG	2,761	362	13.11%	592	21.44%	702	25.43%	549	19.88%	2,205	79.86%
KUBU	9,643	978	10.14%	1,417	14.69%	1,738	18.02%	1,656	17.17%	5,789	60.03%
TELOK PA'KEDAI	5,036	575	11.42%	709	14.08%	735	14.59%	610	12.11%	2,629	52.20%
SUNGAI KAKAP	28,063	1,37	4.88%	1,981	7.06%	2,327	8.29%	2,181	7.77%	7,859	28.00%
RASAU JAYA	6,472	176	2.72%	422	6.52%	720	11.12%	862	13.32%	2,18	33.68%
SUNGAI RAYA	51,232	2,449	4.78%	3,46	6.75%	3,925	7.66%	3,565	6.96%	13,399	26.15%
SUNGAI AMBAWANG	14,331	1,536	10.72%	2,11	14.72%	2,351	16.40%	2,08	14.51%	8,077	56.36%
KUALA MANDOR-B	6,33	794	12.54%	895	14.14%	790	12.48%	701	11.07%	3,18	50.24%
	132,769	**9,643**		**13,275**		**14,724**		**13,152**		**50,794**	

Sumber : TNP2K Tahun 2015

4. Kepemilikan Tanah

Sampai 2009, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya telah menerbitkan 3.304 sertifikat hak atas tanah, sebanyak 2.995 sertifikat berupa hak milik atau sekitar 88% dari keseluruhan sertifikat yang diterbitkan. Sementara sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan sebanyak 304 sertifikat dan 5 sertifikat hak pakai.

5. Kesempatan kerja

Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Kubu Raya terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk usia kerja (PUK). Rasio penduduk bekerja di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 sebesar 90,74 persen, menjadi 93,82 persen di tahun 2014. Sementara di tahun 2015 jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 258.528 orang dan meningkat di tahun 2016 sebanyak 259.830 orang. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2016 menurun dari 67,67 persen tahun 2015 menjadi 64,49 persen di tahun 2016. Hal tersebut berarti dari 100 penduduk orang angkatan kerja terdapat sekitar 40 orang yang berstatus sebagai penganggur.

Tabel 2.19.
INDIKATOR TENAGA KERJA

No.	Angkatan Kerja	Tahun			
		2013	2014	2015	2016*
1.	Penduduk Usia Kerja (orang)	368.937	376.592	383.096	390.039
2.	Penduduk Bekerja	202.320	229.686	228.528	237.586
3.	Penduduk Menganggur	20.656	15.132	14.599	13.945
4.	Angkatan Kerja	222.976	244.818	243.127	251.531
TPAK		63,97	65,01	67,67	64,49
Rasio Penduduk Bekerja		90,74	93,82	94,00	94,46

Sumber : Sakernas, 2015, * angka proyeksi, diolah untuk kepentingan analisa

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus layanan urusan wajib Konkuren

1. Pendidikan

Arah kebijakan pembangunan pendidikan sesuai dengan Rencara Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, diselenggarakan untuk menjamin tersedianya akses pendidikan yang merata dan meningkatnya kualitas, relevansi serta daya saing. Pemenuhan akses layanan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan cakupan penduduk untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, serta dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan di masyarakat. Peningkatan layanan Pendidikan berkualitas diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, keahlian yang sesuai dan dapat mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh.

Upaya perluasan akses pendidikan dimulai dari jenjang terendah pendidikan (TK/PAUD). Pada tahun 2012 jumlah TK/PAUD di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 45 unit dengan jumlah siswa sebanyak 1.122 siswa. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan bagi anak usia 0 – 6 tahun atau pendidikan anak-anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat) maupun jalur pendidikan nonformal (kelompok bermain, Taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang sederajat), dan/atau jalur pendidikan informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Prosentase siswa baru TK/PAUD idealnya mencapai 100 persen. Namun di tahun 2016, prosentase PAUD hanya sebesar 62,87 persen dari kondisi seharusnya sebesar 80 persen.

Angka putus sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kubu Raya cenderung tinggi. Angka APS idealnya adalah 0 persen. Pada tahun 2016, prosentase APS SD sebesar 0,83 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,57 persen. Angka APS SD relatif paling rendah diantara jenjang pendidikan SMP dan SMA. Tingginya APS SMP dan SMU, berkolerasi Angka Partisipasi Sekolah. Pada indikator ini, Angka Partisipasi Sekolah jenjang SMU cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD dan SMP. Faktor ekonom untuk membantu

orang tua di sektor ekonomi, sering kali menjadi penyebab siswa meninggalkan dunia pendidikan memasuki dunia kerja.

Pekembangan jumlah peserta didik di Kabupaten Kubu Raya terus mengalami peningkatan. Kondisi yang sama juga ditunjukan dengan ketersediaan guru mengajar. Rasio siswa terhadap guru untuk jenjang SD di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016 sebesar 17,51 persen, SMP sebesar 13,90 persen dan SMU sebesar 17,69 persen. Rata-rata rasio siswa terhadap guru di Kabupaten Kubu Raya sebesar 16,44 persen. Secara umum rasio siswa terhadap guru di Kabupaten Kubu Raya belum ideal. Idelanya guru di jenjang SMU harusnya lebih banyak daripada guru SMP karena bidang studi di SMU lebih banyak daripada jenjang SMP, sedangkan guru jenjang SD adalah guru kelas sehingga seharusnya paling sedikit. Berdasarkan tabel...terlihat bahwa komposisi guru mengajar pada tian jenjang pendidikan merfleksikan piramida terbalik. Bila digunakan standar SD sebesar 16 persen, SMP sebesar 15 persen, dan SMU sebesar 12 persen, maka untuk jenjang SD sebesar 18 atau 112,5% belum mencapai standar atau kelebihan guru, jenjang SMP sebesar 14 atau 93,33% belum mencapai standar atau kekurangan guru, dan jenjang SM sebesar 18 atau 150% belum mencapai standar atau kelebihan guru.

Dari aspek kualitas tenaga pengajar mempengaruhi kualitas dan kuantitas siswa. Prosentase Guru Layak (S-1/DIV) tertinggi terdapat di jenjang SMU sebesar 90,72 persen dan yang terkecil pada jenjang SD sebesar 74,93 persen. Guru yang belum layak mengajar harus disetarakan. Kebijakan untuk menigkatkan kualitas guru dilakukan dengan mendorong guru agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga kelayakan mengajar guru akan meningkat. Secara umum prosentase guru layak di Kabupaten Kubu Raya GL hanya tercapai 78,56%, sehingga masih diperlukan penyetaraan sebesar 21,44 persenguru dikdasmen yang layak untuk mengajar. Terkait dengan upaya meningkatkan kualitas guru, dilakukan sertifikasi guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Prosentase guru yang sudah bersertifikasi terdapat di jenjang SD sebesar 42,75 persen dan terkecil terdapat pada jenjang SMU sebesar 23,11 persen. Di tingkat SD masih terdapat 57,25 persen guru yang perlu disertifikas. Sementara untuk SMP terdapat 73,16 persen guru yang perlu sertifikasi dan SMU sebesar 76,89 persen..

Di Kabupaten Kubu Raya jumlah sekolah, rombelangan belajar dan ruang kelas terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah SMU

sebanyak 112 sekolah, SMP 226 sekolah dan SD 534 sekolah. Sementara jumlah rombonganbelajar SD sebanyak 4.598 rombel, SMP 1.332 rombel dan SMU sebanyak 739 rombel. Ketersediaan ruang kelas, di tahun yang sama jenjang SD sebanyak 3.240 lokal, SMU 1.330 lokal dan jenjang SMU 656 ruang kelas.

Tabel 2.24.
DATA PRASARANA DIKDASMEN KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016/2017

No.	Variabel	SD	SMP	SMU
1	Baik	684	403	318
2	Rusak Ringan	1,615	735	247
3	Rusak Sedang	354	73	53
4	Rusak Berat	329	75	27
5	Rusak Total	258	44	11
	Jumlah	3,240	1,330	656
1	% Baik	21.11	30.30	48.48
2	% Rusak Ringan	49.85	55.26	37.65
3	% Rusak Sedang	10.93	5.49	8.08
3	% Rusak Berat	10.15	5.64	4.12
5	% Rusak Total	7.96	3.31	1.68

Sumber: Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kubu Raya, 2016

Tabel 2.25.
URUSAN KONKUREN BIDANG PENDIDIKAN

No	Indikator	2013	2014	2015	2016
1	Angka Melek Huruf (AMH)**	85.02	85.32	85.24	88.32
2	IPM	63.94	64.52	65.02	65,54
	- Angka Harapan Hidup (AHH)	69.64	69.64	69.74	69,77
	- Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	12.14	12.34	12.55	12,84
	- Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	6.16	6.41	6.56	6,57
	- Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	7,935	7,973	7,994	9.145
3	PAUD				
4	Angka Putus Sekolah (APS)				
	- APS SD/MI	0.41	0.42	0.57	0,83
	- APS SMP/MTs	0.51	0.59	0.67	1,69
	- APS SMA/MA/SMK	0.12	0.18	0.24	1,03
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
	- APS SD/MI	88.89	88.81	89.59	99.00
	- APS SMP/MTs	68.15	68.06	67.96	81.86
	- APS SMA/MA/SMK	49.64	54.52	53.11	62.84
6	Angka Partisipasi Murni (APM)				

	- APM SD/MI	88.81	89.59	78.26	98.83
	- APM SMP/MTs	68	67.99	53.91	81.44
	- APM SMA/MA/SMK	46.73	37.55	47.33	60.18
7	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	- APK SD/MI	88.89	88.81	89.6	83.91
	- APK SMP/MTs	68.15	66.32	67.99	78.25
	- APK SMA/MA/SMK	43.24	46.73	37.55	47.89
8	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)				
	- APT SD/MI	100	100	100	100
	- APT SMP/MTs	98.67	99.14	99.77	99.97
	- APT SMA/MA/SMK	99.63	99.74	99.78	99.98
9	Jumlah Sekolah dan Ruang/ Lokal Belajar (Negeri/Swasta)				
	- Jumlah Sekolah SD/MI	353	358	367	534
	- Jumlah Sekolah SMP/MTs	112	118	131	226
	- Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA	84	93	101	112
10	Jumlah Murid (Negeri/Swasta)				
	- Jumlah Murid SD/MI	68,282	68,284	70,081	76,765
	- Jumlah Murid SMP/MTs	22,956	25,568	28,283	31,272
	- Jumlah Murid SMA/SMK/MA	15,275	17,116	17,006	16,795
11	Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri/Swasta)				
	- Jumlah Guru SD/MI	3,835	3,813	3,869	4,390
	- Jumlah Guru SMP/MTs	1,017	1,034	1,048	2,455
	- Jumlah Guru SMA/SMK/MA	457	496	505	1,289
12	Rasio Murid Terhadap Guru				
	- Rasio Murid Terhadap Guru SD/MI	56.16	55.84	55.21	57.19
	- Rasio Murid Terhadap Guru SMP/MTs	44.30	40.44	37.05	78.50
	- Rasio Murid Terhadap Guru SMA/SMK/MA	27.30	29.62	31.54	40.13
13	Angka Melanjutkan (AM)				
	- AM SMP	100,08	101,12	101,25	102,58
	- AM SMA	67,96	68,15	68,24	68,26
14	Fasilitas Pendidikan				
	- Sekolah SD dalam kondisi baik			680	684
	- Sekolah SMP dalam kondisi baik			427	403
	- Sekolah SMA/SMK dalam kondisi baik			305	318
15	Rasio Ketersediaan Sekolah				
	- Rasio ketersediaan SD		508	534	533
	- Rasio Ketersediaan SMP		194	226	227
	- Rasio Ketrsediaan SMA		70	87	87
16	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	66,37	66,52	66,73	68,24
17	Persentase Guru SD yang bersertifikai	28,36	30,28	32,44	33,49
18	Sertifikasi Sekolah SD				

	Sekolah SD Bersertikasi A	-	-	-	8
	Sekolah SD bersertifikasi B	-	-	-	41
	Sekolah SD bersertifikasi C	-	-	-	36

Sumber: Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kubu Raya, 2016

Mengurai permasalahan dunia pendidikan di Kabupaten Kubu Raya bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilakukan. Dari perhitungan IPM, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kubu Raya masih belum menunjukan kinerja yang baik, dengan rata-rata lama sekolah tertingggi di tahun 2016 hanya sebesar 6,57 tahun. Artinya peluang peserta didik tingkat dasar untuk menyelesaikan pendidikan 9 tahun cenderung rendah atau hanya sempat mengenyam pelajaran di SMP semester pertama.

Kinerja bidang pendidikan berdasarkan Rencana Strategi (renstra) Kemendikbud terdiri dari lima misi pendidikan dan kebudayaan. Misi Pendidikan terdiri atas M1 adalah mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat, M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu, M4 adalah mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa, dan M5 adalah mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. Terkait dengan Misi 2; k mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dan Misi 3; mewujudkan pembelajaran yang bermutu, secara umum kinerja dunia pendidikan Kabupaten Kubu Raya untuk Misi 2 menunjukan kinerja Pratama (80.00-84.99) dan Misi 3 menunjukan kinerja yang kurang (kurang dari 80.00).

Tabel 2.26.
PENCAPAIAN KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KABUPATEN KUBU RAYA 2016/2017

Misi	SD	SMP	SM	Dikdasmen	Jenis
AKSES PENDIDIKAN	82.80	86.91	78.30	82.67	PRATAMA
a. Merata	64.26	80.97	68.85	71.36	KURANG
b. Meluas	86.51	84.98	66.30	79.26	KURANG
c. Berkeadilan	97.64	94.77	99.75	97.39	PARIPURNA
MUTU PENDIDIKAN	69.02	70.96	70.91	68.96	KURANG
a. Siswa	92.80	98.75	99.31	92.94	UTAMA
b. Guru	69.68	66.09	60.55	65.44	KURANG
c. Prasarana	44.58	48.04	52.86	48.49	KURANG
Kinerja	75.91	78.93	74.60	75.81	KURANG

Sumber: Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kubu Raya, 2016

Kinerja misi 2 dengan nilai rata-rata 82,67 persen termasuk kategori pratama, dirinci atas indikator meluas sebesar 79,26 persen termasuk kategori kurang, indikator merata sebesar 71,36 persen termasuk kategori kurang dan indikator berkeadilan sebesar 97,39 persen termasuk kategori paripurna. Sedangkan kinerja misi 3 dengan rata-rata nilai 68,96 persen termasuk kategori kurang, yang dirinci menjadi indikator mutu siswa sebesar 92,94 persen termasuk kategori utama, indikator mutu guru sebesar 65,44 persen termasuk kategori kurang dan indikator mutu prasarana sebesar 48,49 persen termasuk kategori kurang. Selanjutnya, bila dilihat menurut jenjang pendidikan maka jenjang SD dengan nilai 75,91 persen termasuk kategori kurang, jenjang SMP dengan nilai 78,93 persen termasuk kategori kurang, dan jenjang SMA dengan nilai 74,60 persen termasuk kategori kurang, dengan rata-rata angka dikdasmen sebesar 75,81 persen juga termasuk kategori kurang. Secara umum kinerja Kabupaten Kubu Raya sebesar 75,81 persen dan termasuk kategori kurang.

Tabel 2.27.
NILAI INDIKATOR PENDIDIKAN

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Dikdasmen
Akses yang Meluas					
1	Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK)	70.47	99.85	88.77	86.36
3	Persentase Perpustakaan (%Perpus)	72.81	62.13	50.40	61.78
4	Persentase Ruang UKS (%RUKS)	27.37	64.68	65.60	52.55
5	Persentase Tempat Olahraga (%TOR)	99.81	96.17	89.60	95.19
6	Persentase Laboratorium (%Lab)	15.08	62.98	18.72	32.26
Akses yang Merata					
7	Angka Partisipasi Murni (APM)	99.73	89.09	66.29	85.04
8	Angka Partisipasi Kasar (APK)	100.00	95.65	72.71	89.45
9	Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)	100.00	100.00	88.23	96.08
10	Angka Masukan Murni (AMM SD)/Angka Melanjutkan (AM SMP dan SM)	97.02	100.00	74.67	90.56
11	Satuan Biaya (SB)	35.83	40.15	29.60	35.19

Akses yang Berkeadilan					
12	Perbedaan Gender APK (PG APK)	96.25	92.17	99.69	96.04
13	Indeks Paritas Gender APK (IPG APK)	96.67	92.14	99.57	96.13
14	% Siswa Swasta (% S-Swt)	100.00	100.00	100.00	100.00
Mutu dari segi Siswa					
1	Persentase Siswa Baru TK (%SB TK)	62.87	-	-	62.87
2	Angka Mengulang (AU)	97.57	99.14	99.30	98.67
3	Angka Bertahan Tk 5 (AB5 SD)/Angka Bertahan (AB SMP dan SM)	100.00	98.37	98.93	99.10
4	Angka Lulusan (AL)	100.00	98.43	99.81	99.41
5	Angka Putus Sekolah (APS)	99.17	98.31	98.97	98.82
6	Rata2 Lama Belajar (RLB)	97.17	99.51	99.55	98.74
Mutu dari segi Guru					
7	Persentase Guru Layak (% GL)	74.93	78.77	90.72	81.47
8	Persentase Guru Sertifikasi (%GS)	42.75	26.84	23.11	30.90
9	Rasio Siswa per Guru (R-S/G)	91.37	92.65	67.83	83.95
Mutu dari segi Prasarana					
10	Persentase Sekolah Akreditasi A & B (%SA-AB)	14.34	5.96	19.20	13.17
11	Persentase Ruang Kelas baik (%RKb)	21.11	30.30	48.48	33.30
12	Persentase Perpustakaan baik (%Perpusb)	41.69	52.74	61.90	52.11
13	Persentase Ruang UKS baik (%RUKSb)	74.15	80.26	73.17	75.86
14	Persentase Laboratorium baik (%Labb)	71.60	70.95	61.54	68.03

Sumber: Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kubu Raya, 2016

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan menjadi hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang (UU). Sehingga, dapat dikatakan bahwa pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat Un- dang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H ayat (1) dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Arah peningkatan terkait dengan pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, dan

meningkatkan perlindungan finansial terhadap penduduk rentan. Terkait dengan hal tersebut, perkembangan capaian pembangunan bidang kesehatan Dalam mencapai tujuan tersebut, tiga tantangan utama pada tahun 2018 adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan kualitas gizi yang relevan dengan ibu dan anak, terlihat bahwa prosentase kasus kematian ibu serta prevelensi kematian bayi dan balita masih relatif tinggi dan masih perlu penanganan dan kerja keras untuk menekan.

Tabel 2.28.
URUSAN KONKUREN BIDANG KESEHATAN

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016
DERAJAT KESEHATAN						
1.	Angka Usia Harapan Hidup	Kasus	95.46	95.46	95.46	95.46
2.	Angka Kematian Balita	Kasus	35	48	25	60
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	39	52	31	7
4.	Angka Kematian Bayi	Tahun	5	12	12	15
5.	Jumlah Penderita Gizi Buruk	Kasus	18	24	30	29
6.	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	66.83	69.64	69.74	96,77
PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA						
1.	Pelayanan BUMIL KI	%	95.50	97,20	96,00	96,10
2.	Pelayanan BUMIK K4	%	90,07	86,67	92,11	91,98
3.	Pemeriksaan BUMIL	%	83,12	78,85	85,66	90,02
4.	Imunisasi (UCI)	%	37,07	62,93	66,95	61,02
5.	Persalinan Nakes	%	41.59	50	66.95	61.02
6.	Rasio pelayanan Komplikasi Kebidanan	%	66,79	57,91	47,19	39,70
7.	Pelayanan Kontrasepsi	%	49,71	38,04	48,92	59,08
KETERSEDIAAN LAYANAN KESEHATAN						
1.	Jumlah Tenaga Kesehatan / Medis	orang	377	386	421	429
2.	Jumlah Sarana Kesehatan	unit	377	386	421	429
2.	Jamkesda	Jiwa	37.500	37.500	4.152	4.865
3.	Rasio Posyandu per satuan balita	%	37,500	37.500	4,152	4,865

Sumber: BPS KDA 2016, Proile Kesehatan Kesehatan Kab.Kubu Raya, 2016

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aksesibilitas pelayanan infrastruktur masih merupakan masalah utama di Kabupaten Kubu Raya .peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang direncanakan dengan pendekatan konsep pengembangan wilayah dan penataan ruang menjadi prioritas karena langsung berpengaruh terhadap percepatan dan kesinambungan pembangunan. Di bidang pekerjaan umum dan Penatan Ruang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya, ditujukan pada upaya peningkatan interkonektivitas antar wilayah pembangunan melalui peningkatan kualitas sarana transportasi. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian banijir, penyediaan dan pengelolaan air baku, pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya, pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu, berbagai upaya dilakuan untuk meningkatkan fasilitas dan utilitas publik perkotaan dan perdesaan serta penanganan kawasan kumuh termasuk pada upaya meningkatkan keterjangkauan akes masyarakat terhadap perumahan yang layak huni.

Panjang jalan terbangun di Kabaten Kubu Raya mencapai 646.559 Km. Dari panjang ruas jalan tersebut, prosentase jalan dalam kondisi sudah diaspel sepanjang 34,02 persen dan sepanjang 65,98 persen dari pajang jalan terbangun yang belum diakukan pengaspalan.

Tabel 2.29.
PANJANG JALAN MENURUT KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN YANG BERWENANG MENGELOLANYA DI KABUPATEN KUBU RAYA (KM) TAHUN 2016

No.	*District*	Negara *State*	Kabupaten *Province*	Kecamatan *District*	Jumlah *Total*
1	Batu Ampar	-	-	60 131	60 131
2	Terentang	-	-	23 773	23 773
3	Kubu	-	-	83 718	83 718
4	Teluk Pakedai	-	-	22 098	22 098
5	Sungai Kakap	-	13 193	70 373	83 566
6	Rasau Jaya	-	6 933	46 270	53 203
7	Sungai Raya	14 297	20 960	150 704	185 961
8	Sungai Ambawang	61 819	-	47 353	109 172
9	Kuala Mandor B	-	-	24 937	24 937
	Jumlah/ *Total*	**76 116**	**41 086**	**529 357**	**646 559**

Sumber : Kubu Raya Dalam Angka – BPS 2017

Tabel 2.30.
PANJANG JALAN KABUPATEN MENURUT JENIS PERMUKAAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013 – 2016

No.	Jenis Permukaan	*2013*	2014	2015	2016
1.	Aspal / *Asphalted*	181 249	178 087	221 271	180 108
2.	Kerikil / *Gravel*	7 400	4 107	2 107	2 945
3.	Tanah / *Soil*	162 665	158 032	87 925	154 324
4.	Lainnya / *Others*	178 289	189 131	218 053	191 980
	Jumlah / *Totals*	**529 603**	**529 537**	**529 357**	**529 357**

Sumber : Kubu Raya Dalam Angka – BPS 2017

Pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya ditujukan untuk meningkatkan aksesibelitas transportasi dilingkungan perumahan. Perkembangan pembangunan jalan lingkungan sebagai berikut :

Tabel 2.31.
BANYAKNYA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2011 – 2016

NO	*Year*	Panjang Jalan	*Number of Location*	
		Distance of Street	Desa *Village*	Kecamatan *District*
1	2016	58,18	53	9
2	2015	115,73	92	9
3	2014	209,31	118	9
4	2013	153,71	105	9
5	2012	126,37	95	9
6	2011	141,5	80	9

Sumber : Kubu Raya Dalam Angka – BPS 2017

Terkait dengan penataan ruang, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah memiliki Perda Rencana Umum tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW). Sedangkan rencana detail terkiat pengatuiran ruang dan zonasi (RDTR saat ini mash dalam tahapan penyusunan oeh SKPD PUPR. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pencapaian kinerja mengacu pada indikator kunci dalam RPJMD sampai tahun 2016, sebagian besar sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Beberapa indikator yang pelru ditingkatkan pencapaiannya adalah pada aspek pemenuhan rasio elektrifikasi yang masih rendah. Untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan listrik, langkah kebijakan yang diambil oleh Kabupaten adalah melalui energy alternative (PLTS).

Capaian inikator urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang, sebagai berikut :

Tabel 2.32.
URUSAN KONKUREN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Indikator Kinerja	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD	
	Tahun Ke ...		Tahun Ke..		Tahun Ke ....*	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Persentase kondisi jalan dalam keadaan baik/mantap :						
a. Jalan Kabupaten (%)	44.00	52.00	57.00	84.00	129.55	161.54
b. Jalan Lingkungan (%)	32.00	34.00	11.03	53.63	34.47	157.74
Panjang jalan terbangun :						
a. Jalan Kabupaten 12 Koridor dalam RTRW Kabupaten Kubu Raya (Km)	*306.11*	*351.77*	330.91	416.11	108.10	118.29
b. Jalan Lingkungan (Km)	390	460	115.73	925.12	29.67	201.11
Panjang jembatan terbangun/Meter (pada jalan kabupaten :	612	702	612.40	646.90	100.07	92.15
Cakupan pelayanan Listrik (%)	93.88	95.39	35	55.15	37.28	57.82

Sumber : Bahan Evaluasi RPJMD, diolah

4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan aspek Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan oleh 3

(tiga) SKPD, yaitu Satuan Polisi dan Pamong Praja dengan fokus penegakan ketertiban dan pengawalan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan pembinaan Partai politik serta organisasi kemasyarakatan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pelaksanaan penugaan tersebut, pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan kordinasi dengan unsur vertikal (Polri, TNI, unsur angkatan lainnya) termasuk kelembagaan di masyarakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat).

Tabel 2.33.
BANYAKNYA ORGANISASI MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN PARTAI POLITIK DIRINCI MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016

No.	*Kecamatan*	Organisasi Masyarakat	Lembaga Swadaya Masyarakat	Partai Politik
1	Batu Ampar	7	2	-
2	Terentang	4	1	-
3	Kubu	18	2	-
4	Teluk Pakedai	5	3	-
5	Sungai Kakap	17	16	2
6	Rasau Jaya	11	4	2
7	Sungai Raya	78	43	37
8	Sungai Ambawang	27	15	1
9	Kuala Mandor B	9	1	-
	2016	**176**	**87**	**42**
	2015	179	89	42
	2014	179	89	42
	2013	179	89	42

Sumber : Bahan Evaluasi RPJMD, diolah

Perkembangan organisasi kemasyarakat di Kabupaten Kubu Raya cukup besar. Jumlah Organisasi yang bergerak langsung di masyarakat tahun 2016 terdata sebanyak 176 Lembaga Swadaya masyarakat (LSM/CSO) dan 87 LSM/CSO. Sedangkan jumlah partai politik sebanyak 42 Partai Politik. Organisasi masyarakat maupun LSM tersebar di seluruh kecamatan, dengan aktivitas sebagai penggiat di sektor pembangunan ekonomi, regabilitasi sumber daya alam, penguatan kapasitas ibu dan anak serta lainnya.

Terkait dengan aspek ketertian umum, potensi konflik sosial di Kabupaten Kubu Raya, sebagian besar cenderung bermotif pada akses terhadap sumber daya ekonomi. Perkembagan perkebunan skala besar

membawa resiko terjadinya penguasan lahan, sehingga sering kali menjadi sumber pemicu konflik. Berbagai mediasi dengan melibatkan pihak terkait, sejauh ini cukup efektif meredam konflik lahan yang terjadi mapun konflik lainnya terkait dengan peyelenggaraan negara. Dalam hal penanganan ketertiban umum dan penegakkan Perda, peran SATPOL PP, sebagai garda Kabupaten cukup fektif melaksanaka tugas dan fungsi yang diemban, baik dalam hal penertiban keramaian umum (pasar dan sejensnya), maupundalam hal lain seperti penertiban spanduk, perizinan dan lain sebagainya.

Tabel 2.34.
JUMLAH PELANGGARAN PERDA DI KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Lokasi Pelanggaran
1.	Bangunan Liar	100	Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang
2.	Pedagang Kaki Lima	42	Kecamatan Sungai Raya
3	Gelandangan dan Pengemis	7	Kecamatan Sungai Raya
4	Reklame/Spanduk/Baliho/Pamplet Liar	60	Kecamatan Sungai Raya
5	Kost/Hotel/Penginapan/Losmen	48	Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai
6	Layang-layang	80	Ambawang, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap
7	Anak Sekolah	20	Kecamatan Sungai Raya
8.	Jumlah Kunjungan Anak Sekolah di Warnet	47	Kecamatan Sungai Raya
9	Unjuk Rasa	4	Kecamatan Sungai Raya
	2016	**408**	**Kabupaten Kubu Raya**

Sumber : Kubu Raya Dalam Angka – BPS 2017

Aspek kebencanaan di kabupaten Kubu raya yang masih menjadi kendala adalah bencana kabut asap dan kebakaran lahan. Saat ini Penanganan kebencanaan di Kabupaten Kubu raya, dilakukan secara terkoordinasi dengan SAR serta pelibatan Linmas serta aparat pemerintah lainnya.

Tabel 2.35.
BANYAKNYA BENCANA DAERAH YANG TERJADI DI KABUPATEN KUBU RAYA DIRINCI MENURUT KECAMATAN 2014-2017

No.	Kecamatan *District*	2014	2015	2016	2017
1.	Batu Ampar	2	...	-	-
2	Terentang	1	...	-	-
3	Kubu	-	...	-	1
4	Teluk Pakedai	-	...	-	-
5	Sungai Kakap	3	...	2	1
6	Rasau Jaya	2	...	-	1
7	Sungai Raya	5	...	6	8
8	Sungai Ambawang	3	...	3	3
9	Kuala Mandor B	3	...	3	-
	JUMLAH	**19**	**...**	**14**	**14**

Sumber : Kubu Raya Dalam Angka – BPS 2017

5. Sosial

Pembangunan pada pelayanan sosial di Kabupaten Kubu Raya cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari permasalahan kesejahteraan sosial yang terus diupayakan penanganannya oleh Pemerintah Kabupatenb. Namun demikian, hasilnya belum mampu menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya adalah jumlah penduduk miskin cenderung meningkat antara lain gelandangan, pengemis, anak jalanan dan anak terlantar. Indikator jaminan perlindungan sosial untuk jumlah penderita cacat masih belum mencapai target, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dan SDM dalam memfasilitasi dan mengurusi penderita cacat, sehingga Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum mampu untuk menambah jumlah penderita cacat untuk direhab.

Tabel 2.36.
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG SOSIAL

Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun Ke ...		Capaian Target RPJMD Tahun Ke..	
	2015	2016	2015	2016
Jaminan perlindungan sosial :				
a. Penderita Cacat (Orang)	1,000	1,100	790	818
b. Lansia (Orang)	2,100	2,150	2,203	2,215
c. Anak Terlantar (Orang)	350	450	5,170	1,538

Sumber : Bahan Evaluasi RPJMD, diolah

2.3.1. Fokus layanan urusan wajib Tidak Konkuren

1. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya diproyeksikan di tahun 2016 sebesar 67,67 persen. Hal tersebut berarti dari 100 angkatan kerja, terdapat sekitar 40 orang yang tdaik terlibat secara aktif dalam Angkatan Kerja (menunggu pekerjaan). Sementara tingkat pengangguran di tahun 2016 diperkirakan sebesar 6,11 persen.

Tabel 2.37.
TINGKAT PARTISIPASI TENAGA KERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013-2015

Indikator Ketenagakerjaan	2014	2015	2016*
Tingkat Partisipasi Angkatn Kerja (TPAK)	65,01	67,60	67,67
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,08	6,18	6,11

Sumber : *BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2015,* * proyeksi diolah untuk kebutuhan analisa

Berdasarkan proyeksi ketenagakerjaan yang dilakukan di tahun 2016, PUK Kabupaten Kubu Raya diperkirakan mengalami pertambahan dari sebanyak 387.096 orang di tahun 2015 menjadi 390.039 orang di tahun 2016. Perkiraan pertambahan PUK di tahun 2016, berdasarkan hasil proyeksi disokong dari kemungkinan bertambahnya PUK semua kelompok usia, terkecuali di kelomok usia 25-29 tahun. Peningkatan penduduk usia kerja di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil proyeksi diikuti dengan peningkatan penduduk yang bekerja. Sedangkan proyeksi angkatan kerja, tingkat pertisipasi angkatan kerja, pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran berdasarkan hasil proyeksi akan mengalami kencenderungan yang menurun. Secara umum angka proyeksi terhadap ketanagakerjaan di

Kabupaten Kubu Raya di tahun 2016, menunjukan perkiraan yang menggembirakan.

Tabel 2.38.
JUMLAH PUK, AK, TPAK, PYB, PT DAN TPT MENURUT GOLONGAN UMUR KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016
(ORANG)

Golongan Umur	PUK	AK	TPAK	PYB	PT	TPT
15-19	54.354	6.977	12,84	3.561	3.416	48,97
20-24	50.310	33.182	65,96	27.402	5.780	17,42
25-29	44.624	38.685	81,04	36.498	2.187	5,65
30-34	42.256	36.144	81,00	34.919	1.224	3,39
35-39	42.256	32.119	76,01	31.557	562	1,75
40-44	37.606	29.467	78,36	29.277	189	0,64
45-49	31.358	25.400	80,49	25.214	187	0,73
50-54	24.700	20.711	83,85	20.557	154	0,74
55-59	19.792	14.151	71,50	14.027	124	0,87
60+	37.101	14.695	39,61	14.573	122	0,83
Jumlah	390.039	251.531	64,49	237.586	13.945	5,54

Sumber : Angka proyeksi, data diolah

Dari sisi kualitas tenaga kerja, hasil proyeksi tahun 2016 menunjukan kondisi ketenaga kerjaan di Kabupaten Kubu Raya PUK Kabupaten Kubu Raya diperkirakan akan dibanjiri oleh PUK denga jenjang pendidikan SMTA Kejuruan, Diploma dan S-1. PUK yang paling besar di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil proyeksi akan berada pada PUK dengan pendidikan univrsitas dengan perkiraan perubahan sebesar 6,86% dari perkiraan jumlah PUK sebanyak 390.039. Masih berdasarkan hasil proyeksi ketanaga kerjaan tahun 2016, perkiraan penambahan angkatan kerja terbesar akan didominasi AK dengan jenjang pendidikan Diploma dan Universitas. Dari data hasil proyeksi tahun 2016, daya serap sektor basis Kabupaten Kubu Raya terhadap penduduk yang bekerja, diperkirakan akan mengalami pengurangan daya serap tenaga kerja. Berkurangnya penduduk bekerja di Kabupaten Kubu Raya, diperkirakan akan berada di sektor angkutan, listrik, gas dan air, bangunan dan pertambangan. Sedangkan sektor basis yang menjadi andalan dalam menyerap tenaga kerjadi Kabupaten Kubu Raya, dpada tahun 2016 diiperkirakan hanya akan mengalami penyusutan rata-rata 1% - 2% penduduk bekerja.

Tabel. 2.39.
JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016
(ORANG)

Lapangan Usana	PYB
1. Pertanian	111.660
2. Pertambangan	1.566
3. Industri Pengolahan	17.094
4. Listrik, Gas dan Air	492
5. Bangunan	16.250
6. Perdagangan	46.128
7. Angkutan	7.142
8.. Keuangan	2.725
9. Jasa Kemasyarakatan	34.528
Jumlah	237.586

Sumber : Sakerna, Angka proyeksi, data diolah

2. Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Salah satu urusan yang menjadi kewenagan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kubu Raya, adalah aspek penanganan Keluarga Berencana. Penanganan KB memiliki korelasi dengan SKPD Kesehatan. Permasalahan utama dalam upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Kubu Raya, adalah terbatasnya alat kontrasepsi yang selama ini masih mengandalkan droping dari Pemerintah Provinsi. Sehingga pencapaian target terhadap peserta KB baru menjadi relative terkendala.

Tabel. 2.40.
JUMLAH PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah PUS	Peserta KB Baru		Peserta KB Aktif	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	Batu Ampar	Batu Ampar	2.433	144	5,90	2.915	82,00
		Padang Tikar	2.659	1.608	60,47	2.081	78,26
		Sungai Kerawang	758	24	3,17	549	72,43
2	Terentang	Terentang	637	37	5,81	481	75,51
		Radak	1.155	85	7,36	1.129	97,75
3	Kubu	Kubu	3.198	590	18,45	2.070	64,73
		Air Putih	3.306	147	4,45	5.688	172,05
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	3.435	170	4,95	1.150	33,48
5	Sungai Kakap	Sei Kakap	10.494	1.003	9,56	7.343	69,97
		Punggur	3.552	667	18,78	1.150	42,37
		Sungai Rengas	4.909	1.528	31,13	2.516	51,25
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	4.116	456	11,08	3.192	77,55
7	Sungai Raya	Sungai Raya Dalam	9.258	1.413	15,26	3.876	41,87
		Sungai Durian	25.986	2.043	10,06	20.312	78,17
		Sungai Asam	3.190	1.108	34,73	1.122	35,17
		Korpri	4.317	2.867	66,41	3.192	73,94
8	Sungai Ambawang	Sungai Ambawang	4.971	789	15,87	3.076	61,88
		Parit Timur	3.492	355	10,17	2.484	71,13
		Lingga	3.406	495	14,53	2.271	66,68
9	Kuala Mandor B	Kuala mandor B	4.227	632	14,95	1.396	33,03
Jumlah (KAB/KOTA)			99.499	16.161	16,24	68.348	68,69

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kubu Raya, dilakukan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, sebagai upaya advokasi secara langsung terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian kinerja Pemberdayaan Perempuann, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, sebagai berikut :

Tabel 2.41.
ASPEK PELAYANAN UMUM
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	532	545	548	674
2.	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK/ Tk. Partisipasi Angkatan Kerja)	63,97	65,01	67,67	64,49
3.	Presentase Kaluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	37.259	37.259	37.553	37.553

Sumber : BPPKB Kabupaten Kubu Raya, 2016

3. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Penanganan sampah di Kabupaten Kubu Raya, masih menjadi permasalahan yang sukup mendasar. Keterbatasan permasalahan penanganan sampah diakibatkan tidak sebandingnya volume sampah dengan sumber daya penanganan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Kubu Raya, menempatkan TPS pada titik-titik strategis serta melakukan pengaturan terhadap waktu pembuangan sampah di masyarakat, untuk menghindari penumpukan sampah dan kesesuaian dengan jadual pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan. Sampai saat ini Kabupaten Kubu Raya belum memiliki TPA yang representatif.

Selain upaya penganganan langsung, upaya preventif pengurangan sampah yang dilakukan Bidang Kebersihan dan Pertamana Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan masih sebatas sosialisasi 3R (reuse, reduse dan recycle) ke masyarakat. pelaksanaan SOSIALISASI 3-R terpusat di Kecematan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Rasau Jaya. Secara umum capaian kinerja terhadap penduduk yang terlayani dalam pengurangan sampah baru mencapai 18,1 persen.

Selain persampahan dan kebersihan, cakupan Tupoksi Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, juga menyangkut aspek pengendalian lingkungan Hidup. Upaya pengendalian lingkungan hidup terhadap dampak pencemaran limbah, dilakukan dengan melakukan pengambilan sample pada titik tertentu dalam jangka waktu terteu pula. Selain itu, kebijakan penerapan AMDAL dan ANDAL juga dilakukan

terhadap aktivitas perusahaan besar, yang diperkiraan memberikan Nampak besar terhadap perubahan lingkungan sekitar. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sudah memiliki KOMISI AMDAL.

Kinerja pembangunan pelayanan umum dalam bidang lingkungan hidup di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.42.
ASPEK PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUBU RAYA

Indikator Kinerja	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD	
	Tahun Ke ...		Tahun Ke		Tahun Ke	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Cakupan pelayanan persampahan (%)	22	29	13.94	18.10	63.36	62.41
Rasio RTH (%)	6	7	7.1	7.45	118.33	106.43
Pembangunan rumah layak huni (Unit)	15,000	19,000	13,989	17,009	93.26	89.52

Sumber : Evaluasi Bappeda, 2017, diolah.

4. Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil

Pembangunan bidang kependudukan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan terkait dengan peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta pengembangan informasi dan administrasi kependudukan; dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan Kabupaten Kubu Raya.

Sebagai bentuk pertisipasi mensukseskan program Nasional E-KTP, sudah dilakukan perekaman data kependudukan di kecamatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catattan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Capaian kinerja terkait administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut.

Tabel 2.43.
PELAYANAN UMUM BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	61,47	35,17	42,50	53,08
2.	Pasangan berakte nikah	743	977	1.454	2.010
3.	Kepemilikan KTP	363.404	209.831	253.920	318.257
4.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	227.332	241.824	258.077	273.399
5.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	-	-	ada	ada
6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	-	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Kubu Raya, 2016

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.44.
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Posyandu aktif	376	406	413	388

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2016

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata jumlah kelompok binaan yang ada mengalami peningkatan. Kelompok binaan di Kabupaten Kubu raya terdiri dari dua jenis, menyangkut bidang ekonomi yang diutamakan untuk pedagang bakulan dan bidang teknologi tepat guna yang difokuskan untuk peningkatan keterampilan masyarakat. Selain itu organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bergerak secara aktif di setiap kelurahan yang ada. Demikian pula dengan keberadaan Posyandu sebagai sarana peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita, yang pada Tahun 2016 mencapai jumlah 388 unit.

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan penduduk di Kabupaten Kubu Raya (data BPS) pada tahun 2013 tercatat sebesar 591.1657 jiwa dan tahun 2017 diperkirakan jumlah penduduk Kubu Raya akan mencapai 601.356 jiwa. Pengendalian kependudukan, memiliki keterkaitan dengan ketersediaan alat kontrasepsi serta terutama upaya advokasi petugas KB. Berbagai upaya terobosan seperti Kamp[ung KB, GENRE, maupun konseling di kalangan remaja untuk menunda usia perkawinan terus dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga penggiat Keluarga Berencana.

7. Perhubungan

Sektor perhubungan memegang peran sentral dalam menciptakan nilai tambah melalui penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perkembangan antar wilayah. Kebijakan di bidang perhubungan Kabupaten Kubu Raya, selain dimaksudkan untuk mendukung pergerakan penduduk dan angkutan barang terutama untuk wilayah pedalaman.

Indikator utama bidang perhubungan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya ditujukan pada upaya pertambahan panjang jembatan terbangun dan penambahan staiger sebagai sarana utama penghubung interkoneksi atar wilayah. Tingkat capaian kinerja bidang perhubungan di Kabupaten Kubu Raya untuk pertambahan jembatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45.
ASPEK PERHUBUNGAN

Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun Ke ...		Capaian Target RPJMD Tahun Ke..	
	2015	2016	2015	2016
Panjang jembatan terbangun/Meter (pada jalan kabupaten :	612	702	612.40	646.90
Jumlah dermaga/ steigher yang terbangun (Buah)	*199*	*239*	173.00	200.00

Sumber : Evaluasi Bappeda, 2017, diolah.

8. Komunikasi dan Informatika

Aktivtas komunikasi dan informatika di Kabupaten Kubu Raya berkembang relatif cukup pesat sebagai dampak dari berkembangnya

teknologi kumunikasi dan IT, serta ketersediaan bangunan BTS sebagai penunjang arus komunikasi antar penduduk. Selain itu, berkembangnya media komunikasi juga ditunjukkan dengan beragam menu informasi yang dipilih dari media baca serta media lainnya. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran secara khusus di bidnag komunuikasi dan nformatika baik swasta maupu negeri, cukup diminati mengingat memilikiprospek perkembangan yang semakin besar di masa mendatang.

9. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal di selama periode 2013-2016 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.46.
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL

No	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Investasi PMA (Juta)	1.304.245,51	1.542.505,92	-	1.595.7999,11
2.	Jumlah Investasi PMDN (Juta)	3.053.817,67	8.441.122,70	-	7.743.131,14

Sumber : Kubu Raya Dalam Angka – BPS 2017

10. Statistik

Ketersediaan data statistik akan membantu dalam proses penyusunan rencana pembangunan maupun untuk kepentingan lainnya. Di Kabupaten Kubu Raya penyediaan data statistik bersumber dari BPS. Selain data statistk, data lainnya yang dihasilakn oleh SKPD teknis dalam bentuk data pokok, profile juga digunakan sebagai bagian yang perumusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik di selama periode 2013-2016 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.47.
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG STATISTIK

No	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada
2.	Buku "PDRB kabupaten"	ada	ada	ada	ada
3	Buku Kecamatan Dalam Angka	ada	ada	ada	Ada
4.	Indikator Makro pembangunan KKR	-	-	-	ada
5.	Perekonomian Daerah	-	-	-	ada

Sumber : Bappeda Kubu Raya, 2016

11. Kebudayaan

Pelestarian Kebudayaan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di lakukan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan event budaya dan event adat istiadat yang menjadi khasanah kekayaan budaya daerah. Sarana kreatif di bidang kebudayaan serta pemb inaan pembudaya di Kabupaten Kubu Raya baru mencapai 50 persen dari target tahun 2019, sedangkan pemb inaan industry kretaif bau mencapai 64,71 persen. Sebagian besar industry kretaif yang dibina adalah dalam bentuk industri pengolahan makanan.

Capaian kinerja Kebudayaan di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

Tabel 2.48.
ASPEK KEBUDAYAAN

Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun Ke ...		Capaian Target RPJMD Tahun Ke..		Rasio Capaian
	2015	2016	2015	2016	
Jumlah pelestarian cagar budaya (Unit)	2	4	10	10.00	100
Jumlah sarana dan industri kreatif :					
a. Sarana Kreatif	2	4	3	2.00	50
b. Industri Kreatif (Kegiatan)	9	11	6	11	64.71
Pelestarian budaya tradisional dan kearifan lokal (Event)	4	4	1	2.00	50

Sumber : Dinas Parakrafpora Bappeda Kubu Raya, 2016

Jumlah event budaya dan cagar budaya di Kabupaen Kubu Raya sebagai berikut :

Tabel 2.49.
INVETARISASI DATA KEGIATAN INDUSTRI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015 DAN 2016

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Keterangan
1.	Event kreatif tingkat provinsi kalbar	Alun-alun Kapuas Kota Pontianak	Pagelaran qasidah dan hadrah
		Kota Singkawang	Festival seni budaya melayu
2.	Festival Hadrah	Kec. Sungai Raya	Masih perlu ditingkatkan
3.	Festival Qasidah	Kec. Sungai Raya	Masih perlu ditingkatkan
4.	Festival Musik Kreatif Pelajar	Kec. Sungai Raya	Perlu di kembangkan
5.	Festival Tundang	Kec. Sungai Raya	Perlu di kembangkan
6.	Festival Lagu Daerah	Kec. Sungai Raya	Perlu di kembangkan
7.	Festival Qasidah	Kec. Sungai Ambawang	Masih perlu ditingkatkan
8.	Festival Hadrah	Kec. Sungai Ambawang	Masih perlu ditingkatkan
9.	Rema Muda	Kec. Sungai Ambawang	Ajang Pelestarian Seni
10.	Haul	Kec. Sungai Raya	Ajang Pelestarian Budaya
11.	Tolak Bala'	Kec. Sungai Raya	Ajang Pelestarian Budaya

Sumber : Dinas Parakrafpora Bappeda Kubu Raya, 2016

Tabel 2.50.
CAGAR BUDAYA YANG SUDAH DILESTARIKAN
DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	Nama Cagar Budaya	Lokasi
1.	Makam Ismail Mundu	Kamp. Selat Remis, Kec. Teluk Pakedai
2.	Makam Panglima Raja Kubu	Desa Padang Tikar, Kec. Batu Ampar
3.	Keraton Kubu	Desa Kubu, Kec. Kubu
4.	Hien Bu Cheng Hua (Pekong Tengah Laut)	Sui Kakap, Kec.Sui Kakap
5.	Padogi	Sui Samak, Kec. Sui Ambawang
6.	Rumah Panjang (Betang)	Kamp. Lingga, Kec. Sui Ambawang
7.	Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya	Sui Raya, Kec. Sui Raya
8.	Makam Sultan Manggis	Suka Lanting, Kec. Sui Raya
9.	Guci	Desa Karik, Kec. Sui Ambawang
10.	Masjid Nasrullah	Teluk Pakedai, Kec.Teluk Pakedai

Sumber : Dinas Parakrafpora Bappeda Kubu Raya, 2016

12. Perpustakaan dan Kerasipan

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan meskipun jumlah buku yang dipinjam mengalami penurunan. Hal ini bisa menjadi indikasi akan kurangnya minat baca masyarakat. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan di selama periode 2013-2016 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.51.
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG PERPUSTAKAAN

No	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	957	1.023	554	2.446
2.	Jumlah Buku yang dipinjam (eks.)	10.799	10.799	11.909	4.609

Sumber : BPS Kubu Raya Tahun 2014-2017

2.3.3. Fokus Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.52.
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Indikator	2013	2014	2015	2016
1.	Produksi perikanan laut (ton)	18.162,6	19.852,20	46.872,25	23.506,90
2.	Produksi perikanan darat (ton)	274,30	290,50	294,02	355,30
3.	Kontribusi sektor pertanian (perikanan & kelautan) terhadap PDRB	16,34	14,66	13,30	12,72

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2017

2. Pariwisata

Tabel 2.53.
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG PARIWISATA

No	Indikator	2013	2014	2015	2016
1.	Kunjungan wisatawan	57.855	59.908	60.647	426.137

Sumber : BPS Kubu Raya 2017

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek kemampuan ekonomi Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Angka konsumsi rumah tangga per kapita dapat dianalogikan sebagai suatu Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita. Konsumi perkapita merefleksikan kemampuan daya beli penduduk karena besaran pengeluaran

yang dikeluarkan oleh penduduk, akan dipengaruhi perkembangan harga atas inflasi. Sesuai hukum Maslow (basic needs), masyarakat akan terlebih dahulu mengutamakan kebutuhan akan pangan, diikuti kebutuhan lainnya seperti pakaian, pendidikan,kesehatan, serta penunjang lainnya.

Dengan angka kondisi ekonomi makro yang dibayangi dengan inflasi sebesar 5,17 persen akibat kenaikan tarif dasar listrik (TDL), tingkat pengeluaran masyarakat Kabupaten Kubu Raya cenderung meningkat, dibandingkan dengan tahun 2015 dimana dengan inflasi sebesar 6,63 persen pengeluaran masyarakat hanya sebesar 9.890,21. Pada tahun dengan rasio pengeluaran Rumah Tangga sebesar 116,21 persen, yang berarti kenaikan TDL, kendatipun berdampak pada daya beli akan tetapi relatif tidak terlalu menganggu pengeluaran penduduk. Dengan membandingkan rata-rata pengeluaran erhadap inflasi, terlihat bahwa angka inflasi berpengaruh besar terhadap tingkat pengeluaran penduduk.

Tabel 2.54.
ANGKA KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Total Pengeluaran RT	8.029,73	8.804,92	9.890,21	11.052,21
2.	Jumlah RT	-	-	-	128.435
3.	Rasio	-	-	-	116,21

Sumber : BPS Kubu Raya,2016

Sementara itu, rasio pengeluaran untuk keperluan non rumah tangga berfluktuatif dan rata-rata pengeluaran non makanan selama tahun 2013-2016 rasionya sebesar 46.98 persen. pengeluaran konsumsi non makanan terbesar pada komponen perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya yaitu sebesar 7,90 persen dan transportasi/angutan sebesar 7.58 persen. Komponen perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya serta transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat.

Tabel 2.55.
PERSENTASE KONSUMSI RUMAH TANGGA NON PANGAN

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	8.029,73	8.804,92	9.890,21	11.052,21
2.	Total Pengeluaran	3.642.286	4.153.281	4.714.663	5.275.220
3.	Rasio	45.36	47.17	47.67	47.73

Sumber : BPS Kubu Raya,2016

Tabel 2.55.
PROSENTASE ANGKA KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA BERDASARKAN PENGELUARAN YANG DILAKUKAN MASTARAKAT TAHUN 2016

NO	Uraian	%
1.	Makanan dan Minuman Non Berahkohol	54.44
2.	Minuman Berakhohol dan Rokok	4.82
3.	Pakaian	4.97
4.	Perumahan,Air,Listrik,Gas dan Bahan Bakar Lainnya	7.90
5.	Perabotan,Peralatan rumah tangga dan pemeliharaan rutin rumah	2.94
6.	Kesehatan	2.82
7.	Transportasi/Angkutan	7.58
8.	Komunikasi	2.25
9.	Rekreasi dan Budaya	1.81
10.	Pendidikan	3.13
11.	Restoran dan Hotel	5.10
JUMLAH		100

Sumber : BPS Kubu Raya, Indikator Makro Pembangunan Ekonomi , 2016

Di sisi lain besarnya angka konsumsi berarti kemampuan investasi masyarakat Kabupaten Kubu Raya menjadi relatif kecil, karena sebagian besar pendapatan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dari prespektif ekonomi pembangunan (P Todaro), besarnya angka konsumsi justeru kontra produktif dengan kemajuan daerah. Prosentase pengeluaran pangan di Kabupaten Kubu Raya cenderung menurun sementara pengeluaran non pangan cenderung meningkat. Dengan melihat perbandingan pengeluaran, secara umum dapat disimpulkan bahwa indeks

kesejahteraan penduduk Kabupaten Kubu Raya secara bertahap sudah relatif semaki membaik.

Tabel 2.56.
PROSENTASE KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA PANGAN DAN NON PANGAN KABUPATEN KUBU RAYA 2013-2016

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Prosentase Pengeluaran Pangan	54.64	52.83	52.33	52.27
2.	Prosentase Pengeluaran Non Pangan	45.36	47.17	47.67	47.73

Sumber : BPS Kubu Raya,2016

2. Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari beberapa indikator seperti: penataan wilayah, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, ketersediaan restoran, ketersediaan penginapan.

a. Ketersediaan air bersih

Secara umum, persentase rumah tangga yang sudah terinstalasi melaui jaringan PDAM mengalami peningkatan dari 2005-2016. Permasalahan utama PDAM selain dari aspek finacial, adalah upaya meningkatkan distribusi air secara merata kepada masyarakat.

Tabel 2.57.
ASPEK DAYA SAING BIDANG KETERSEDIAAN AIR BERSIH

No.	Prosentase menggunakan Air Bersih	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	RT berlangganan PDAM	11.405	13.065	13.877	14.871

Sumber : BPS Kubu Raya,2016

b. Fasilitas listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik pada 2013-2016 terus meningkat. Pasokan daya listrik dari PLN melali Jaringan Tegangan Rendah, di Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya dapat menjangkau wilayah-wilayah pedalaman. Pemenuhan rasio elektrifikasi

khusus di wilayah pedalaman dilakukan melalui penyediaan PLTS serta dengan menggunakan genset secara mandri oleh masyarakat.

Tabel 2.58.
ASPEK DAYA SAING BIDANG FASILITAS LISTRIK

No.	Prosentase menggunakan Listrik	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	RT menggunakan Listrik	31.679	33.932	36.069	38.222

Sumber : BPS Kubu Raya,2016

c. Ketersediaan Penginapan

Tabel 2.59.
ASPEK DAYA SAING BIDANG KETERSEDIAAN PENGINAPAN

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Hotel Berbintang	1	2	2	3
2.	Hotel Non Berbintang	1	1	1	1

Sumber : BPS Kubu Raya,2016

3. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia, salah satunya dilakukan dengan melihat rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia tidak produktif (dibawah usia 15 tahun dan diatas 64 tahun) dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun. Penduduk kabupaten Kubu Raya tahun 2016 berjumlah 554.881 jiwa, dengan tingkat ketergantungan sebesar 54 persen, berarti setengah penduduk Kubu Raya(usia 15-64 tahun) menanggung setengah lainnya (usia > 15 tahun dan > 64 tahun). Pada tahun 2016, dependency ratio penduduk Kubu Raya sedikit menurun sebesar 51,51 persen.

Tabel 2.60.
ASPEK DAYA SAING BIDANG KETENAGAKERJAAN

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 thn	166.034	169.011	171.075	165.076
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 thn	19.778	20.131	20.376	23.538
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif	185.812	189.142	191.451	188.614
4.	Jumlah penduduk usia 15 thn - 64 thn	368.937	376.592	383.096	390.039
5.	Rasio Ketergantungan Penduduk	50	50	50	48,36

Sumber : BPS, KKR, 2016, PUK 2016* angka Proyeksi

Perkembangan angkatan kerja penduduk Kabupaten Kubu Raya masih didominasi oleh angkatan kerja maksimum tamatan SD, SMP dan SMU. Kendatipun demikian terjadi pergeseran terhadap komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan, dimana proporsi angkatan kerja di tingkat pendidikan Diploma dan universitas, perkembangnya selama tahun 2014–2015, mengalami perkembangan yang besar dibandingkan dengan angkatan kerja di bawahnya. Rata-rata pertumbuhan angkatan kerja dengan pendidikan maksimum SD yang hanya sebesar 1,01%, merupakan indikasi positif karena pada tingkatan tersebut seharusnya harus didorong untuk melanjutkan pendidikannya. Ini juga merupakan indikasi, bahwa program wajib belajar 9 Tahun di Kabupaten Kubu Raya, berhasil dilaksanaan dengan baik.

Tabel 2.61.
ANGKATAN KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013-2015
(ORANG)

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2016*
Maksimum SD	128.450	131.818	118.019	106.491
SMTP	35.380	38.150	47.076	47.983
SMTA Umum	40.627	41.214	44.105	44.707
SMTA Kejuruan	17.109	18.994	23.534	24.146
Diploma	5.040	3.151	7.186	7.547
Universitas	9.408	11.491	19.314	20.656
Jumlah	236.014	244.818	259.234	251.531

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2016, 2016 merupakan angka proyeksi

Struktur ketenagakerjaan didominasi di sektor pertanian. Pada tahun 2015, prosentase penduduk laki-laki berusia 15 tahun yang bekerja menurut lapangan usaha mencapai 446,61%. Penduduk yang bekerja selama tahun 2013-2015 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 214.388 orang dan di tahun 2014 kembali meningkat sebanyak 229.686 orang. Prosentase peningkatan penduduk yang bekerja dari tahun 2013-2014 di Kabupaten Kubu Raya sebesar 7,14%. DI tahun 2015 prosentase peningkatan penduduk yang bekerja di Kabupaten Kubu Raya sebesar 5,96% atau menjadi sebanyak 243.386 orang. Secara umum dari tahun 2013-2015, jumlah pertambahan penduduk yang bekerka di Kabupaten ini sebanyak 28.998 orang.

Walaupun daya serap tenaga kerja di 5 sektor tersebut di Kabupaten Kubu Raya cukup besar, akan tetapi dilihat dari tingkat skil yang dikuasai, proporsi daya serap tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu hanya berkisar 4-6 persen, dan selebihnya berspesifikasi umum dan tidak terampil. Dominasi proporsi daya serap tenaga kerja dengan tidak memerlukan tingkat keahlian tertentu terbesar pada kegiatan usaha pertanian, jasa penjualan dan pekerja kasar lainnya. Rata-rata tenaga kerja yang dipekerjakan di dua spesifikasi tersebut tahun 2016 masing-masing sekitar 14 %, 46% dan 20%.

Tabel 2.62.
PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013-2016
(ORANG)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
Pertanian	84.554	111.984	113.444	111.660
Pertambangan	306	-	1.646	1.566
Industri	14.519	16.048	17.520	17.094
Listrik, Gas &Air	288	920	527	492
Bangunan	22.846	23.552	17.355	16.250
Perdagangan	49.332	45.898	47.026	46.128
Angkutan	9.843	3.722	7.805	7.142
Keuangan	2.684	2.059	2.750	2.725
Jasa	30.016	25.503	35.313	34.528
Jumlah	214.388	229.686	243.386	237.586

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2016, 2016 merupakan angka proyeksi

Kualitas tenaga kerja ditentukan oleh tingkat pendidikan yang ditamatkan serta kedudukan dalam struktur ketenagakerjaan. Pendidikan secara umum diperoleh tidak saja diperoleh di sektor formal akan tetapi melalui sektor informa (kursus, diklat,dan sebagainya). Tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan tertentu, memiliki keterkaitan dengan kecepatan dalam penguasaan keterampilan maupun keahlian yang akan menunjang pekerjaannya.

Penduduk yang bekerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Kubu Raya, sebagian besar merupakan pekerja dengan tamatan SD. Prosentase pekerja dengan pendidikan maksimum SD proporsinya 50% dari jumlah tenaga kerja yang bekerja. Sementara itu, ditingkat pekerja dengan pendidikan menengah kejuruan, walupun terjadi peningkatan daya serap tenaga kerja di bursa kerja atau pasar kerja, akan tetapi peningkatannya masih relatif kecil, dibandingkan dengan penduduk bekerja dengan tamatan SD,SMP dan SMU umum.

Tabel 2.63.
PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013-2016
(ORANG)

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2016
Maksimum SD	122.924	126.742	115.919	104.743
SMTP	30.689	35.494	43.818	45.167
SMTA Umum	31.464	38.105	37.815	39.071
SMTA Kejuruan	15.453	17.252	21.525	22.483
Diploma	4.712	3.151	7.186	7.272
Universitas	9.146	8.942	17.123	18.850
Jumlah	214.388	229.686	243.386	237.586

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2015

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat mendorong dan menstimulasi perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundangan-perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab, adil, patut, dan bermafaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu dianalisis kondisi kinerja keuangannya khususnya Tahun 2014-2016, dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kinerja kuangan daerah Kabupaten Kubu Raya periode Tahun 2014-2016 berdasarkan data kinerja keuangan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 diperoleh dari Laporan Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut :

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada sub pembahasan ini dijabarkan perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

3.1.1.1. Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kapasitas keuangan daerah akan menetukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan. Realisasi pendapatan Kabupaten Kubu Raya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

No.	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Rata-rata Pertum-buhan (%)
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.094.841.843.919,30**	**1.293.812.364.171,48**	**1.386.340.689.953,25**	**8,19**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**97.407.483.796,39**	**86.469.772.434,38**	**101.310.299.207,01**	**1,32**
1.1.1	Pajak Daerah	64.729.599.444,05	54.285.086.430,52	67.629.094.584,60	1,47
1.1.2	Retribusi Daerah	25.180.126.655,62	6.003.747.900,46	6.645.572.802,78	-35,86
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	563.736.663,41	1.724.724.757,82	2.117.382.258,00	55,44
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	6.934.021.033,31	24.456.213.345,58	24.918.249.561,63	53,17
1.2.	**Dana Perimbangan**	**841.715.445.482,00**	**891.952.775.958,00**	**1.053.065.317.850,00**	**7,75**
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	59.938.735.482,00	38.796.383.958,00	26.471.101.564,00	-23,85
1.2.2	Dana Alokasi Umum	699.700.430.000,00	732.770.242.000,00	787.062.196.000,00	3,99
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	82.076.280.000,00	120.386.150.000,00	239.532.020.286,00	42,91
1.3.	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**155.718.914.640,91**	**315.389.815.779,10**	**231.965.072.896,24**	**14,21**
1.3.1	Hibah	2.962.933.000,00	67.074.250.000,00	98.590.639.189,24	221,64
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Daerah Lain-nya	27.118.612.640,91	68.862.470.779,10	38.684.149.707,00	12,57
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonami Khusus	-	170.479.095.000,00	77.211.484.000,00	-32,70
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	8.974.000.000,00	12.478.800.000,00	17,92
1.3.6.	Pendapatan Lainnya	125.637.369.000,00	-	5.000.000.000,00	-80,05

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu Tahun 2014-2016 mengalami kenaikan dari Rp. **1.094.841.843.919,30** Tahun 2014 menjadi Rp. **1.386.340.689.953,25** Tahun 2016 atau meningkat rata-rata pertumbuhan mencapai **8,19 %**, dengan proporsi peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **1,32 %**, Dana Perimbangan sebesar **7,75 %**, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **14,21 %** yang memberikan kontribusi terbesar rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.1. Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016.

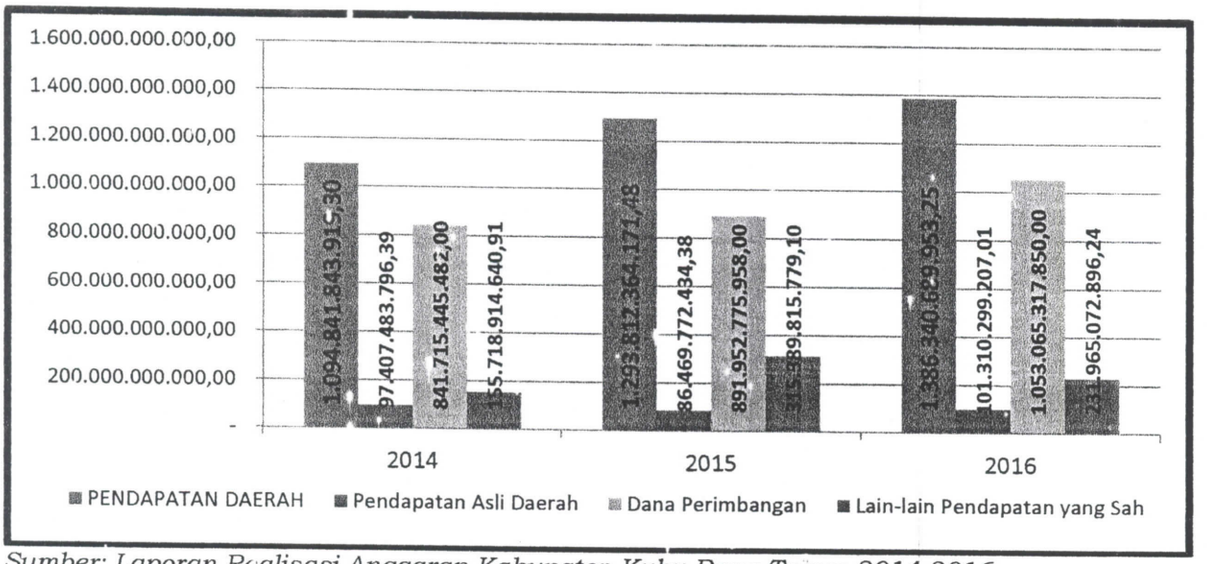

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Gambar 3.1. Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya mengalami kenaikan. Namun, apabila dilakukan analisis berdasarkan proporsi sumber pendapatan bahwa sumber pendapatan yang paling dominan berasal dari Dana Perimbangan, sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki peringkat ketiga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya masih tergantung pada pusat melalui Dana Perimbangan.

3.1.1.2. Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagimana dimaksud terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung:
   1) Belanja Pegawai.
   2) Belanja Bunga.
   3) Belanja Subsidi.
   4) Belanja Hibah.
   5) Belanja Bantuan Sosial.
   6) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa.

7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan.
8) Belanja Tidak Terduga.

b. Belanja Langsung:
1) Belanja Pegawai.
2) Belanja Barang dan Jasa.
3) Belanja Modal.

Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berlandaskan Anggaran Kinerja (*Performance Budget*), yaitu Belanja Daerah berorientasi pada pancapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2.
REALISASI BELANJA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

No.	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Rata-rata Pertum-buhan (%)
1.	**Belanja Daerah**	**1.034.435.209.629,33**	**1.308.457.979.940,00**	**1.312.796.446.926,06**	**8,27**
1.1.	**Belanja Tidak Langsung**	**492.507.388.266,33**	**602.949.645.810,00**	**701.293.442.050,00**	**12,50**
1.1.1.	Belanja Pegawai	459.863.440.395,00	528.724.696.223,00	538.676.298.768,00	5,41
1.1.2.	Belanja Hibah	4.766.077.440,00	4.688.000.000,00	8.919.439.025,00	23,23
1.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	2.961.527.608,33	1.271.525.585,00	825.199.000,00	-34,68
1.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	24.688.805.000,00	68.265.424.002,00	145.328.885.200,00	80,56
1.1.6	Belanja Tidak terduga	227.537.823,00	-	7.543.620.057,00	475,79
1.2.	**Belanja Langsung**	**541.927.821.363,00**	**705.508.334.130,00**	**611.503.004.876,06**	**4,11**
1.2.1.	Belanja Pegawai	48.813.960.114,00	44.464.306.041,00	46.120.205.650,00	-1,87
1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.298.581.264,00	294.845.345.559,00	264.535.097.640,06	13,63
1.2.3.	Belanja Modal	312.815.279.985,00	366.198.682.530,00	300.847.701.586,00	-1,29

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Berdasarkan Tabel 3.2. tersebut di atas diketahui bahwa selama periode Tahun 2014-2016, rata-rata realisasi Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar **8,27 %**, dengan proporsi Belanja Tidak Langsung rata-rata pertumbuhannya meningkat sebesar **12,50 %,** sedangkan proporsi Belanja Langsung rata-rata pertumbuhannya meningkat sebesar **4,11 %**. Disamping itu juga terdapat komponen rincian Belanja Daerah, terutama Belanja Bantuan Sosial turun rata-rata mencapai **-34,68 %**, Belanja Pegawai dalam komponen Belanja Langsung turun rata-rata sebesar **-1,87 %**, dan Belanja Modal turun rata-rata sebesar **-1,29 %**. Rata-rata

pertumbuhan yang paling tinggi dari komponen Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang mencapai **30,56 %**. Terjadinya peningkatan alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa tersebut dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengalokasi anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pajak Darah serta Retribusi Daerah yang dipungut dikembalikan ke Pemerintah Desa minimal 10 % secara bertahap sesuai amanah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Untuk komponen Realisasi Belanja Langsung yang mengalami kenaikan cukup besar rata-rata pertumbuhanny adalah komponen Belanja Barang dan Jasa sebesar **13,63 %**, serta Belanja Modal rata-rata pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar **-1,29 %**. Berdasarkan data Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 tersebut diatas, diketahui bahwa laju rata-rata pertumbuhan antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah diketahui bahwa Laju rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah dalam kurun waktu Tahun 2014-2016 mencapai **8,27 %** lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah hanya sebesar **8,19 %.**

Adapun proporsi Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.3.
PERBANDINGAN PROPORSI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

Uraian	Tahun 2014 (%)	Tahun 2015 (%)	Tahun 2016 (%)
Belanja Tidak Langsung	**45,68%**	**48,77%**	**57,63%**
Belanja Langsung	**54,32%**	**51,23%**	**42,37%**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Berdasarkan Tabel 3.3. tersebut diketahui bahwa proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung kecenderungannya meningkat dibandingkan dengan Belanja Langsung dari Tahun 2014 mencapai **45,68 %** menjadi **57,63 %** Tahun 2016 atau rata-rata meningkat sebesar **8,05 %**, sedangkan proporsi Belanja Langsung kecenderunganya menurun dari **54,32 %** Tahun

2014 menjadi **42,37 %** Tahun 2016, yang rata-rata penurunannya mencapai **-7,95 %.**

3.1.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan, maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkan kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun realiasasi pembiayaan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

No.	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.	**Pembiayaan Daerah**	**1.210.627.130,32**	**58.206.161.419,39**	**6.937.467.020,87**	**78,95**
3.1.	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**	**8.210.627.130,32**	**61.617.261.419,39**	**43.560.545.650,87**	**74,41**
3.1.1.	Penggunaan Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	8.210.627.130,32	61.617.261.419,39	43.560.545.650,87	74,41
3.2.	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**	**7.000.000.000,00**	**3.411.100.000,00**	**36.623.078.630,00**	**73,60**
3.2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	2.500.000.000,00	36.623.078.630,00	73,60
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang		911.100.000,00		0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Berdasarkan Tabel 3.4. tersebut di atas dapat diketahui realisasi penerimaan pembiayaan daerah dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2014 penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.8.210.627.130,32, naik pada Tahun 2015 menjadi Rp.61.617.261.419,39 serta Tahun 2016 menjadi Rp.43.560.545.650,87,

dengan rata-rata pertumbuhan mencapai **74,41 %**, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 mengalami fluktuasi, pada Tahun 2014 pengeluaran sebesar Rp.7.000.000.000,00, turun menjadi Rp.3.411.100.000,00 pada Tahun 2015, dan naik kembali menjadi Rp.36.623.078.630,00 pada Tahun 2016, dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai **73,60 %**. Secara umum Pembiayaan Daerah meningkat rata-rata pertumbuhannya mencapai **78,95 %.**

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan Neraca Daerah menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah, maupun para kreditur (pemberi pinjaman) kepada daerah, serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau asset daerah dan kewajiban serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari Neraca Daerah akan diturunkan dalam beberapa sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan rata-rata pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5.
RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

Nomor	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Rata-rata Pertum-buhan (%)
	Neraca Daerah				
1.	**Aset**	**1.927.576.942.838,64**	**1.856.551.691.794,80**	**2.112.568.599.035,70**	**3,10**
1.1.	**Aset Lancar**	**127.932.874.300,19**	**86.151.424.095,08**	**125.531.866.493,75**	**-0,63**
	1. Kas dan Setara Kas	61.617.261.419,39	43.562.487.842,87	80.520.135.381,06	
	2. Investasi Jangka Pendek		-	-	
	3. Piutang Pendapatan	41.498.285.752,65	50.050.936.528,72	53.822.391.776,45	
	4. Piutang Lainnya	17.439.152.505,00	8.817.501.213,20	12.021.756.173,20	
	5. Penyisihan Piutang	-	(25.120.741.735,78)	(29.208.399.424,33)	
	6. Beban Dibayar Dimuka	-	896.867.373,72	988.429.809,72	
	7. Persediaan	7.378.174.623,15	7.944.372.872,35	7.387.552.777,65	
	8. Aset Untuk Dikonsolidas.kan	-	-	-	
1.2.	**Investasi Jangka Panjang**	**9.500.000.000,00**	**12.000.000.000,00**	**48.623.078.630,00**	**72,33**
	1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	

Nomor	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Rata-rata Pertum-buhan (%)
	2. Investasi Jangka Panjang Permanen	9.500.000.000,00	12.000.000.000,00	48.623.078.630,00	
1.3.	**Aset Tetap**	**1.782.740.813.533,47**	**1.750.214.221.060,73**	**1.837.853.469.624,45**	**1,02**
	1. Tanah	99.680.110.328,33	104.868.520.603,33	110.202.161.373,33	
	2. Peralatan dan Mesin	134.698.648.789,04	186.901.918.240,03	196.937.364.107,02	
	3. Gedung dan Bangunan	512.606.101.215,92	613.102.100.792,23	599.970.218.863,86	
	4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	983.350.620.132,32	1.204.411.971.508,66	1.416.793.229.880,66	
	5. Aset Tetap Lainnya	35.190.450.694,99	45.039.184.863,99	45.341.640.502,99	
	6. Kontruksi Dalam Pengerjaan	17.214.882.372,87	19.025.298.650,00	10.924.866.650,00	
	7. Akumulasi Penyusutan	-	(423.134.773.597,51)	(542.316.011.753,41)	
1.4.	**Dana Cadangan**				0
	1. Dana Cadangan	-	-	-	
1.5.	**Aset Lainnya**	**7.403.255.054,98**	**8.186.046.638,99**	**100.560.184.287,50**	**138,60**
	1. Tagihan Jangka Panjang	-	220.165.300,00	-	
	2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	
	3. Aset Tidak Berwujud	5.800.234.439,25	6.539.762.715,25	1.502.681.309,38	
	4. Aset Lain-lain	1.603.020.615,73	1.426.118.623,74	99.057.502.978,12	
2.	**Kewajiban**	**14.322.194.998,00**	**23.449.021.064,85**	**14.386.344.901,21**	**0,15**
2.1.	**Kewajiban Jangka Pendek**	**14.322.194.998,00**	**23.449.021.064,85**	**14.386.344.901,21**	**0,15**
	1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)	434.651.370,00	1.942.192,00	38.425.333,00	
	2. Utang Bunga	-	-	-	
	3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	
	4. Pendapatan Diterima Dimuka	-	381.381.525,85	349.430.729,21	
	5. Utang Beban/ Utang Belanja	-	3.158.894.953,00	1.889.441.038,00	
	6. Utang Jangka Pendek Lainnya	13.887.543.628,00	19.906.802.394,00	12.109.047.801,00	
2.2.	**Kewajiban Jangka Panjang**	-			
	1. Utang Dalam Negeri	-	-	-	
	2. Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	
3.	**Ekuitas**	**1.580.837.428.937,35**	**1.833.102.670.729,95**	**2.098.182.254.134,49**	**9,90**

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Berdasarkan data pada Tabel 3.5 tersebut diatas, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan aset daerah dari Tahun 2014-2016 mencapai **3,10 %**, sedangkan kewajiban daerah rata-rata pertumbuhannya mencapai **0,15 %**, dan ekuitas rata-rata pertumbuhannya mencapai **9,90 %**.

Adapun analisis rasio keuangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6.
ANALISIS RASIO KEUANGAN KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014-2016

No.	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Rasio Lancar	893,25%	367,40%	872,58%
2	Rasio Quick	893,25%	367,40%	872,58%
3	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,74%	1,26%	0,68%
4	Rasio Hutang Terhadap Modal	0,91%	1,28%	0,69%
5	Rata-rata Umur Piutang	-	-	-
6	Rata-rata Umur Persediaan	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2014-2016

Pendapatan Daerah, termasuk Pendapatan Asli daerah, harus mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi, maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam mengali penerimaan daerah dan struktur ekonomi masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis, yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi, akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Bertitik tolak pada kondisi tersebut, kebijakan strategis yang akan dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

1. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam bidang pendapatan dan kualitas sistem pemungutan pendapatan daerah, terutama pelayanan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran serta Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan eksistensifikasi sumber pendapatan daerah berdasarkan

karakteristikdaerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke tiga;

4. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan menitikberatkan pendekatan potensi sumber daya alam;
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan.

Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolan belanja daerah antara lain :

1. Mengalokasikan anggaran dana transfer ke daerah dan Dana Daerah;
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sebagaimana amanat dari wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan;
3. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan inrastruktur sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah dan peningkatan perekonomian daerah;
4. Peningkatan aktiitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan upaya perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah mengoptimalkan bantuan keuangan, bantuan provinsi, bantuan pusat, belanja bantuan hibah, maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non pemerintahan. Sedangkan, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, yang dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal dari pengembalian daerah kepada pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah lainnya, termasuk juga penerimaan yang berasal dari pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga). Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu, sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, bahwa Anggaran Belanja Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, artinya anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efidiensi dan eektiitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, artinya anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi, artinya anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan menguapayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang pelaksanaanya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun dengan Standar Akuntasi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Namun, dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2014-2016 adalah data yang telah diaudit oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD.

Kondisi proporsi penggunaan anggaran di Kabupaten Kubu Raya terhitung dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, meskipun APBD Kabupaten Kubu Raya masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik, karena keterbatasan anggaran dan peningkatan proporsi belanja tidak langsung.

Berkaitan dengan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.7. sebagai berikut :

Tabel 3.7.
ANALISIS PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

No.	T.A	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp).	Prosentase
1	2014	508.677.400.509,00	1.116.513.591.138,56	45,56
2	2015	573.189.002.264,00	1.340.741.707.810,00	42,75
3	2016	584.796.504.418,00	1.424.174.304.024,13	41,06

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Total Belanja untuk pemenuhan belanja aparatur Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 meningkat. Total Pengeluaran yaitu Belanja Daerah ditambah Pembiayaan Pengeluaran Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 meningkat progresif. Berdasarkan prosentase proporsi kebutuhan aparatur pada Tabel 3.7 tersebut di atas, menunjukkan bahwa Tahun 2014 Belanja Daerah yang digunakan untuk pemenuhan belanja aparatur sebesar **45,56 %**. Tahun 2015 menjadi **42,75 %**, turun sebesar **2,81%**, dan pada Tahun 2016 turun menjadi **41,06%** atau sebesar **1,69 %** dari Tahun 2015. Jadi kecenderungan proporsi Belanja Aparatur menurun dalam kurun waktu 2014-2016 rata-rata sebesar **2,25 %**, namun dari aspek jumlah anggaran belanja aparatur semakin meningkat setiap tahunnya.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit pada penganggaran dikenal adanya Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, maupun pada Tahun Anggaran-Tahun Anggaran berikutnya. Adapun Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Berkaitan dengan defisit riil anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8.
DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014-2016

No.	Uraian	Tahun (Rp)		
		2014	2015	2016
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.094.841.843.919,30	1.293.812.364.171,48	1.386.340.689.953,25
Dikurangi:				
2	Belanja Daerah	1.034.435.209.629,33	1.308.457.979.940,00	1.312.796.446.926,06
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.000.000.000,00	3.411.100.000,00	36.623.078.630,00
A	**Surplus Riil**	**53.406.634.289,97**	**-18.056.715.768,52**	**36.921.164.397,19**
Realisasi Penerimaan Pembiayaan:				
1	SiLPA T.A. Sebelumnya	8.210.627.130,32	61.617.261.420,29	43.560.545.650,87
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**8.210.627.130,32**	**61.617.261.420,29**	**43.560.545.650,87**
A+B	**SiLPA Tahun Berkenaan**	**61.617.261.420,29**	**43.560.545.650,87**	**80.481.710.048,06**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Berdasarkan Tabel 3.8 tersebut di atas diketahui bahwa pada Tahun 2014-2016, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki **SiLPA** yang cukup sebagai akumulasi dari **surplus riil** dengan **total realisasi pembiayaan daerah**, yang menunjukkan fluktuasi, yaitu Rp.61.617.261.420,29 pada Tahun 2014, menjadi Rp.43.560.545.650,87 pada Tahun 2015, dan menjadi Rp.80.481.710.048,06. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya cukup kuat untuk menbiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Adapun komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.9 :

Tabel 3.9.
KOMPOSISI PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN
KABUPATEN KUBU RAYA 2014-2016

No.	Uraian	Tahun 2014 (%)	Tahun 2015 (%)	Tahun 2016 (%)
1.	SiLPA T.A. Sebelumnya	0,08	4,76	3,14
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Berdasarkan Tabel 3.9 tersebut di atas, diketahui bahwa komponen untuk menutup defisit anggaran Tahun 2014-2016 hanya bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya yang prosentase kontribusi menutupi defisit anggaran berfluktuasi. Pada Tahun 2014 sebesar **0,08 %** meningkat pada Tahun 2015 sebesar **4,76 %**, dan Tahun 2016 kontribusinya turun menjadi **3,14 %**. Jadi rata-rata kontribusi SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya dalam menutupi defisit anggaran sebesar **2,66 %**.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggara (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama periode anggaran. SiLPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Kubu Raya sebagian besar berasal dari tertundanya Belanja Langsung program dan kegiatan. Hasil evaluasi dari SiLPA tersebut diharapkan dapat menjadi rencana ke depan agar Kabupaten Kubu Raya dapat secara efektif menjalankan program yang telah direncanakan, sehingga jumlah SiLPA Kabupaten Kubu Raya dapat diperkecil.

Adapun realisasi SiLPA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10
REALISASI SiLPA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

No.	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1.	Jumlah SILPA T.A. sebelumnya	8.210.627.130,32	61.617.261.420,29	43.560.545.650,87

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Berdasarkan Tabel 3.10 tersebut di atas, Tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi SiLPA. Terhitung SiLPA Tahun 2014 berjumlah Rp.8.210.627.130,32, pada Tahun 2015 meningkat menjadi Rp.61.617.261.419,39, dan Tahun 2016 menurun menjadi Rp.43.560.545.650,87.

3.3. Kerangka Pendanaan

Gambaran kerangka pendanaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2019 dalam RPJMD Perubahan ini menggunakan analisis tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun 2014-2016 sebagai dasar estimasi dan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2017-2019.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.11. sebagai berikut :

Tabel 3.11.
PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016-2019

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	PENDAPATAN	1,95%	1.386.340.689.953,25	1.375.877.368.784,00	1.469.088.373.506,00	1.497.754.289.960,26
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	10,45%	101.310.299.207,01	128.293.216.119,00	136.495.293.720,00	150.755.224.075,07
1.1.1.	Pajak daerah	12,17%	67.629.094.584,60	78.174.000.500,00	95.450.000.000,00	107.067.267.553,39
1.1.2.	Retribusi daerah	5,06%	6.645.572.802,78	7.822.478.485,00	7.706.961.285,00	8.097.173.214,44
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	29,03%	2.117.382.258,00	6.636.446.243,00	4.548.578.290,00	5.869.049.994,55
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	4,93%	24.918.249.561,63	35.660.290.891,00	28.789.754.145,00	30.209.585.366,81
1.2.	Dana Perimbangan	2,80%	1.053.065.317.850,00	1.099.853.771.618,00	1.143.923.842.000,00	1.175.919.825.541,86
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak	2,48%	26.471.101.564,00	29.623.365.000,00	28.486.594.000,00	29.191.967.248,87

	/bagi hasil bukan pajak					
1.2.2.	Dana alokasi umum	**-0,19%**	787.062.196.000,00	815.563.958.618,00	782.647.725.000,00	781.181.743.733,03
1.2.3.	Dana alokasi khusus	**11,58%**	239.532.020.286,00	254.666.448.000,00	332.789.523.000,00	371.339.944.185,17
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**-6,65%**	**231.965.072.896,24**	**147.730.381.047,00**	**188.669.237.786,00**	**176.114.018.714,03**
1.3.1	Hibah	**-100,00%**	98.590.639.189,24	700.000.000,00		-
1.3.2	Dana darurat					-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	**10,82%**	38.684.149.707,00	41.199.992.047,00	52.652.392.786,00	58.350.752.997,15
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	**-100,00%**	77.211.484.000,00	-		-
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	**-100,00%**	12.478.800.000,00	-		-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	**73,80%**	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	26.250.000.000,00	45.622.849.714,13
1.3.7	Dana Desa	**3,74%**	-	98.330.389.000,00	109.766.845.000,00	113.867.291.298,99
2	BELANJA	**2,41%**	**1.312.796.446.926,06**	**1.464.206.276.320,00**	**1.409.939.272.716,31**	**1.497.754.289.960,26**
2.1	Belanja Tidak Langsung	**6,10%**	**701.293.442.050,00**	**779.826.735.279,00**	**837.514.038.572,31**	**888.565.679.453,88**
2.1.1	Belanja Pegawai	**2,02%**	538.676 298.768,00	566.832.753.964,00	571.951.188.722,31	583.493.469.998,39
2.1.2	Belanja Bunga	**0,00%**			1.110.000.000,00	-
2.1.3	Belanja Subsidi	**0,00%**				-
2.1.4	Belanja Hibah	**89,83%**	8.919.439.025,00	12.856.420.000,00	61.013.208.550,00	115.820.643.070,18
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	**34,10%**	825.199.000,00	1.640.000.000,00	1.990.000.000,00	2.668.606.487,89
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	**32,53%**		8.209.998.600,00	19.110.696.200,00	25.327.227.446,57
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	**7,76%**	145.328.885.200,00	181.198.945.100,00	181.838.945.100,00	195.943.964.269,08
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	**-59,53%**	7.543.620.057,00	9.088.617.615,00	500.000.000,00	202.348.537,71
2.2	Belanja Langsung	**-2,18%**	**611.503.004.876,06**	**684.379.541.041,00**	**572.425.234.144,00**	**613.824.522.634,71**
2.2.1	Belanja Pegawai	**8,73%**	46.120.205.650,00	63.080.526.175,00	59.290.168.000,00	64.468.341.264,18
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	**-3,65%**	264.535.097.640,06	330.754.736.275,00	236.633.447.342,00	228.002.919.105,50
2.2.3	Belanja Modal	**-2,77%**	300.847.701.586,00	290.544.278.591,00	276.501.618.802,00	322.694.403.290,92
3	PEMBIAYAAN	**42,50%**	**6.937.467.020,87**	**88.328.907.536,00**	**20.075.195.720,00**	**28.607.467.081,92**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	**6,13%**	**43.560.545.650,87**	**93.828.907.536,00**	**52.075.195.720,00**	**55.268.385.408,53**
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	**-4,40%**	**36.623.078.630,00**	**5.500.000.000,00**	**32.000.000.000,00**	**30.592.503.703,93**

Berdasarkan Tabel 3.11. tersebut di atas, diketahui bahwa secara umum proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016-2019 kecenderungan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,95 %.

Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 mengacu pada APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 1.386.340.689.953,25, sebagai base-line data untuk menyusun proyeksi 3 tahun ke depan, maka angka proyeksi

Tahun 2017 sebesar Rp. 1.375.877.368.784,00, dan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.469.088.373.506,00 serta Tahun 2019 sebesar Rp. 1.497.754.289.960,26.

Proyeksi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017-2019 dengan pertimbangan bahwa pada Tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik dan Kabupaten Kubu Raya termasuk pertumbuhan ekonomi yang cukup berada di atas Provinsi dan Nasional, serta kebijakan Pemerintah Pusat yang mendorong pembangunan dimulai dari daerah pinggiran, daerah perbatasan, terdepan, terluar dan daerah terpencil, dan disamping itu juga untuk Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Kubu Raya difokuskan pembangunan konektvitas wilayah, ketahanan pangan dan energi, serta pemukiman dan perumahan sehingga alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat meningkat yang berdampak pada peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2019.

Untuk proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat rata-rata sebesar 10,45% sehingga proyeksi untuk Tahun 2017 sebesar Rp. 128.293.216.119,00. Tahun 2018 sebesar Rp. 136.495.293.720,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 150.755.224.075,07.

Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan diproyeksi meningkat relatif kecil rata-rata sebesar 2,80 %, sehingga pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 1.099.853.771.618,00. Tahun 2018 menjadi Rp. 1.143.923.842.000,00 dan Tahun 2019 diproyeksi peningkatannya sebesar Rp. 1.175.919.825.541,86. Dana perimbangan ini sebagian besar digunakan untuk Belanja Pegawai.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperkirakan terjadi fluktuasi dan diproyeksikan mengalami penurunan yang cukup signifikan, rata-rata sebesar -6,65%. Pada Tahun 2016 sebesar Rp. 231.965.072.896,24 menurun pada Tahun 2017 sebesar Rp. 147.730.381.047,00. Tahun 2018 sebesar Rp. 188.669.237.786,00 dan pada Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 176.114.018.714,03.

Adapun Belanja Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,41%, maka diproyeksikan Tahun 2017 sebesar Rp. 1.464.206.276.320,00 Tahun 2018 sebesar

Rp. 1.409.939.272.716,31 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 1.497.754.289.960,26. Apabila dibandingkan pendapatan daerah dengan belanja daerah, terjadi ketidakseimbangan, disatu sisi trend pendapatan daerah diproyeksikan rata-rata meningkat hanya 1,95 %, sedangkan proyeksi belanja kecenderungan trendnya naik mencapai 2,41 % dengan perbandingan mencapai 1,95 : 2,41 atau dengan kata lain laju kebutuhan anggaran belanja daerah meningkat mencapai hampir 1,3 kali lipat dibandingan dengan kemampuan penyediaan anggarannya (pendapatan daerah).

Untuk belanja tidak langsung diproyeksikan Tahun 2017 sebesar Rp. 779.826.735.279,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 837.514.038.572,31 serta Tahun 2019 sebesar Rp. 888.565.679.453,88 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 6,10 %, sedangkan proyeksi Belanja Pegawai dalam komponen Belanja Tidak Langsung diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 2,02 %. Pada Tahun 2016 dialokasi sebesar Rp. 538.676.298.768,00, maka pada Tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 566.832.753.964,00, dan Tahun 2018 sebesar Rp. 571.951.188.722,31 serta Tahun 2019 sebesar Rp. 583.493.469.998,39. Untuk Alokasi anggaran komponen Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017-2019 diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,74%. pada Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 98.330.389.000,00. Tahun 2018 sebesar Rp. 109.766.845.000,00, dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 113.867.291.298,99

Belanja Langsung diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata sebesar -2,18 % dari Rp. 611.503.004.876,06 Tahun 2016, sehingga diproyeksikan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 684.379.541.041,00 Tahun 2018 sebesar Rp. 572.425.234.144,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 613.824.522.634,71.

Penerimaan pembiayaan daerah mengalami fluktuasi, diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 6,13% dari Rp. 43.560.545.650,87 Tahun 2016, maka pada Tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 93.828.907.536,00 Tahun 2018 sebesar Rp. 52.075.195.720,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 55.268.385.408,53.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk mengetahui gambaran perhitungan kerangka pendanaan Tahun 2016-2019 dapat dilihat dari Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2016-2019.

Tabel 3.12.
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016-2019

No	Uraian	Proyeksi			
		2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan	1,386,340,689,953.25	1,375,877,368,784.00	1.469.088.373.506,00	1.497.754.289.960,26
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	43,560,545,650.87	49,428,907,536.00	52,075,195,720.00	60,672,403,943.29
	Total penerimaan	**1,429,901,235,604.12**	**1,425,306,276,320.00**	**1.521.163.569.226,00**	**1.558.426.693.903,55**
	Dikurangi:				
4.	Belanja Tidak Langsung	701,293,442,050.00	779,826,735,279.00	837.514.038.572,00	888.565.679.453,88
5.	Pengeluaran Pembiayaan	36,623,078,630.00	5,500,000,000.00	32,000,000,000.00	30.592.503.703,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**691,984,714,924.12**	**639,979,541,041.00**	**651.649.530.654,00**	**639.268.510.746,67**

Berdasarkan Tabel 3.12 tersebut di atas, diketahui bahwa proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2019 mengalami fluktuatif. Tahun 2016 mencapai Rp.691,984.714.924,12 sedangkan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 639.979.541.041,00 Tahun 2018 sebesar Rp. 651.649.530.654,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 639.268.510.746,67. Rata-rata penurunan kapasitas riil kemampuan keuangan sebesar -1,96 %.

Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2017-2019 yang sangat terbatas tersebut, diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis yang menjadi tanggung Bupati bersama SKPD terkait yang dikelompokan ke dalam Prioritas I yang meliputi pencapaian indikator sasaran strategis pada Misi I, Prioritas II yang meliputi pencapaian indikator sasaran strategis pada Misi II, dan Prioritas III yang meliputi pencapaian indikator sasaran strategis pada Misi III, serta Prioritas IV yang meliputi pencapaian indikator sasaran strategis pada Misi IV.

Tabel 3.13.
RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

No	Uraian	Proyeksi			
		2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Kapasitas riil kemampuan keuangan	691,984,714,924	639,979,541,041	651.649.530.654,00	639.268.510.746,67

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Kabupaten Kubu Raya sebagai kabupaten baru hasil pemekaran tahun 2007, baru melakukan satu tahapan RPJMD dari empat tahapan RPJMD yang direncanakan dalam RPJPD 2009-2029. Pembangunan yang dilakukan masih bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan dasar. Rentang geografis wilayah yang luas juga mempengaruhi pencapaian target pembangunan di daerah menjadi tidak optimal ditambah dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan yang belum memadai. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan utama adalah :

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kubu Raya dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 65,54 yang masih berada dibawah Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, serta tingkat kemiskinan mencapai 5,04 % dan tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 6,02 %.
2. Meningkatnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2015 mencapai 0,14 % , pada tahun 2016 mencapai 0,34 % dan pada tahun 2017 mencapai 0,3 %.
3. Ketersediaan infrastruktur wilayah belum merata baik aspek kualitas maupun kuantitas, sehingga berpengaruh pada rendahnya interkonektivitas antar kecamatan dan desa, serta masih tingginya tingkat kesenjangan sosial ekonomi dan wilayah.
4. Belum efektifnya penerapan tata kelola pemerintahan serta belum tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai.

4.1.1. Identifikasi Lingkungan Internal

4.1.1.1. Kekuatan Daerah

1. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, sebagai aset dan potensi pembangunan ;
2. Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi sumberdaya alam yang besar dan beranekaragam, yang meliputi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata dan sektor lainnya;

3. Secara geografis, Kabupaten Kubu Raya memiliki posisi yang sangat strategis yaitu sebagai Hinterland Kota Pontianak yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Pontianak Metropolitan Area (PMA) pada RTRW Nasional yang berpotensi untuk pengembangan wilayah perkotaan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Kubu Raya terutama sektor Perdagangan dan Jasa (Hotel, Restoran, Properti, dan lain-lain), serta akses wilayah perairan berbatasan langsung dengan Selat Karimata yang berpotensi untuk pengembangan sektor kelautan, termasuk pengembangan pelabuhan laut, tol laut dan lain-lain;
4. Kabupaten Kubu Raya sebagai beranda terdepan Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan terdapat Bandara Internasional Supadio dan Terminal Antar Lintas Batas Negara (Terminal ALBN) Sungai Ambawang dan Pelabuhan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya. Selain itu terdapat pula fasilitas strategis nasional seperti pangkalan TNI-AU dan Markas KODAM XII/Tanjungpura yang menunjang stabilitas keamanan dan pengembangan wilayah perkotaan ;
5. Masyarakat yang multi etnis/heterogen yang memiliki keberagaman budaya sebagai aset, potensi dan modal sosial pembangunan daerah;
6. Potensi sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar sebagai sumber penerimaan daerah.

4.1.1.2. Kelemahan Daerah

1. Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dengan kualitas sumberdaya manusia rendah;
2. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur dasar belum memadai yang berdampak terhadap pengembangan wilayah dan pelayanan publik belum optimal;
3. Belum dimanfaatkan secara maksimal potensi sumberdaya alam sebagai sumber pendapatan daerah;
4. Tingkat pengangguran yang tinggi dan minimnya perluasan lapangan pekerjaan yang dapat diserap oleh angkatan kerja ;
5. Belum optimalnya kinerja dan kompetensi aparatur ;
6. Menurunnya fungsi dan kualitas lingkungan hidup akibat kegiatan pemanfaatan/eksploitasi sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan hidup;

7. Rendahnya produktivitas, pengolahan dan pemasaran hasil sumberdaya alam;
8. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berpengaruh pada kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, lapangan pekerjaan penyediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas lainnya.

4.1.2. Identifikasi Lingkungan Eksternal

4.1.2.1. Peluang Daerah

1. Kerjasama/kemitraan dalam skala lokal, regional, nasional dan global antara pemerintah, swasta, lembaga masyarakat non pemerintah dan dunia usaha dalam percepatan pembangunan wilayah terbuka luas, dan cukup besar
2. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, pangan dan kebijakan lainnya dalam rangka pemberdayaan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah pinggiran, terdepan, terluar, terpencil dan terisolir ;
3. Komitmen Global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Program Percepatan Pembangunan melalui Penetapan Kawasan-kawasan Strategis dan kawasan lainnya, akan memberikan dampak ikutan bagi Kabupaten Kubu Raya;
5. Perekonomian regional, nasional bahkan internasional yang dapat mempengaruhi investasi dan pengembangan usaha berbasis lokal, ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan.
6. Karakteristik masyarakat yang terbuka dan dinamis;
7. Pertumbuhan ekonomi regional yang relatif tinggi;
8. Kebijakan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), AFTA, dan lain-lain berdampak pada perekonomian daerah.

4.1.2.2. Ancaman Daerah

1. Dampak negatif globalisasi yang dapat mempengaruhi budaya dan nilai kearifan lokal masyarakat ;
2. Pemberlakuan Zona Bebas Perdagangan (*Free Trade Zone*) mengakibatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang akan memberikan determinansi terhadap pasar lokal;

3. Arus informasi yang bersifat negatif sulit dihindarkan akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat;
4. Perubahan iklim dan pemanasan global berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat;
5. Krisis ekonomi, pangan dan energi dunia yang berdampak pada melemahnya/melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi fokus perhatian utama dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi internal dan eksternal, maka dapat dirumuskan isu strategis berdasarkan pada 5 (lima) prioritas/fokus pembangunan, yang meliputi :

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
2. Peningkatan Infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah.
3. Penerapan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Terbuka.
4. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spiritual
5. Peningkatan Pendapatan Daerah.

4.2.1. Isu Strategis Bidang Ekonomi

Permasalahan umum terkait dengan aspek perekonomian dapat dilihat dari urusan Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang ada di wilayah. Pembangunan dalam bidang ekonomi diarahkan pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat. Selain itu juga tingkat kebutuhan energi, tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya lapangan kerja yang tersedia serta belum optimalnya pengembangan sektor-sektor yang berpotensi dapat mendorong pembangunan sektor ekonomi daerah, seperti sektor pertambangan, pariwisata, perikanan dan pertanian. Pembangunan ekonomi wilayah dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap sektor unggulan komparatif wilayah. Isu-isu strategis Bidang Ekonomi, antara lain meliputi :

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka;
2. Rendahnya tingkat produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

4.2.2. Isu Strategis Bidang Sosial Budaya

Pembangunan dalam bidang sosial budaya lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dimana hal tersebut dapat dilihat dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama berhubungan dengan derajat pendidikan dan kesehatan. Isu-isu strategis bidang sosial budaya, meliputi:

1. Belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar masyarakat.
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan terbuka.

4.2.3. Isu Strategis Bidang Infrastruktur

Isu strategis bidang infrastruktur :

1. Belum terbangunannya konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa;
2. Belum optimalnya pengelolaan pengairan, jaringan irigasi/rawa;
3. Rendahnya pelayanan jaringan air bersih, persampahan, listrik dan sanitasi lingkungan;
4. Penurunan fungsi dan kualitas lingkungan hidup;

Dari analisis isu-isu strategis sebagaimana diuraikan diatas, akan dilakukan analisis *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats* (SWOT) Kabupaten Kubu Raya sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1.
ANALISIS SWOT KABUPATEN KUBU RAYA

SWOT	Strengths (S)	Weaknesses (W)
	1. Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dengan SDM yang berkualitas; 2. Sumberdaya alam melimpah; 3. Industri pengolahan hasil sumberdaya alam tersebut di atas memberikan kontribusi terbesar pada PDRB; 4. Posisi geografis wilayah yang strategis; 5. Keberadaan fasilitas strategis; 6. Kondisi masyarakat yang memiliki keberagaman budaya; 7. Potensi partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan; 8. Potensi sumber PAD.	1. Jumlah penduduk besar dengan kualitas SDM yang rendah; 2. Infrastruktur yang terbatas; 3. Masih terbatasnya PAD; 4. Pengelolaan SDA yang belum optimal; 5. Pembangunan ekonomi belum merata; 6. Tingkat pengangguran tinggi dan lapangan pekerjaan minim; 7. Belum optimalnya kompetensi dan kinerja aparatur ; 8. Penurunan fungsi dan kualitas lingkungan hidup; 9. Rendahnya produktivitas pengelolaan SDA; 10. Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat berpengaruh pada kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, lapangan pekerjaan, penyediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas lainnya.
Opportunities (O) 1. Kerjasama dalam skala lokal, regional, nasional dan global antara pemerintah,	**S + O** 1. Dengan jumlah penduduk yang besar, multi etnis dan sumberdaya	**W + O** 1. Pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah dengan

swasta, lembaga masyarakat non pemerintah dan dunia usaha dalam pembangunan wilayah yang terbuka, luas, dan cukup besar; 2. Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kebijakan lainnya dalam pemberdayaan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah terluas, terdepan, terpencil, dan terisolir; 3. Komitmen global dalam SDGs; 4. Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Kawasan-kawasan Strategis dan kawasan lainnya; 5. Perekonomian regional, nasional dan internasional yang mempengaruhi investasi dan pengembangan usaha berbasis lokal, ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan. 6. Karakteristik masyarakat yang terbuka dan dinamis; 7. Pertumbuhan ekonomi regional yang relatif tinggi. 8. Kebijakan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) berdampak positif pada perekonomian daerah	alam yang melimpah dioptimalkan dengan kerjasama antara pemerintah, swasta dan dunia usaha dalam skala lokal, regional, nasional dan global untuk memacu pembangunan wilayah; 2. Mengoptimalkan program kebijakan pemerintah pusat dan provinsi di segala bidang.	mengoptimalkan kerjasama dan pembiayaan pembangunan; 2. Sinergisasi dan pengoptimalan program pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan kualitas SDM.

Threats (T)	**S + T**	**W + T**
1. Dampak negatif akibat arus globalisasi; 2. Pemberlakuan Zona Bebas Perdagangan dapat memberikan tekanan terhadap pasar. 3. Arus informasi negatif akibat perkembangan teknologi informasi; 4. Perubahan lingkungan hidup dan pemanasan global berpengaruh pada aspek kesejahteraan masyarakat; 5. Dampak krisis ekonomi, pangan dan energi dunia.	1. Ketersediaan SDM, potensi SDA yang dimiliki dan posisi geografis yang strategis berupaya mengatasi permasalahan pembangunan dengan berpegang teguh pada nilai kearifan lokal dalam menetralisir budaya/ teknologi informasi negatif yang masuk; 2. Menciptakan kondisi politik dan ekonomi yang kondusif dengan keberagaman budaya masyarakat yang ada; 3. Mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	1. Memaksimalkan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien dalam meminimalisir pengaruh negatif akibat arus globalisasi; 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha masyarakat untuk meminimalisir pengaruh global; 3. Mendorong penyediaan tenaga kerja lokal yang handal dan berdaya saing dalam menghadapi persaingan global; 4. Mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan; 5. Peningkatan karakter masyarakat melalui pendidikan moral dan wawasan kebangsaan untuk menyaring budaya negatif dari arus globalisasi.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang(*clarityof direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, yang dicantumkan dalam RPJMD Perubahan ini sama dengan visi daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebagai berikut : ***"Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki DayaSaing".***

Penjabaran dari visi tersebut adalah :

Maju	:	Kabupaten Kubu Raya memiliki kemajuan di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.
Harmonis dan Berbudaya	:	Masyarakat Kabupaten Kubu Raya memiliki nilai-nilai luhur saling menghormati keberagaman, memiliki akhlak mulia dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Memiliki Daya Saing	:	Kabupaten Kubu Raya memiliki keunggulan komparatif dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan didukung kemampuan ekonomi daerah, sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur wilayah yang memadai dan iklim investasi yang kondusif.

5.2. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Kubu Raya selama 5 tahun dalam RPJMD Perubahan ini, yang mana dalam kurun waktu 2 tahun (tahun 2015-2016) sudah dijalani, dan kurun waktu 3 tahun ke depan (tahun 2017-2019) adalah misi yang sama sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*)

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang professional sehingga bisa menjadi pelayan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju *good governance.*

Misi 2 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreatifitas

Misi ini dimaksudkan untuk membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi lainnya.

Disamping itu juga untuk memperkuat daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan mendorong dan memperkuat pembangunan di bidang sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemenuhan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan penguatan daya saing daerah yang didukung oleh kondisi yang aman dan damai, persebaran penduduk yang merata, mengatasi kesenjangan wilayah serta pemerataan pembangunan di segala bidang.

Misi 3 : Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah.

Misi ini dimaksudkan untuk pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kubu Raya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata berkeadilan dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara efektif keunggulan komparatif masing-masing wilayah dengan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal serta meningkatkan kemandirian dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan hidup.

Misi 4 : Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana layanan dasar guna mendukung pembangunan di masyarakat, serta mendorong peningkatan partisipasi publik untuk bersama-sama pemerintah dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik. Pembangunan sarana dan prasarana akan diwujudkan dengan memperhatikan tata ruang wilayah, potensi wilayah dan sebaran penduduk serta kondisi geografis dengan mengedepankan skala prioritas, kemampuan pembiayaan, daya manfaat, tingkat keterdesakan, dan pemerataan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, yang selanjutnya akan menjadi

dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun sisa waktu 3 tahun (2017-2019) dalam RPJMD Perubahan ini dari 5 tahun yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, sebagai berikut :

Tabel 5.1.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019

VISI : KABUPATEN KUBU RAYA YANG MAJU, HARMONIS, DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI DAYA SAING

No.	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
											2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Mewujudkan system dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*)	T.1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1	Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	S.1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	B	B	B	B	B	B
						S.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	2	Nilai SAKIP	-	C	CC	CC	B	B	B	BB
								3	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
						S.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	90	90	90	90	90	90
								5	Zona Pelayanan Publik	-	-	-	-	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
								6	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	-	60,00	70,00	80,00	80,00	100,00	100,00
						S.4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	7	% Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	8,92	6,68	7,31	10,00	15,00	20,00	25,00
						S.5	Meningkatnya pematangan penerapan SPIP pada SKPD	8	Level 3	Level	-	-	2	2	3	3	3
2.	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreativitas	T.2	Terwujudnya SDM yang memiliki daya saing	2	Terpenuhinya SDM yang memiliki daya saing	S.7	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	9	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Tahun	12,34	12,55	12,84	13,01	13,18	13,36	13,36
								10	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,60	6,50	6,60	7,30	7,60	7,90	7,90
								11	Rata-Rata Nilai Kelulusan	-	7,40	7,50	7,60	7,80	7,90	8,00	8,00
								12	Sekolah Terakreditasi "A"	-	0	0	8	10	12	14	14
						S.8	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	13	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,64	69,74	69,77	69,81	69,86	69,90	69,90
								14	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran	BAD	104	130	120	110	102	102
								15	Angka Kematian Balita (AKB)	Per 1.000 kelahiran hidup	48	25	49	40	27	23	23
								16	% Puskesmas Terakreditasi	%	0	5	10	12	16	20	20
		T.3	Meningkatnya kondisi	3	Kondisi masyarakat yang aman dan tertib	S.9	Meningkatnya kepatuhan	17	% Permasalahan Ketertiban,	%	100,00	100,00	50,00	0,00	25,00	100,00	100,00

			masyarakat yang aman dan tertib				masyarakat kepada hukum		Ketentraman dan Keindahan (K3) yang terselesaikan							
								18	Angka kriminal	Kasus	529	489	3.688	2.500	2.000	1.500	1.500
3	Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah	T.4	Meningkatkan perekonomian daerah	4	Perekonomian daerah yang meningkat	S.10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat, serta menurunkan tingkat kemiskinan	19	% Pertumbuhan ekonomi	%	6,28	6,36	6,37	7,30	7,40	7,50	7,50
				5	Menurunnya tingkat kemiskinan			20	Indeks Gini	-	0,42	0,32	0,34	0,34	0,32	0,30	0,30
								21	Pengeluaran per kapita per tahun	Ribu	7.973,33	7.993,68	8.145,00	8.203,04	8.261,50	8.320,37	8.320,37
								22	% Tingkat kemiskinan	%	6,27	6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,80
						S.11	Meningkatnya investasi penanaman modal daerah	23	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Juta	BAD	3.486.851,231	4.016.235,877	4.625.993,353	5.328.326,114	6.137.289,228	6.137.289,228
								24	Jumlah investor berskala nasional	-	243	255	267	281	295	311	311
						S.12	Menurunnya tingkat pengangguran dan pengendalian pertumbuhan penduduk	25	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,18	6,11	6,42	6,02	5,10	4,80	4,80
								26	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,79	1,22	1,72	1,70	1,67	1,65	1,65
						S.13	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, UMKM dan pariwisata	27	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Juta	2.442.677,3	2.513.050,5	2.688.748,5	2.776.162,5	2.866.418,3	2.959.608,5	2.959.608,5
								28	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Juta	5.386.861,1	6.069.702,0	6.727.703,2	7.245.090,9	7.802.267,8	8.402.293,9	8.402.293,9
								29	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	Juta	72.636,6	84.714,7	91.371,8	98.635,0	106.475,6	114.939,4	114.939,4
								30	Kunjungan wisata	Orang	57.855	60.508	45.139				
4	Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat	T.5	Meningkatkan kapasitas infrastruktur, tata ruang dan konektivitas wilayah	6	Infrastruktur yang semakin baik	S.14	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	31	Indeks Mobilitas	-	BAD	BAD	BAD	0,65	0,75	0,85	0,85
								32	Indeks Konektivitas	-	BAD	BAD	BAD	0,60	0,70	0,80	0,80
				7	Tata ruang wilayah yang semakin baik			33	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	BAD	BAD	BAD	70,00	75,00	80,00	80,00
				8	Terhubungnya semua wilayah			34	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	80,32	80,32	94,79	95,15	96,00	97,00	97,00
						S.15	Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah	35	Ketaatan terhadap RTRW	%	BAD	BAD	BAD	75,00	80,00	85,00	85,00
						S.16	Meningkatnya layanan air bersih dan persampahan	36	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	BAD	BAD	BAD	70,00	75,00	80,00	80,00
								37	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	BAD	BAD	BAD	70,00	72,00	75,00	75,00
						S.17	Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup	38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	BAD	BAD	BAD	Baik	Baik	Baik	Baik

Keterangan : BAD = Belum Ada Data

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi "Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing", maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 dilaksanakan dalam setiap tahun perencanaan dengan arahan prioritas tema tahunan.

6.1. Strategi

Strategi pembangunan daerah tahun 2014-2019 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan :

1. Sebagian besar Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang sudah terintegrasi.
2. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang cukup.
3. Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pengaturan jarak kelahiran.
4. Prasarana, sarana pendidikan dan kompetensi pendidik yang memadai.
5. Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kubu Raya.
6. Potensi pariwisata yang belum dikelola secara maksimal.
7. Adanya potensi pendapatan asli daerah yang masih dapat dimaksimalkan.
8. Tersedianya produk hukum daerah.
9. Prasarana dan sarana kesehatan yang cukup memadai.

10. Prasarana dan sarana pendidikan yang memadai.
11. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif tinggi.
12. Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat.
13. Kesadaran berpolitik masyarakat yang semakin meningkat.

Kelemahan :

1. Angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Masalah Sosial yang masih cukup tinggi.
2. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum terlaporkan.
3. Belum optimalnya keberadaan forum keagamaan dan antar etnis.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi.
5. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.
6. Belum optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan.
7. Belum semua anggota masyarakat tercakup dalam layanan jaminan kesehatan.
8. Perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang belum maksimal.
9. Keterampilan tenaga kerja yang belum optimal.
10. Ketersediaan fasilitas penunjang perekonomian yang masih perlu ditingkatkan.
11. Masih adanya kawasan kumuh.
12. Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Kubu Raya.
13. Nilai kelulusan siswa yang belum optimal.
14. Pelayanan kepada masyarakat masih kurang efektif dan transparan.
15. Penanganan terhadap sampah dan limbah yang belum optimal.
16. Pengelolaan pemerintahan di desa yang belum maksimal.
17. Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang masih terbatas.
18. Tersedianya produk hukum daerah.
19. Masih minimnya minat baca masyarakat.

Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang :

1. Tersedianya pedoman aturan tentang laporan kinerja, penyusunan, perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

2. APK dan APM tingkat satuan pendidikan yang cukup tinggi.
3. Arahan kebijakan nasional mengenai pembangunan infrastruktur.
4. Kebijakan pemerintah pusat mempermudah investasi.
5. Kepedulian sektor swasta dan intervensi program penanganan kemiskinan dari pemerintah yang semakin meningkat.
6. Kewenangan di desa yang semakin banyak.
7. Meningkatnya wisatawan minat khusus dan dukungan dana keistimewaan.
8. Momentum perlindungan anak yang sedang ditingkatkan oleh pemerintah terkait dengan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9. Peluang penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara.
10. Semakin banyak dan terbukanya akses bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat.
11. Semakin intensifnya program pemerintah terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk.
12. Semakin meluasnya pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah.
13. Tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat.
14. Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi.

Ancaman :

1. Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.
2. Adanya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang kurang harmonis.
3. Banyaknya pendatang di wilayah perkotaan yang yang berpotensi mengakulturasi budaya setempat dan budaya pendatang.
4. Dampak buruk dari era globalisasi.
5. Ekspansi pemilik modal besar di bidang pasar modern.
6. Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.
7. Ketimpangan sosial ekonomi antar suku dan etnis yang semakin tinggi.
8. Ketimpangan sosial ekonomi nasional yang semakin meningkat.
9. Masih adanya anak putus sekolah.
10. Moratorium pegawai negeri sipil.

11. Penurunan kualitas tanah, air dan udara.
12. Persaingan tenaga kerja asing.
13. Persepsi kesetaraan gender yang belum komprehensif.
14. Potensi kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya yang relatif besar.
15. Proyeksi kenaikan alokasi dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah dan propinsi yang tidak signifikan.
16. Semakin beragamnya etnis dan suku yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
17. Semakin meningkatnya penyakit degeneratif, masih adanya angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi buruk.
18. Serbuan barang dan tenaga kerja asing sebagai akibat kebijakan MEA.
19. Tingkat kepatuhan terhadap perda yang masih kurang.

Selanjutnya penentuan strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, memadukan kelemahan dengan peluang, memadukan kekuatan dengan ancaman, dan memadukan kelemahan dengan ancaman. Dengan demikian diperoleh berbagai strategi yang merupakan hasil dari perpaduan antara unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi perpaduan analisis lingkungan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1.
STRATEGI ANTARA KEKUATAN DAN PELUANG

KEKUATAN		PELUANG		STRATEGI	
1.	Sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pemerintahan yang sudah terintegrasi.	1.	Tersedianya pedoman aturan tentang laporan kinerja, penyusunan, perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.	1.	Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
2.	Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang cukup.	2.	Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi.	2.	Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi.
3.	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang sudah terintegrasi.	3.	Semakin intensifnya program pemerintah terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk.	3.	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses desiminasi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4.	Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pengaturan jarak kelahiran.	4.	Semakin intensifnya program pemerintah terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk.	4.	Mengendalikan pertumbuhan penduduk.
5.	Prasarana, sarana pendidikan dan kompetensi pendidik yang memadai.	5.	APK dan APM tingkat satuan pendidikan yang cukup tinggi.	5.	Meningkatkan nilai kelulusan siswa.
6.	Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kubu Raya.	6.	Semakin meluasnya pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah.	6.	Mengembangnya Koperasi.
				7.	Meningkatkan nilai ekspor.
7.	Potensi pariwisata yang belum dikelola secara maksimal.	7.	Tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat.	8.	Meningkatkan pariwisata berkelanjutan.
				9.	Meningkatkan diversifikasi produk sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian.
8.	Kesadaran berpolitik warga masyarakat yang semakin meningkat.	8.	Semakin banyak dan terbukanya akses bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat.	10.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi.

Tabel 6.2.
STRATEGI ANTARA KELEMAHAN DAN PELUANG

KELEMAHAN		PELUANG		STRATEGI	
1.	Pengelolaan pemerintahan di desa belum maksimal.	1.	Kewenangan di desa yang semakin banyak.	1.	Penguatan kelembagaan desa.
2.	Pelayanan kepada masyarakat masih kurang efektif dan transparan.	2.	Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi.	2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3.	Nilai kelulusan siswa yang belum optimal.	3.	APK dan APM tingkat satuan pendidikan yang cukup tinggi.	3.	Meningkatkan nilai kelulusan siswa.
4.	Belum optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan.	4.	Kebijakan pemerintah pusat mempermudah investasi.	4.	Meningkatkan peluang investasi daerah.
5.	Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Kubu Raya.	5.	Peluang penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara.	5.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
6.	Ketersediaan fasilitas penunjang perekonomian yang masih perlu ditingkatkan.	6.	Arahan kebijakan nasional mengenai pembangunan infrastruktur.	6.	Mengembangkan fasilitas perhubungan.
7.	Masih adanya kawasan kumuh.			7.	Meningkatkan pengelolaan kawasan kumuh.
8.	Angka kemiskinan dan penyandang masalah sosial yang masih cukup tinggi.	7.	Kepedulian sektor swasta dan intervensi program penanganan kemiskinan dari pemerintah yang semakin meningkat.	8.	Meningkatkan penanganan kemiskinan.
9.	Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum terlaporkan.	8.	Momentum perlindungan anak yang sedang ditingkatkan oleh pemerintah terkait dengan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	9.	Meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
10.	Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.	9.	Meningkatnya wisatawan minat khusus dan dukungan dana keistimewaan.	10.	Meningkatkan pelestarian terhadap cagar budaya.

Tabel 6.3.
STRATEGI ANTARA KEKUATAN DAN ANCAMAN

KEKUATAN		ANCAMAN		STRATEGI	
1.	Adanya Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi.	1.	Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.	1.	Pendampingan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
2.	Adanya potensi pendapatan asli daerah yang masih dapat dimaksimalkan.	2.	Proyeksi kenaikan alokasi dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah dan provinsi yang tidak signifikan.	2.	Meningkatkan pendapatan asli daerah.
3.	Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang cukup.	3.	Moratorium pegawai negeri sipil.	3.	Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi.
4.	Tersedianya produk hukum daerah.	4.	Adanya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang kurang harmonis.	4.	Sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah.
5.	Prasarana dan sarana kesehatan yang cukup memadai.	5.	Semakin meningkatnya penyakit degeneratif, masih adanya angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi buruk.	5.	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6.	Prasarana dan sarana pendidikan yang memadai.	6.	Masih adanya anak putus sekolah.	6.	Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikan.
7.	Tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif tinggi.	7.	Persaingan tenaga kerja asing.	7.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
8.	Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat.	8.	Potensi kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya yang relatif besar.	8.	Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan prasarana dan sarana menuju kemandirian.
9.	Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang sudah mencapai 30%.	9.	Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.	9.	Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau.
10.	Meningkatnya indeks pembangunan gender.	10.	Persepsi kesetaraan gender yang belum komprehensif.	10.	Mempercepat pengarusutamaan gender.
11.	Kesadaran berpolitik masyarakat yang semakin meningkat.	11.	Ketimpangan sosial ekonomi antar suku dan etnis yang semakin tinggi.	11.	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan.

Tabel 6.4.
STRATEGI ANTARA KELEMAHAN DAN ANCAMAN

KELEMAHAN		ANCAMAN		STRATEGI	
1.	Pengelolaan pemerintahan di desa yang belum maksimal.	1.	Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.	1.	Meningkatkan pengawasan Pemerintah Desa.
2.	Tersedianya produk hukum daerah.	2.	Tingkat kepatuhan terhadap perda yang masih kurang.	2.	Mengoptimalkan tindak lanjut pelanggaran perda.
3.	Belum semua anggota masyarakat tercakup dalam layanan jaminan kesehatan.	3.	Semakin meningkatnya penyakit degeneratif, masih adanya angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi buruk.	3.	Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat.
4.	Masih minimnya minat baca masyarakat.	4.	Dampak buruk dari era globalisasi.	4.	Mengembangkan budaya baca.
5.	Perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang belum maksimal.	5.	Serbuan barang dan tenaga kerja asing sebagai akibat kebijakan MEA.	5.	Meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan UMKM.
		6.	Ekspansi pemilik modal besar di bidang pasar modern.	6.	Meningkatkan infrastruktur perekonomian.
6.	Masih tingginya pengangguran di Kabupaten Kubu Raya	7.	Serbuan barang dan tenaga kerja asing sebagai akibat kebijakan MEA.	7.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
7.	Keterampilan tenaga kerja yang belum optimal.				
8.	Angka kemiskinan dan penyandang masalah sosial yang masih cukup tinggi.	8.	Ketimpangan sosial ekonomi nasional yang semakin meningkat.	8.	Meningkatkan penanganan kemiskinan.
9.	Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang masih terbatas.	9.	Potensi kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya yang relatif besar.	9.	Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan prasarana dan sarana menuju kemandirian.
10.	Penanganan terhadap sampah dan limbah yang belum optimal.	10.	Penurunan kualitas tanah, air dan udara.	10.	Melaksanakan percepatan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup.
11.	Belum ditetapkan RDTR menjadi produk hukum daerah.	11.	Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.	11.	Meningkatkan pengelolaan tata ruang.
12.	Belum optimalnya keberadaan forum keagamaan dan antar etnis.	12.	Semakin beragamnya etnis dan suku yang ada di Kabupaten Kubu Raya.	12.	Meminimalkan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam.
13.	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi.	13.	Banyaknya pendatang di wilayah perkotaan yang berpotensi mengakulturasi budaya setempat dan buadaya pendatang.	13.	Meningkatkan pelestarian terhadap tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya.

Strategi dituangkan secara lebih rinci, yang dibagi ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 5, berdasarkan pendekatan urusan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*)

1) Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan :

   Strategi pertama : melakukan peningkatan pembangunan zona integritas pada unit kerja. Strategi kedua : melakukan peningkatan nilai SAKIP pada unit kerja. Strategi ketiga : melakukan peningkatan SKPD yang mampu memenuhi WTP. Strategi keempat : melakukan peningkatan SKPD yang mampu menyusun standar pelayanan. Strategi kelima : melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Strategi keenam : melakukan peningkatan pematangan penerapan SPIP pada OPD.

Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreatifitas

1) Urusan Pendidikan :

   Strategi pertama : melakukan peningkatan nilai Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). Strategi kedua : melakukan peningkatan nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Strategi ketiga : melakukan peningkatan nilai Rata-rata nilai kelulusan. Strategi keempat : melakukan peningkatan jumlah sekolah yang terakreditasi "A".

2) Urusan Kesehatan :

   Strategi pertama : melakukan peningkatan nilai Angka Harapan Hidup (AHH). Strategi kedua : melakukan penurunan nilai Angka Kematian Ibu (AKI). Strategi ketiga : melakukan penurunan nilai Angka Kematian Bayi (AKB). Strategi keempat : melakukan peningkatan jumlah Puskesmas "ISO". Strategi kelima : melakukan penurunan angka Total Fertility Rate (TFR). Strategi keenam : melakukan peningkatan jumlah peserta KB aktif dan KB mandiri. Strategi ketujuh : melakukan peningkatan jumlah keluarga sejahtera.

3) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

Strategi pertama : melakukan peningkatan jumlah kelompok wirausaha mandiri yang mengembangkan inovasi dan produk unggulan daerah. Strategi kedua : melakukan peningkatan jumlah wirausaha yang mampu mengolah budaya dan produk local menjadi budaya dan produk yang memiliki daya jual tinggi di pasaran nasional/internasional.

4) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

Strategi pertama : melakukan peningkatan kesadaran masyarakat akan ketaatan terhadap aturan. Strategi kedua : melakukan peningkatan jumlah kasus pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti. Strategi keempat : melakukan penurunan jumlah kasus criminal. Strategi kelima : melakukan penurunan jumlah kejadian konflik sara.

Misi 3 : Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah

1) Urusan Pendidikan :

Strategi pertama : melakukan peningkatan nilai Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). Strategi kedua : melakukan peningkatan nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Strategi ketiga : melakukan peningkatan nilai Rata-rata nilai kelulusan. Strategi keempat : melakukan peningkatan jumlah sekolah yang terakreditasi "A".

2) Urusan Kesehatan :

Strategi pertama : melakukan peningkatan nilai Angka Harapan Hidup (AHH). Strategi kedua : melakukan penurunan nilai Angka Kematian Ibu (AKI). Strategi ketiga : melakukan penurunan nilai Angka Kematian Bayi (AKB). Strategi keempat : melakukan peningkatan jumlah Puskesmas "ISO". Strategi kelima : melakukan penurunan angka Total Fertility Rate (TFR). Strategi keenam : melakukan peningkatan jumlah peserta KB aktif dan KB mandiri. Strategi ketujuh : melakukan peningkatan jumlah keluarga sejahtera.

3) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

Strategi pertama : melakukan peningkatan jumlah kelompok wirausaha mandiri yang mengembangkan inovasi dan produk unggulan daerah. Strategi kedua : melakukan peningkatan jumlah wirausaha yang mampu mengolah budaya dan produk local menjadi budaya dan produk yang memiliki daya jual tinggi di pasaran nasional/internasional.

4) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : Strategi pertama : melakukan peningkatan kesadaran masyarakat akan ketaatan terhadap aturan. Strategi kedua : melakukan peningkatan jumlah kasus pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti. Strategi keempat : melakukan penurunan jumlah kasus criminal. Strategi kelima : melakukan penurunan jumlah kejadian konflik sara.

Misi 4 : Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat

1) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
Strategi pertama : melakukan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik. Strategi kedua : melakukan peningkatan jumlah jembatan yang diperbaiki dan dibangun. Strategi ketiga : melakukan peningkatan jumlah desa yang teraliri listrik. Strategi keempat : melakukan peningkatan jumlah ketersediaan rumah layak huni.
2) Urusan Perhubungan :
Strategi pertama : melakukan peningkatan jumlah desa yang terhubung jaringan telekomunikasi. Strategi kedua : melakukan peningkatan jumlah dermaga dalam kondisi mantap.
3) Urusan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah :
Strategi pertama : melakukan peningkatan jumlah kesesuaian tata ruang. Strategi kedua : melakukan peningkatan informasi tata ruang wilayah (RTRW dan RDTR).
4) Urusan Lingkungan Hidup :
Strategi pertama : melakukan peningkatan jumlah wilayah yang dilayani air bersih. Strategi kedua : melakukan peningkatan jumlah wilayah yang mempunyai system pengelolaan air limbah. Strategi pertama : melakukan penurunan tingkat pencemaran lingkungan hidup. Strategi kedua : melakukan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup.

Tabel 6.5.
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
KABUPATEN KUBU RAYA

VISI : Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
MISI 1 : Mewujudkan system dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*)					
T.1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	S.1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	ST.1	Meningkatkan pembangunan zona integritas pada unit kerja
		S.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	ST.2	Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja
				ST.3	Meningkatkan SKPD mampu memenuhi WTP
		S.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	ST.4	Meningkatkan SKPD mampu memenuhi standar pelayanan
				ST.5	Meningkatkan kualitas aparatur SKPD pengampu pelayanan publik
				ST.6	Mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
		S.4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	ST.7	Melakukan intensifikasi PAD unggulan
		S.5	Meningkatnya pematangan penerapan SPIP pada SKPD	ST.8	Meningkatkan kompetensi APIP
MISI 2 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreatifitas					
T.2	Terwujudnya SDM yang memiliki daya saing	S.6	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	ST.9	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
				ST.10	Meningkatkan insentif tenaga kependidikan di daerah terpencil, kepulauan dan pedalaman
				ST.11	Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan
				ST.12	Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar sekolah akreditasi "A"
		S.7	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	ST.13	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
				ST.14	Meningkatkan insentif tenaga kesehatan di daerah terpencil, kepulauan dan pedalaman
				ST.15	Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan
				ST.16	Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar puskesmas akreditasi
T.3	Meningkatkan kondisi masyarakat yang aman dan tertib	S.8	Meningkatnya kepatuhan masyarakat kepada hukum	ST.17	Melakukan pembinaan, advokasi dan penegakan produk hukum daerah
				ST.18	Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan lembaga/aparat penegak hukum
MISI 3 : Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah					
T.4	Meningkatkan perekonomian daerah	S.9	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan	ST.19	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
				ST.20	Meningkatkan kontribusi PDRB dari sektor unggulan

			masyarakat, serta menurunkan tingkat kemiskinan	ST.21	Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan antar wilayah
				ST.22	Meningkatkan produktivitas masyarakat dan lapangan usaha sektor unggulan
				ST.23	Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergisitas penanganan kemiskinan
		S.10	Meningkatnya investasi penanaman modal daerah	ST.24	Memberikan kemudahan dan insentif dalam investasi penanaman modal daerah
		S.11	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan pengendalian pertumbuhan penduduk	ST.25	Meningkatkan perluasan lapangan kerja, produktivitas, pelatihan kerja dan mutu tenaga kerja
				ST.26	Meningkatkan pembinaan, fasilitasi dan kemitraan dengan lembaga/tokoh masyarakat/tokoh agama dalam program Keluarga Berencana
		S.12	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, UMKM dan pariwisata	ST.27	Meningkatkan produktivitas lahan pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa
				ST.28	Mengembangkan destinasi wisata dan promosi pariwisata/keunikan daerah
MISI 4 : Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat					
T.5	Meningkatkan kapasitas infrastruktur, tata ruang dan konektivitas wilayah	S.13	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	ST.29	Meningkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
				ST.30	Memfasilitasi dan mengembangkan pembangunan kawasan pemukiman dan perumahan layak huni
		S.14	Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah	ST.31	Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah sesuai pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW
		S.15	Meningkatnya layanan air bersih dan persampahan	ST.32	Meningkatkan dan mengembangkan sarana, prasarana dan pengelolaan air bersih
				ST.33	Meningkatkan dan mengembangkan sarana, prasarana dan pengelolaan persampahan
		S.16	Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup	ST.34	Meningkatkan pencegahan, pengawasan, penanggulangan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
				ST.35	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan Lingkungan Hidup

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan

merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan proses pendefinisian visi dan misi untuk memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah agar lebih terarah kepada pencapaian tujuan daerah.

Misi 1 : Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*)

Arah kebijakan :

1) Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur teknis dan fungsional;
2) Pengkajian dan evaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD);
3) Penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi;
4) Memberikan porsi pembiayaan pembangunan berbasis perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis secara proporsional dan akuntabel;
5) Memberikan akses informasi system perencanaan pembangunan berbasis Informasi Teknologi (IT);
6) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
7) Mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8) Peningkatan pelayanan publik yang kompeten dan berorientasi pada pemanfaatan IT dalam proses kerja;
9) Membentuk unit layanan pengaduan yang responsive dan akuntabel;
10) Memberikan kemudahan/fasilitas dalam layanan pengaduan dan pelayanan publik.

Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreatifitas

Arah kebijakan :

1) Melaksanakan Wajib Belajar 9 Tahun dan Perintisan wajib Belajar 12 Tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat;
2) Pemenuhan hak-hak pendidikan bagi siswa miskin;
3) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak;
4) Pemerataan jumlah sekolah;
5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik;
6) Menempatkan tenaga pendidik berkualitas secara merata;
7) Membangun sekolah keguruan;

8) Menyediakan sarana penunjang/fasilitas bagi sekolah kejuruan;
9) Memberikan insentif pendidikan bagi penduduk miskin;
10) Mengkampanyekan pentingnya pendidikan;
11) Menerapkan Jaminan Perlindungan Sosial terhadap masyarakat;
12) Membangun Rumah Sakit Umum Daerah;
13) Mengembangkan dan meningkatkan puskesmas rawat inap;
14) Menguatkan dan mengembangkan kelembagaan desa siaga;
15) Menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di pedesaan;
16) Meningkatkan kualitas surveillance berbasis masyarakat;
17) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepersetaan KB mandiri;
18) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
19) Meningkatkan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat;
20) Mengembangkan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit;
21) Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat;
22) Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan seni budaya yang kreatif;
23) Meningkatkan kegiatan keagamaan masyarakat;
24) Membina kerukunan kehidupan beragama;
25) Mengembangkan lembaga pembina keagamaan;
26) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder keagamaan;
27) Memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana keagamaan.

Misi 3 : Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah

Arah kebijakan :

1) Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah;
2) Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat berbasis potensi local masyarakat;
3) Meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah;
4) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif;
5) Meningkatkan akses pemodalan bagi UMKM dan koperasi;
6) Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi, jaringan pemasaran dan penggunaan teknologi tepat guna;

7) Memfasilitasi pemenuhan standart mutu dan label halal bagi produk UMKM dan koperasi;
8) Mempermudah proses perizinan;
9) Meningkatkan infrastruktur perekonomian daerah;
10) Menginventarisasi dan mengembangkan potensi sumber daya wilayah dan produk unggulan daerah;
11) Meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja;
12) Meningkatkan dan mengembangkan diversifikasi usaha;
13) Mengembangkan dan meningkatkan manajemen pelaku usaha untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah;
14) Mengembangkan usaha-usaha ekonomi kreatif bagi masyarakat;
15) Mengembangkan kawasan-kawasan sentra industri;
16) Memperluas lapangan pekerjaan dan berusaha;
17) Mengembangkan pemanfaatan tata ruang kawasan potensi ekonomi cepat tumbuh berbasis daya dukung lingkungan;
18) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung percepatan pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi cepat tumbuh;
19) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
20) Melakukan perlindungan/konservasi terhadap Sumber Daya Alam yang rawan kepunahan;
21) Meningkatkan ketersediaan kualitas pangan dan cadangan pangan yang berkelanjutan;
22) Meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian;
23) Membangunan dan meningkatkan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan;
24) Mengembangkan kawasan budi daya untuk ketahanan pangan;
25) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan;
26) Mengembangkan sentra-sentra produksi hasil pertanian;
27) Mengembangkan kawasan agropolitan dan agroindustri;
28) Membangun infrastruktur pendukung kawasan pusat agrobisnis dan agroindustri;
29) Mengembangkan kawasan produksi kelautan dan perikanan;
30) Meningkatkan sarana dan prasarana produksi kelautan dan perikanan;
31) Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan.

Misi 4 : Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat

Arah kebijakan :

1) Pengembangan sistem sarana dan prasarana transportasi terpadu untuk mendukung pertumbuhan wilayah;
2) Peningkatan aksesibilitas pusat-pusat permukiman;
3) Peningkatan akses dan membuka isolasi wilayah sebagai sentra produksi dan akses pasar;
4) Pengembangan, peningkatan dan fasilitas penyediaan prasarana dan layanan komunikasi dan informasi;
5) Pengembangan jaringan listrik PLN bagi daerah yang masih terisolir;
6) Pengembangan energi alternatif dari potensi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan;
7) Peningkatan cakupan pelayanan air bersih yang merata dan berkualitas;
8) Pengembangan, pengolahan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana air limbah;
9) Pengembangan dan perlindungan sumber-sumber air baku untuk air bersih;
10) Menyediakan, membangun, meningkatkan dan memelihara infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman;
11) Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni;
12) Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman;
13) Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan;
14) Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
15) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
16) Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
17) Meningkatkan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup;
18) Meningkatkan kapasitas dan kelambagaan pengelolaan lingkungan hidup;
19) Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.
20) Penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan;
21) Penguatan kelembagaan koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat;
22) Penetapan ruang terbuka hijau;
23) Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

24) Pembangunan tempat penampungan sampah sementara yang representatif;
25) Pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) persampahan yang layak;
26) Penambahan, pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan;
27) Pengembangan pengolahan persampahan sebagai sumberdaya ekonomi;
28) Penambahan petugas pengelola persampahan;
29) Memberikan jaminan dan perlindungan sosial dan kesejahteraan petugas pengelola persampahan.

Tabel 6.6.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015-2019

Arah Kebijakan				
Tahun 2015	**Tahun 2016**	**Tahun 2017**	**Tahun 2018**	**Tahun 2019**
Melanjutkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2014 dengan mengedepankan peningkatan infrastruktur wilayah, kualitas sumberdaya manusia, serta mengefektifkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan terbuka.	Melanjutkan dan meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur wilayah, sarana prasarana pemerintahan, pelayanan sosial dasar serta memperkuat dan memantapkan pelaksanaan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan terbuka.	Melanjutkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016 dengan menitikberatkan pada peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan didukung infrastruktur wilayah yang layak.	Melanjutkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017 dengan lebih memfokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah, pengembangan wilayah dan pusat pertumbuhan baru.	Melanjutkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 dengan meningkatkan eksistensi dan ekspansi terhadap kemajuan, keunggulan, keharmonisan dan daya saing daerah yang sudah dicapai.

6.3. Program Pembangunan

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Tabel 6.7.
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perubahan		
				Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Misi 1 : Mewujudkan Sistem Dan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Baik Dan Berwibawa (Good Governance)											
	Tujuan :											
	T.1 Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Berwibawa											
	Sasaran :											
	S.1 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi										
	Program :											
	1 Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	32.537,82	100%	35.281,29	100%	42.821,16	100%	42.821,16	Seluruh SKPD
	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4.936,09		5.308,64		5.815,73		5.815,73	Seluruh SKPD
	3 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100%	93.560,51	100%	88.471,94	100%	83.510,26	100%	83.510,26	Seluruh SKPD
	4 Penataan Kelembagaan		4 kali	4 kali	59,00	4 kali	59,00	4 kali	59,00	4 kali	59,00	Sekretariat Daerah
	5 Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Dan Aparatur Pemerintah Daerah		100%	100%	2.969,34	100%	3.266,27	100%	3.592,90	100%	3.592,90	Bag. Organisasi dan Bag. Administrasi Setda
	6 Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur				3.797,91		4.020,50		4.422,55		4.422,55	BKPSDM dan Seluruh SKPD
	7 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis				968,00		1.064,80		1.171,28		1.171,28	BKPSDM dan Seluruh SKPD
	8 Peningkatan Kesejahteraan Aparatur				272,55		299,48		329,42		329,42	BKPSDM dan Seluruh SKPD
	9 Penataan Peraturan Perundang-Undangan				2.349,00		2.349,00		2.349,00		2.349,00	Sekretariat DPRD, Bag. Hukum dan

																HAM Setda
					10	Peningkatan Disipilin Aparatur		100%	100%	1.783,19	100%	1.918,90	100%	2.048,66	100%	2.048,66	Seluruh SKPD
					11	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi / Data Base				2.023,73		2.095,00		2.512,85		2.512,85	Seluruh SKPD
					12	Penataan Kecamatan / Kelurahan				127,70		140,00		145,00		145,00	Bag. Pemerintahan Setda; Dinsospemdes
					13	Pemberdayaan Kecamatan				3.602,25		3.694,52		3.787,85		3.787,85	Sekretariat Daerah; Kecamatan
					14	Peningkatan Kapasitas Camat		85%	90%	100,00	90%	100,00	95%	100,00	95%	100,00	Kecamatan
					15	Pendidikan Kedinasan		98%	98%	523,08	98%	575,39	98%	632,93	98%	632,93	BKPSDM
				S.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan		Nilai SAKIP										
							Opini BPK										
					Program :												
					1	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	100%	3.391,07	100%	3.679,24	100%	3.987,89	100%	3.987,89	Seluruh SKPD
					2	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				53.982,24		84.133,89		109.319,18		109.319,18	Seluruh SKPD
					3	Perencanaan Pembangunan Daerah				53.094,85		52.125,13		102.773,76		102.773,76	Seluruh SKPD
					4	Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten											BPKAD
				S.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)										
							Zona Pelayanan Publik										
							Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)										
					Program :												
					1	Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat		1 unit	1 unit	165,00	1 unit	174,00	1 unit	182,00	1 unit	182,00	Inspektorat Daerah
					2	Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan		3.000 pemohon	3.200 pemohon	1.575,00	3.300 pemohon	1.655,69	3.500 pemohon	1.905,00	3.500 pemohon	1.905,00	DPMPTSP
					3	Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu				100,00		100,00		100,00		100,00	DPMPTSP

					4	Penyiapan Perencanaan Dan Kebijakan Penanaman Modal		2 dokumen	1 dokumen	50,00	2 dokumen	400,00	3 dokumen	450	3 dokumen	450	DPMPTSP
					5	Peningkatan Kinerja Badan Usaha Daerah				415,00		215,00		215,00		215,00	Bag, Ekbang Setda
					6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		32 media informasi	42 media informasi	1.464,10	42 media informasi	1.610,51	42 media informasi	1.771,56	42 media informasi	1.771,56	Diskominfo
				S.4	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah		% Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah										
					Program :												
					1	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				42,80							
					2	Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten											BPKAD
				S.5	Meningkatnya Pematangan Penerapan SPIP Pada SKPD		Level 3										
					Program :												
					1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah				3.186,00		3.346,00		3.513,00		3.513,00	Inspektorat Daerah
					2	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan		7 orang	9 orang	203,00	9 orang	219,00	10 orang	230,00	10 orang	230,00	Inspektorat Daerah
		Misi 2 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Berkualitas Dan Memiliki Kreativitas															
		Tujuan :															
		T.2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Daya Saing														
			Sasaran :														
				S.6	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)										
							Rata-rata Lama Sekolah (RLS)										
							Rata-rata Nilai Kelulusan										
							Sekolah Terakreditasi "A"										

					Program :														
					1	Pendidikan Anak Usia Dini		90%	91%	1.916,60	92%	2.012,43	93%	2.113,05	93%	2.113,05	Disdikbud
					2	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		114	115	61.848,95	116	64.941,40	117	68.188,47	117	68.188,47	Disdikbud
					3	Pendidikan Non Formal		98,50%	98,75%	2.410,20	99,00%	2.530,71	99,25%	2.657,25	99,25%	2.657,25	Disdikbud
					4	Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		20	25	5.456,26	30	5.729,08	35	6.015,53	35	6.015,53	Disdikbud
					5	Manajemen Pelayanan Pendidikan		100%	100%	205,49	100%	215,76	100%	226,55	100%	226,55	Disdikbud
					6	Penyediaan Operasional Sekolah		75%	85%	12.732,59	95%	13.369,22	100%	14.037,68	100%	14.037,68	Disdikbud
					7	Peningkatan Kinerja Sekolah Cerdas		80%	85%	204,90	90%	215,14	95%	225,90	95%	225,90	Disdikbud
					8	Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan				1.976,12		2.074,93		2.178,68		2.178,68	Dinas Arpusda
					9	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan		2.000 e-book	3.000 e-book	152,75	4.000 e-book	160,39	5.000 e-book	168,41	5.000 e-book	168,41	Dinas Arpusda
				S.7	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan		Angka Usia Harapan Hidup											
							Angka Kematian Ibu (AKI)											
							Angka Kematian Balita (AKB)											
							% Puskesmas Terakreditasi											
					Program :														
					1	Obat Dan Perbekalan Kesehatan		92%	93%	4.747,51	94%	5.079,84	95%	5.435,42	95%	5.435,42	Dinas Kesehatan
					2	Upaya Kesehatan Masyarakat				6.776,52		7.250,87		7.758,44		7.758,44	Dinas Kesehatan
					3	Pengawasan Obat Dan Makanan		50%	60%	129,32	70%	138,38	80%	148,06	80%	148,06	Dinas Kesehatan
					4	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		98%	99%	517,77	100%	554,01	100%	592,79	100%	592,79	Dinas Kesehatan
					5	Perbaikan Gizi Masyarakat		100%	100%	310,42	100%	332,15	100%	355,40	100%	355,40	Dinas Kesehatan
					6	Penyehatan Lingkungan		65,26%	65,38%	364,04	65,45%	389,52	65,57%	416,79	65,57%	416,79	Dinas Kesehatan
					7	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular		75%	80%	1.651,23	85%	1.766,81	95%	1.890,49	95%	1.890,49	Dinas Kesehatan
					8	Standarisasi Pelayanan Kesehatan		80%	80%	43,97	80%	47,05	80%	50,35	80%	50,35	Dinas Kesehatan

					9	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		23%	27%	6.419,51	31%	6.868,88	36%	7.349,70	36%	7.349,70	Dinas Kesehatan
					10	Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Pustu Dan Jaringannya				10.764,31		11.517,82		12.324,06		12.324,06	Dinas Kesehatan
					11	Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		25%	50%	1.286,42	80%	1.376,47	100%	1.472,82	100%	1.472,82	Dinas Kesehatan
					12	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		95%	95%	1.300,00	95%	1.400,00	95%	1.500,00	95%	1.500,00	Dinas Kesehatan
					13	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		81%	82%	340,39	83%	364,22	84%	389,71	84%	389,71	Dinas Kesehatan
					14	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		5	10	120,00	15	130,00	20	140,00	20	140,00	Dinas Kesehatan
					15	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak				522,50		559,08		598,21		598,21	Dinas Kesehatan
					16	Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Kesehatan		1 kegiatan	1 kegiatan	271,08	1 kegiatan	290,05	1 kegiatan	310,36	1 kegiatan	310,36	Dinas Kesehatan
		T.3	Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Aman Dan Tertib														
			Sasaran :														
			S.8	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Kepada Hukum			% Permasalahan Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) Yang terselesaikan										
							Angka Kriminal										
				Program :													
					1	Peningkatan Kenyamanan Dan Keamanan Lingkungan		14 lokasi PKL	16 lokasi PKL	2.172,10	18 lokasi PKL	2.324,10	20 lokasi PKL	2.486,70	20 lokasi PKL	2.486,70	Satpol PP
					2	Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat Dan Pencegahan Tidak Kriminal				25,60		27,00		28,80		28,80	Satpol PP
					3	Pengembangan Wawasan Kebangsaan		1 kali	1 kali	206,08	1 kali	220,51	1 kali	235,94	1 kali	235,94	Kesbangpol; Disdikbud; Disporapar
					4	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		1 kali	1 kali	166,01	1 kali	177,63	1 kali	190,07	1 kali	190,07	Kesbangpol; Disdikbud; Disporapar
					5	Pemberdayaan Masyarakat		1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		Kesbangpol

						Untuk Ketertiban Dan Keamanan											
					6	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		4 kali razia	4 kali razia	49,00	4 kaii razia	52,00	4 kali razia	55,00	4 kali razia	55,00	Satpol PP
					7	Pendidikan Politik Masyarakat		2 kali	2 kali	366,37	2 kali	392,01	2 kali	419,45	2 kali	419,45	Kesbangpol
					8	Kewaspadaan Dini/Daerah		2 kali	2 kali	446,51	2 kali	477,77	2 kali	511,21	2 kali	511,21	Kesbangpol
					9	Penerapan Dan Penegakan Produk Hukum Daerah		2 kali sosialisasi	2 kali sosialisasi	24,50	2 kali sosialisasi	26,20	2 kali sosialisasi	28,00	2 kali sosialisasi	28,00	Satpol PP
					10	Pencegahan Dini Dan Penanggulanagan Korban Bencana Alam		40%	60%	8.232,00	80%	10.878,00	100%	14.205,00	100%	14.205,00	BPBD
					11	Penanggulangan Kedaruratan Bencana		100%	100%	1.149,50	100%	1.264,45	100%	2.713,30	100%	2.713,30	BPBD
			Misi 3 : Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah														
			Tujuan :														
			T.4	Meningkatkan Perekonomian Daerah													
				Sasaran :													
				S.9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Pendapatan Masyarakat, Serta Menurunkan Tingkat Kemiskinan		% Pertumbuhan Ekonomi										
							Indeks Gini										
							Pendapatan Per Kapita Per Tahun										
							% Tingkat Kemiskinan										
					Program :												
					1	Perencanaan Pembangunan Ekonomi		7 dokumen	7 dokumen	1.908,75	7 dokumen	2.004,19	7 dokumen	2.104,40	7 dokumen	2.104,40	Bappeda
					2	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		1 kegiatan	1 kegiatan	662,01	1 kegiatan	750,00	1 kegiatan	662,01	1 kegiatan	662,01	Bappeda
					3	Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam		2 dokumen	1 dokumen	350,00	2 dokumen	600,00	1 dokumen	300,00	1 dokumen	300,00	Bappeda
					4	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		77 kelompok	85 kelompok	3.920,00	95 kelompok	4.050,00	120 kelompok	4.180,00	120 kelompok	4.180,00	Dinas Perikanan
					5	Peningkatan Kehidupan Nelayan		400 orang	500 orang	300,00	600 orang	400,00	700 orang	500,00	700 orang	500,00	Dinas Perikanan
					6	Peningkatan Kesejahteraan Petani		5%	5%	401,62	5%	481,94	7%	578,33	7%	578,33	Dinas Pertanian
					7	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan		5%	5%	72,00	5%	86,40	5%	103,68	5%	103,68	Dinas Pertanian
					8	Pemasaran Hasil Produksi											DKP3

						Pertanian											
					9	Pemberdayaan Pengolahan Hasil Perikanan				60,00		65,00		30,00		30,00	Dinas Perikanan
					10	Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan		20%	30%	50,00	40%	50,00	50%	50,00	50%	50,00	Dinkop UMPP
					11	Pengembangan Kelembagaan Pedagang Kaki Lima		3 kelompok	3 kelompok	20,00	3 kelompok	20,00	3 kelompok	20,00	3 kelompok	20,00	Dinkop UMPP
				S.10	Meningkatnya Investasi Penanaman Modal Daerah		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional										
							Jumlah Investor Berskala Nasional										
					Program :												
					1	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi				154,72		155,00		215,00		215,00	DPMPTSP; Bappeda
					2	Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah				200,00		150,00		250,00		250,00	DPMTSP
				S.11	Menurunnya Tingkat Pengangguran Dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk		Tingkat Pengangguran Terbuka										
							Laju Pertumbuhan Penduduk										
					Program :												
					1	Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja		10%	10%	200,00	10%	250,00	10%	300,00	10%	300,00	Dinas Nakertrans
					2	Peningkatan Kesempatan Kerja		10%	10%	150,00	10%	200,00	10%	250,00	10%	250,00	Dinas Nakertrans
					3	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		10%	10%	200,00	10%	250,00	10%	300,00	10%	300,00	Dinas Nakertrans
					4	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan											Dinas Nakertrans
					5	Keluarga Berencana		65%	65%	330,75	65%	330,75	65%	350,00	65%	350,00	DP3AP2KB
					6	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan KB		61%	70%	30,00	80%	30,00	90%	30,00	90%	30,00	DP3AP2KB
					7	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri		2 tahap	2 tahap	1.476,79	2 tahap	1.550,70	2 tahap	1.550,70	2 tahap	1.550,70	DP3AP2KB
				S.12	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, UMKM, Dan Pariwisata		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB										
							Kontribusi Sektor										

							Hortikultura Berkelanjutan										
						14	Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal				5.218,48		5.740,33		6.314,36		6.314,36	DKP3
						15	Penciptaan Teknologi Tepat Guna Dan Varietas Unggul Spesifikasi Lokal		228.944 ton padi	234.667 ton padi	2.834,61	240.534 ton padi	3.118,07	246.547 ton padi	3.429,87	246.547 ton padi	3.429,87	Dinas Pertanian
						16	Perlindungan Perkebunan											DKP3
						17	Pengembangan Budidaya Perikanan		2.869 ton ikan	3.156 ton ikan	125,00	3.472 ton ikan	150,00	3.819 ton ikan	150,00	3.819 ton ikan	150,00	Dinas Perikanan
						18	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan		6	6	330,00	7	330	7	330	7	330	Dinas Perikanan
						19	Pemberdayaan Penyuluh Perikanan		3 P2MKP	3 P2MKP	700,00	3 P2MKP	700,00	3 P2MKP	700,00	3 P2MKP	700,00	Dinas Perikanan
						20	Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan				180,00		210,00		210,00		210,00	Dinas Perikanan
						21	Pengembangan Sarana Prasarana Pemasaran Pengolahan Hasil Perikanan		2.148 ton ikan	2.362 ton ikan	2.900,00	2.559 ton ikan	2.950,00	2.859 ton ikan	3.000,00	2.859 ton ikan	3.000,00	Dinas Perikanan
						22	Promosi Perikanan		3	3	550,00	3	550,00	1	575,00	1	575,00	Dinas Perikanan
						23	Pengembangan Pemasaran Pariwisata		49 event	51 event	545,00	58 event	550,00	65 event	745,00	65 event	745,00	Disporapar
						24	Pengembangan Destinasi Pariwisata		14 kegiatan	17 kegiatan	1.175,00	20 kegiatan	1.170,00	23 kegiatan	1.060,00	23 kegiatan	1.060,00	Disporapar
						25	Pengembangan Kemitraan		18 kegiatan	22 kegiatan		27 kegiatan		32 kegiatan		32 kegiatan		Disporapar
						26	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif				145,00		165,00		175,00		175,00	Disporapar
						27	Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan				70,00		75,00		80,00		80,00	Dinkop UMPP
						28	Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor				36,50		40,00		40,00		40,00	Dinkop UMPP
						29	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				791,00		872,00		954,00		954,00	Dinkop UMPP
						30	Penataan Sarana Dan Prasarana Perdagangan Dan Pedagang Di Pasar Tradisional		1 dokumen									Dinkop UMPP
						31	Penyelenggaraan Metrologi		1.100	1.200	2.365,00	1.300	2.420,00	1.400	2.475,00	1.400	2.475,00	Dinkop UMPP

						Industri Pengolahan Terhadap PDRB											
						Kontribusi Sektor Jasa Terhadap PDRB											
						Kunjungan Wisata											
					Program :												
					1	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian		9 merk dagang beras	10 merk dagang beras	2.505,66	11 merk dagang beras	2.756,23	12 merk dagang beras	3.031,85	12 merk dagang beras	3.031,85	Dinas Pertanian
					2	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		2 kecamatan	2 kecamatan	190,00	2 kecamatan	208,00	-	129,60	-	129,60	Dinas Pertanian
					3	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan		3%	3%	72,00	3%	86,40	3%	108,60	3%	108,60	Dinas Pertanian
					4	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan		3 kelompok tani	4 kelompok tani	202,47	5 kelompok tani	303,71	6 kelompok tani	437,34	6 kelompok tani	437,34	Dinas Pertanian
					5	Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan		30 orang	30 orang	50,00	30 orang	50,00	30 orang	50,00	30 orang	50,00	Dinas Pertanian
					6	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan		80 orang 9 kecamatan	80 orang 9 kecamatan	800,00	80 orang 9 kecamatan	800,00	80 orang 9 kecamatan	800,00	80 orang 9 kecamatan	800,00	Dinas Pertanian
					7	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak		1	1	30,00	1	30,00	1	30,00	1	30,00	DKP3
					8	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan											DKP3
					9	Pengembangan Agribisnis		5%	7%	3.478,33	10%	4.000,00					DKP3
					10	Penyediaan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian		4%	4%	100,00	4%	100,00	4%	100,00	4%	100,00	Dinas Pertanian
					11	Pencapaian Swasembada Daging Berkelanjutan											Dinas Pertanian
					12	Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan				6.638,41		7.290,25		8.007,27		8.007,27	Dinas Pertanian
					13	Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman				5.840,51		6.419,56		7.056,51		7.056,51	Dinas Pertanian

						Legal			UTTP	UTTP		UTTP		UTTP		UTTP		
					32	Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah					626,81		626,81		626,81		626,81	Dinkop UMPP
					33	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					283,13		283,13		283,13		283,13	Dinkop UMPP
					34	Penataan Struktur Industri					166,00		166,00		166,00		166,00	Dinkop UMPP
					35	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial					587,45		587,45		587,45		587,45	Dinkop UMPP
		Misi 4 : Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat																
		Tujuan :																
		T.5	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur, Tata Ruang Dan Konektivitas															
			Sasasran :															
			S.13	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan konektivitas wilayah			Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik											
							Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik											
							Persentase darmaga kabupaten dalam kondisi baik											
							Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik											
							Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni											
					Program :													
					1	pembangunan jalan dan jembatan			46 km	46 km	115.000,00	46 km	115.000,00	46 km	115.000,00	46 km	115.000,00	Dinas PUPR
					2	pembangunan saluran drainase / gorong-gorong			60%	65%	17.290,48	70%	19.019,53	80%	20.921,49	80%	20.921,49	Dinas PUPR
					3	pembangunan turap / talud / bronjong			200 m	200 m	2.800,00	200 m	2.800,00	200 m	2.800,00	200 m	2.800,00	Dinas PUPR
					4	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan					33.983,64		35.082,00		36.290,20		36.290,20	Dinas PUPR
					5	peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan					1.200,00		1.300,00		1.400,00		1.400,00	Dinas PUPR
					6	pengembangan dan pengelolaan jaringan					55.725,00		57.610,00		57.147,50		57.147,50	Dinas PUPR

							irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya											
					7		pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya				1.450,00		1.600,00		1.760,00		1.760,00	Dinas PUPR
					8		pengendalian banjir				3.650,00		3.650,00		3.650,00		3.650,00	Dinas PUPR
					9		pembangunan infrastruktur perdesaan		60%	70%	3.864,91	80%	4.251,40	85%	4.676,54	85%	4.676,54	Dinas PUPR
					10		peningkatan penerangan jalan umum		60%	70%	4.175,58	80%	4.593,13	85%	5.052,45	85%	5.052,45	Dinas PUPR
					11		Pengembangan perumahan		70%	75%		80%		85%		85%		DPRKPLH
					12		lingkungan sehat perumahan		60%	70%	5.480,94	85%	6.029,03	80%	6.631,94	80%	6.631,94	DPRKPLH
					13		Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan (LLASDP)		5 unit	5 unit	225,00	5 unit	120,00	5 unit	120,00	5 unit	120,00	Dinas Perhubungan
					14		pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (LLASDP)		3 dokumen	2 dokumen	400,00	1 dokumen	200,00	1 dokumen	200,00	1 dokumen	200,00	Dinas Perhubungan
					15		rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas (LLAJ)				620,00		495,00		420,00		420,00	Dinas Perhubungan
					16		peningkatan pelayanan angkutan (LLAJ)				715,00		715,00		715,00		715,00	Dinas Perhubungan
					17		pembangunan sarana dan prasarana perhubungan											Dinas Perhubungan
					18		pengendalian dan pengamanan lalu lintas (LLAJ)				1.075,00		825,00		805,00		805,00	Dinas Perhubungan
					19		peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor (LLASDP)		1 dokumen	1 dokumen	60,00	1 dokumen	60,00	1 dokumen	60,00	1 dokumen	60,00	Dinas Perhubungan
					20		pengembangan dan implementasi E-Government		38 SKPD	38 SKPD	926,51	38 SKPD	926,51	38 SKPD	926,51	38 SKPD	926,51	Diskominfo
					21		implementasi LPSE		100%	100%	520,00	100%	540,00	100%	560,00	100%	560,00	Diskominfo
					22		optimalisasi peanfaatan teknologi informasi		100%	100%	100,00	100%	125,00	100%	150,00	100%	150,00	Bag. Administrasi Setda
					23		peningkatan kualitas pelayanan informasi publik				1.624,30		1.743,90		1.746,00		1.746,00	Sekretariat DPRD; Bag. Humas Setda
				S.14	Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah			Ketaatan terhadap RTRW										

					Program :										
					1	Pengembangan wilayah perbatasan		1 kegiatan	1 kegiatan	25,00	1 kegiatan	25,00	6 kegiatan	140,00	6 kegiatan	140,00	Bappeda
					2	pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		2 kegiatan	2 kegiatan	20,00	2 kegiatan	20,00	11 kegiatan	150,00	11 kegiatan	150,00	Bappeda
					3	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota menengah dan besar		8 kali koordinasi	8 kali koordinasi	96,00	8 kali koordinasi	106,00	8 kali koordinasi	370,00	8 kali koordinasi	370,00	Bappeda
					4	perencanaan tata ruang		2 perda	2 perda	2.465,38	2 perda	2.711,91	2 perda	2.983,11	2 perda	2.983,11	Bappeda; Dinas PUPR
					5	pemanfaatan ruang		50%	55%	888,38	60%	977,21	70%	1.074,95	70%	1.074,95	Bappeda; Dinas PUPR
					6	pengendalian pemanfaatan ruang											
				S.15	Meningkatnya layanan air bersih dan persampahan		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan										
							Persentase jumlah sampah yang tertangani										
					Program :												
					1	penyediaan dan pengolahan air baku				3.731,76		3.989,93		4.273,93		4.273,93	Dinas PUPR
					2	pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		60%	65%	10.120,35	75%	11.132,39	80%	12.245,62	80%	12.245,62	Dinas PUPR
					3	pemeliharaan kebersihan lingkungan		60%	70%	2.317,66	80%	2.549,43	85%	2.804,37	85%	2.804,37	Dinas PUPR
					4	pengadaan sarana dan prasarana sumber daya air											Dinas PUPR
					5	pengembangan kinerja pengelolaan persampahan				13.540,13		14.877,14		16.347,85		16.347,85	DPRKPLH
				S.16	Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air										
							Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara										
					Program :												

					1	pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup				3.075,00		3.115,00		3.205,00		3.205,00	DPRKPLH
					2	perlindungan dan konservasi sumber daya alam				520,00		530,00		590,00		590,00	DPRKPLH
					3	rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam				155,00		165,00		175,00		175,00	DPRKPLH
					4	peningkatan pengendalian polusi				165,00		185,00		205,00		205,00	DPRKPLH
					5	pengembangan ekosistem dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan		1 kawasan konservasi	1 kawasan konservasi	140,00	1 kawasan konservasi	160,00	1 kawasan konservasi	180, 00	1 kawasan konservasi	1180,00	DPRKPLH
					6	pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		50%	55%	2.931,67	60%	3.194,83	70%	3.484,32	70%	3.484,32	DPRKPLH

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Urusan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Program prioritas baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Bupati pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan wajib dan pilihan dapat diselenggarakan setiap tahun. Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Kubu Raya berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan Bupati.

Berkenaan dengan Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD Perubahan, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setelah program prioritas ditetapkan baik dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang peghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah yang strategis dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mengetahui Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 7.1. sebagai berikut :

Tabel 7.1.
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN KUEU RAYA TAHUN 2016-2019

No.	Uraian	Pertumbuhan %	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
2	BELANJA	**2,41%**	**1.312.796.446.926,06**	**1.464.206.276.320,00**	**1.409.939.272.716,31**	**1.497.754.289.960,26**
2.1	Belanja Tidak Langsung	**6,10%**	**701.293.442.050,00**	**779.826.735.279,00**	**837.514.038.572,31**	**888.565.679.453,88**
2.1.1	Belanja Pegawai	**2,02%**	538.676.298.768,00	566.832.753.964,00	571.951.188.722,31	583.493.469.998,39
2.1.2	Belanja Bunga	**0,00%**			1.110.000.000,00	-
2.1.3	Belanja Subsidi	**0,00%**				-
2.1.4	Belanja Hibah	**89,83%**	8.919.439.025,00	12.856.420.000,00	61.013.208.550,00	115.820.643.070,18
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	**34,10%**	825.199.000,00	1.640.000.000,00	1.990.000.000,00	2.668.606.487,89
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	**32,53%**	-	8.209.998.600,00	19.110.696.200,00	25.327.227.446,57
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	**7,76%**	145.328.885.200,00	181.198.945.100,00	181.838.945.100,00	195.943.964.269,08
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	**-59,53%**	7.543.620.057,00	9.088.617.615,00	500.000.000,00	202.348.537,71
2.2	Belanja Langsung	**-2,18%**	**611.503.004.876,06**	**684.379.541.041,00**	**572.425.234.144,00**	**613.824.522.634,71**
2.2.1	Belanja Pegawai	**8,73%**	46.120.205.650,00	63.080.526.175,00	59.290.168.000,00	64.468.341.264,18
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	**-3,65%**	264.535.097.640,06	330.754.736.275,00	236.633.447.342,00	228.002.919.105,50
2.2.3	Belanja Modal	**-2,77%**	300.847.701.586,00	290.544.278.591,00	276.501.618.802,00	322.694.403.290,92

Berkenaan dengan indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, dapat dilihat pada Tabel 7.2. sebagai berikut :

Tabel 7.2.
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN KUBU RAYA

Bidan Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN WAJIB																				
1	Terkait Pelayanan Dasar																			
	1	Pendidikan																		
		1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun				54.484.233.702,00		32.386.740.170,00		19.557.200.195,00	-		-		-		106.428.174.067,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1	Peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket A	98,45%	98,45%		98,74%		99,72%		-		-		-		-		
			2	Peningkatan APK SD/SDLB/MI/Paket A	112,94%	112,94%		113,82%		113,82%		-		-		-		-		
			3	Peningkatan APM SMP/SMPLB/Mts/ Paket B	75,71%	75,71%		81,37%		89,08%		-		-		-		-		
			4	Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	90,89%	90,89%		92,27%		95,64%		-		-		-		-		
			5	Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	101,12%	101,12%		101,25%		102,58%		-		-		-		-		
			6	Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMA/SMALB/SMK/ MA/ Paket C	68,15%	68,15%		68,24%		68,26%		-		-		-		-		
			7	Persentase Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A	0,11%	0,11%		0,52%		0,57%		-		-		-		-		
			8	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	0,51%	0,51%		0,59%		0,67%		-		-		-		-		
			9	Persentase Angka Mengulang Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A	2,43%	2,43%		2,45%		2,43%		-		-		-		-		
			10	Persentase Angka Mengulang Sekolah SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	0,86%	0,86%		0,88%		0,86%		-		-		-		-		
			11	Persentase Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		-		-		-		-		
			12	Persentase Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	99,87%	99,87%		99,95%		99,97%		-		-		-		-		
			13	Rata-Rata Hasil Ujian SD/MI	6,39	6,39		6,43		6,56		-		-		-		-		
			14	Rata-Rata Hasil Ujian SMP/MTs	7,00	7,00		7,03		7,41		-		-		-		-		
		2	Program Pendidikan Anak Usia Dini				-		2.142.648.900,00		2.870.250.000,00		4.421.277.000,00		4.863.404.700,00		5.349.745.170,00		19.647.325.770,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1	Peningkatan APK TK/RA/PAUD	62,72%	62,72%		62,82%		62,86%		46,58%		92,00%		93,00%		93,00%		
		3	Program Pendidikan Non Formal				-		596.966.675,00		661.643.850,00		780.085.900,00		858.094.490,00		943.903.939,00		3.840.694.854,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1	Rata-Rata Lama Sekolah	6,41	6,41		6,56		6,57		6,62		6,67		6,72		6,72		
			2	Rata-rata Harapan Lama Sekolah	12,34	12,34		12,55		12,84		13,,01		13,18		13,35		13,35		
			3	Angka Melek Huruf	97,68%	97,68%		97,74%		97,75%		97,76%		99,00%		99,25%		99,25%		
		4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				-		3.202.397.350,00		1.710.346.300,00		2.800.149.100,00		2.786.686.210,00		3.065.354.831,00		13.564.933.791,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1	Persentase Guru Yang Berkualifikasi S1/D4	56,82%	56,82%		66,73%		76,58%		78,56%		90,00%		94,00%		94,00%		
			2	Persentase Guru Yang Bersertifikasi Pendidik	26,51%	26,51%		32,44%		33,49%		34,86%		70,00%		75,00%		75,00%		
			3	Persentase Sekolah Yang Terakreditasi	10,12%	10,12%		10,38%		11,04%		12,82%		80,00%		80,00%		80,00%		

		5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			223.433.856,00		1.956.055.400,00		5.085.153.950,00		5.319.292.500,00		5.684.131.750,00		6.252.544.925,00		24.520.612.381,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1	Persentase Sekolah Yang Menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
		6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			34.951.424,00		10.915.000,00		-		4.281.500,00		12.100.000,00		13.310.000,00		75.557.924,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1	Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		-	2,00		5,00		5,00		17,00		
		7	Program Peningkatan Kinerja Sekolah Cerdas			-		180.000.000,00		172.470.000,00		180.000.000,00		198.000.000,00		217.800.000,00		948.270.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1	Jumlah Sekolah Berprestasi	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data	5,00		5,00		5,00		25,00		
		8	Program Pendidikan Sekolah Dasar			-		-		-		60.454.881.629,00		21.967.637.120,00		24.164.400.832,00		106.586.919.581,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1	Peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket A	-	-		-		-	91,61%		95,00%		97,00%		97,00%		
			2	Peningkatan APK SD/SDLB/MI/Paket A	-	-		-		-	101,61%		100,00%		100,00%		100,00%		
			3	Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	-	-		-		-	111,52%		100,00%		100,00%		100,00%		
			4	Persentase Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A	-	-		-		-	0,83%		0,20%		0,10%		0,10%		
			5	Persentase Angka Mengulang Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A	-	-		-		-	2,42%		2,42%		2,40%		2,40%		
			6	Persentase Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A	-	-		-		-	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			7	Rata-Rata Hasil Ujian SD/MI	-	-		-		-	5,68		7,30		7,40		7,40		
		9	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		-		-		27.982.581.227,00		12.196.373.090,00		13.416.010.399,00		53.594.964.716,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1	Peningkatan APM SMP/SMPLB/Mts/ Paket B	-	-		-		-	91,00%		93,00%		95,00%		95,00%		
			2	Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	-	-		-		-	90,02%		99,00%		100,00%		100,00%		
			3	Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMA/SMALB/SMK/ MA/ Paket C	-	-		-		-	74,67%		100,00%		100,00%		100,00%		
			4	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	-	-		-		-	1,69%		0,59%		0,56%		0,56%		
			5	Persentase Angka Mengulang Sekolah SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	-	-		-		-	0,84%		0,82%		0,80%		0,80%		
			6	Persentase Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	-	-		-		-	98,43%		100,00%		100,00%		100,00%		
			7	Rata-Rata Hasil Ujian SMP/MTs	-	-		-		-	5,06		7,10		7,30		7,30		
	2	**Kesehatan**																	
		1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			8.999.069.156,00		5.909.273.380,00		9.399.072.015,00		39.270.577.003,00		47.005.763.934,00		65.424.712.125,00		176.008.467.613,00	Dinas Kesehatan
			1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Belum Ada Data	Belum Ada Data		72,00%		74,00%	76,00%		78,00%		80,00%		80,00%		
			2	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data		71,00%		72,00%	73,00%		74,00%		75,00%		75,00%		
			3	Cakupan Kunjungan Nifas Lengkap (KF3)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		80,00%		82,00%	84,00%		88,00%		90,00%		90,00%		
			4	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN1)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		75,00%		78,00%	81,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
			5	Cakupan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah	Belum Ada Data	Belum Ada Data		30,00%		40,00%	50,00%		55,00%		60,00%		60,00%		
			6	Persentase Penderita Gangguan Jiwa Bebas Pasung	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		

			7	Cakupan Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
			8	Proporsi Bebas Caries Gigi Pada Usia 6 Tahun	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		85,00%		100,00%		100,00%		
			9	Persentase Puskesmas Melaksanakan Program UKCS	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
			10	Persentase Puskesmas Melaksanakan Screening Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
			11	Persentase Puskesmas Melaksanakan Pemeriksaan dan Surveilans Jamaah Haji	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita				249.742.600,00		352.273.875,00		163.860.000,00		285.292.000,00		200.540.800,00		191.930.841,00		1.443.640.116,00	Dinas Kesehatan
			1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi (Kunjungan Bayi)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		90,00%		95,00%		100,00%		100,00%		
			2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		85,00%		90,00%		95,00%		95,00%		
			3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		90,00%		95,00%		100,00%		100,00%		
		3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				3.747.433.590,00		4.164.677.650,00		2.544.611.440,00		3.696.418.284,00		5.126.122.300,00		5.457.578.197,00		24.736.841.461,00	Dinas Kesehatan
			1	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	93,55%	93,55%		95,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			2	Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas	47,38%	45,00%		50,00%		55,00%		60,00%		60,00%		70,00%		70,00%		
			3	Rasio Kebutuhan : Ketersediaan Obat	93,55%	93,55%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			4	Persentase Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			5	Persentase Apotek, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan Yang Memiliki Izin	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			6	Persentase Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Berizin	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
		4	Program Pengawasan Obat dan Makanan				80.785.936,00		150.048.000,00		24.602.800,00		46.963.000,00		146.453.000,00		164.957.009,00		613.809.745,00	Dinas Kesehatan
			1	Persentase Pengawasan Penyalahgunaan Obat dan Bahan Berbahaya di Masyarakat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		75,00%		80,00%		90,00%		90,00%		
			2	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Bagi Masyarakat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		75,00%		80,00%		90,00%		90,00%		
		5	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				9.288.591.000,00		8.152.286.331,00		8.874.845.155,00		13.473.226.500,00		46.393.110.600,00		63.996.205.282,00		150.178.264.868,00	Dinas Kesehatan
			1	Ratio Bed Rawat Inap per 10.000 Penduduk	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 : 5.250		1 : 5.100		1 : 5.000		1 : 5.000		
			2	Rasio Puskesmas, poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 : 11.000		1 : 10.500		1 : 10.000		1 : 10.000		
			3	Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		10,00		10,00		15,00		20,00		20,00		
		6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				28.002.400,00		-		37.910.000,00		-		-		44.109.593,00		110.021.993,00	Dinas Kesehatan
			1	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		Belum Ada Data		-		-		70,00%		70,00%		

				Diberikan Oleh Sarana Kesehatan (Rumah Sakit)																
			2	Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas/ Balai Pengobatan/ Praktek Bersama dan Perorangan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		Belum Ada Data		-		-		90,00%		90,00%		
			3	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Terakreditasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		3,00		-		-		9,00		9,00		
			4	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		10,00		12,00		16,00		20,00		20,00		
			5	Persentase Kasus Gawat Darurat Yang Ditangani Dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	100%	100%		-		100%		100%		100%		100%		100%		
			6	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memiliki Ijin Operasional	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		Belum Ada Data		90,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
		7	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				11.072.303.214,00		21.781.484.985,00		24.744.757.000,00		7.667.634.300,00		2.250.541.000,00		1.636.427.319,00		69.153.147.818,00	Dinas Keschatan
			1	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Belum Ada Data	Belum Ada Data		1,46%		1,61%		1,95%		3,08%		4,71%		4,71%		
		8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				1.874.662.708,00		1.441.777.500,00		1.436.567.920,00		1.120.766.000,00		1.137.834.400,00		1.029.698.887,00		8.041.307.415,00	Dinas Keschatan
			1	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	100,00%	100,00%		99,20%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			2	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (TSR)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			3	Persentase Prevalensi HIV	< 0,5%	< 0,5%		< 0,5%		< 0,5%		< 0,5%		< 0,5%		< 0,5%		< 0,5%		
			4	Perentase ODHA Yang Mendapat Pengobatan ARV	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			5	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		
			6	Persentase Kasus DBD Ditangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			7	Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		< 25		< 25		< 25		< 25		
			8	Persentase Penemuan Penderita Diare	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		
			9	Jumlah Kematian Balita Karena Diare	0	0		0		0		0		0		0		0		
			10	Persentase Anak Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	70,90%	70,90%		69,70%		73,60%		90,00%		95,00%		95,00%		95,00%		
			11	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	62,90%	62,90%		67,80%		61,00%		57,60%		80,00%		85,00%		85,00%		
			12	Penemuan Kasus AFP Non Polio per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		5,00		5,00		5,00		
			13	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Yang Dilakukan Penanggulangan < 24 Jam	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			14	Angka Kesakitan Malaria (API/ 1000 Penduduk)	< 1%	< 1%		< 1%		< 1%		< 1%		< 1%		< 1%		< 1%		
			15	Persentase Penanganan Penderita Malaria	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			16	Persentase Kasus Filariasis Yang Mendapat Pengobatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		90,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

			17	Persentase Cakupan Penemuan Kasus Baru Kusta Tanpa Cacat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		95,00%		95,00%		
			18	Persentase Kasus Kusta Yang Selesai	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
		9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				312.690.500,00		462.536.500,00		105.724.250		464.926.000,00		204.196.800,00		187.514.899,00		1.737.588.949,00	Dinas Kesehatan
			1	Prevalensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		10,00		50,00		65,00		80,00		90,00		90,00		
			2	Persentase Ibu hamil KEK Yang Mendapat Makanan Tambahan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		10,00%		50,00%		65,00%		80,00%		90,00%		90,00%		
			3	Prevalensi Ibu Hamil Anemia	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		32,00		30,00		28,00		28,00		
			4	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Tambah Darah	Belum Ada Data	Belum Ada Data		85,00%		85,00%		87,00%		88,00%		90,00%		90,00%		
			5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		39,00%		42,00%		44,00%		47,00%		50,00%		50,00%		
			6	Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	Belum Ada Data	Belum Ada Data		39,00%		42,00%		44,00%		47,00%		50,00%		50,00%		
			7	Prevalensi Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		8,00		8,00		8,00		8,00		
			8	Prevalensi Kasus Balita Gizi Buruk	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		0,65%		0,65%		0,50%		0,50%		
			9	Persentase Anak Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			10	Persentase prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Baduta (Bawah 2 Tahun)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		29,10%		29,30%		34,80%		30,00%		25,00%		25,00%		
			11	Persentase Remaja Putri Yang Mendapat Tablet Tambah Darah	Belum Ada Data	Belum Ada Data		10,00%		15,00%		10,00%		15,00%		30,00%		30,00%		
			12	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Balita Usia 6-24 Tahun Dari Keluarga Miskin	Belum Ada Data	Belum Ada Data		46,00%		60,00%		75,00%		80,00%		90,00%		90,00%		
		10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				479.523.200,00		666.894.000,00		867.366.400,00		4.974.583.000,00		4.210.786.200,00		6.502.403.331,00		17.701.556.131,00	Dinas Kesehatan; Sekretariat Daerah
			1	Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	75,00%	75,00%		80,00%		85,00%		85,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
			2	Persentase Cakupan Rumah Tangga Sehat	60,00%	60,00%		65,00%		70,00%		72,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
			3	Persentase Posyandu Dengan Strata Mandiri	2,00%	2,00%		2,00%		5,00%		4,00%		5,00%		5,00%		5,00%		
		11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				278.377.120,00		262.673.500,00		157.305.500,00		208.168.000,00		72.974.200,00		55.831.141,00		1.035.329.461,00	Dinas Kesehatan
			1	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	24,00	24,00		24,00		24,00		32,00		39,00		45,00		45,00		
			2	Jumlah Desa ODF	10,00	10,00		10,00		10,00		14,00		16,00		20,00		20,00		
			3	Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	55,00%	55,00%		60,00%		65,00%		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
			4	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	60,00%	60,00%		65,00%		70,00%		75,00%		80,00%		85,00%		85,00%		
			5	Persentase Penduduk Dengan Akses Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan	60,00%	60,00%		60,00%		65,00%		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
			6	Persentase Penduduk Dengan Akses Jamban Sehat	50,00%	50,00%		60,00%		70,00%		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			7	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Lingkungan	50,00%	50,00%		60,00%		65,00%		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		

			8	Persentase Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	50,00%	50,00%		60,00%		65,00%		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
		12	Program Peningkatan Kesehatan Lansia			-		153.099.000,00		60.388.200,00		46.502.800,00		56.227.800,00		43.771.938,00		359.989.738,00	Dinas Kesehatan
			1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		95,00%		100,00%		100,00%		
		13	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			403.687.980,00		1.589.315.100,00		2.406.769.500,00		2.672.048.000,00		2.599.017.600,00		3.771.915.031,00		13.442.753.211,00	Dinas Kesehatan
			1	Cakupan Persalinan Yang Ditolong Oleh Nakes Yang Mempunyai Kompetensi Kebidanan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		90,00%		92,00%		93,00%		94,00%		95,00%		95,00%		
		14	Program Penyusunan Sistem Informasi Kesehatan			185.000.000,00		127.725.000,00		18.190.000,00		242.283.500,00		202.858.800,00		206.632.332,00		982.689.632,00	Dinas Kesehatan
			1	Penyusunan Profil Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
		15	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Kesehatan			333.258.628,00		306.777.000,00		343.959.000,00		337.377.500,00		243.970.600,00		229.217.997,00		1.794.560.725,00	Dinas Kesehatan
			1	Persentase Peningkatan Mutu Manajemen Kesehatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
		16	Program Monitoring Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya			7.188.000,00		-		-		28.111.500,00		182.305.400,00		535.628.102,00		935.538.402,00	Dinas Kesehatan
			1	Persentase Monitoring dan Pendataan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		-		85,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
	3	**Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**																		
		1	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan			137.310.438.100,00		153.760.584.675,00		190.638.180.700,00		214.335.888.902,00		252.373.898.500,00		285.044.465.592,00		1.233.463.456.469,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Rasio Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik Dan Sedang	36,00%	36,00%		44,00%		52,00%		59,00%		67,00%		75,00%		75,00%		
			2	Rasio Jembatan Kondisi Baik Dan Sedang	36,00%	36,00%		44,00%		52,00%		59,00%		67,00%		75,00%		75,00%		
			3	Kejelasan Status Jalan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		Ada		Ada		Ada		Ada		
			4	Panjang Jalan Antar Kecamatan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang	240.186 Km	240.186 Km		303.511 Km		271.300 Km		282.543 Km		294.252 Km		306.446 Km		306.446 Km		
			5	Tingkat Aksesibilitas (Panjang Jalan/Luas Wilayah)	34,38	34,38		43,45		38,84		40,45		42,12		43,87		43,87		
			6	Panjang Jalan Kawasan Perbatasan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		14.792 Km		15.931 Km		17.563 Km		17.563 Km		
			7	Tersedianya Jalan Lingkar Untuk Meningkatkan Aksesibilitas	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		Ada		Ada		Ada		Ada		
		2	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan			29.519.694.700,00		21.937.149.800,00		23.492.106.800,00		11.812.600.100,00		922.016.700,00		460.960.989,00		88.144.529.089,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan/ Jembatan Kabupaten	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		75 Km		75 Km		75 Km		BAD		
			2	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin Per Tahun	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		150 Km		150 Km		150 Km		750 Km		
			3	Jumlah Jembatan Kondisi Rusak Yang Direhabilitasi Per Tahun	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		5 Unit		5 Unit		5 Unit		25 Unit		
		3	Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan			-		-		-		63.890.676.000,00		8.330.544.000,00		3.008.093.299,00		75.229.313.299,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Rasio Panjang Jalan Rusak Akibat Bencana Yang Direhabilitasi	-	-		-		-		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		

			2	Rasio Jumlah Jembatan Rusak Akibat Bencana Yang Direhabilitasi	-	-		-		-		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
		4	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			8.695.688.100,00		6.573.503.850,00		3.091.528.000,00		3.419.669.600,00		3.110.232.500,00		2.532.157.034,00		27.422.779.084,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Rasio Drainase Jalan Kondisi Baik Dan Sedang	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		70,00%		80,00%		80,00%	
			2	Rasio Drainase Lingkungan Permukiman Kondisi Baik Dan Sedang	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		70,00%		80,00%		80,00%	
		5	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan			100.000.000,00		7.513.603.200,00		-		-		-		-		7.613.603.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Tercukupinya Sapras Kebinamargaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		-		-		-		-	
		6	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya			-		1.709.229.850,00		758.941.850,00		-		-		-		2.468.171.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Jumlah Sungai Percontohan Bebas Sampah	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		-		-		-	
			2	Persentase Panjang Sempadan Sungai Utama Berupa Ruang Terbuka Hijau	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		-		-		-	
		7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			5.285.977.350,00		3.710.216.900,00		1.740.199.000,00		8.398.384.894,00		5.933.750.000,00		6.072.535.105,00		31.141.063.249,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum Yang Aman	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%	
			2	Persentase Satuan Permukiman (RW) Yang Memiliki IPAL Komunal	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		65,00%		70,00%		70,00%	
			3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		65,00%		70,00%		75,00%		75,00%	
			4	Persentase Desa Yang Memiliki BPSPAM	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%	
		8	Program Perencanaan Tata Ruang			-		752.682.700,00		-		-		2.339.081.000,00		4.123.461.318,00		7.215.225.018	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kabupaten Kubu Raya	-	-		Belum Ada Data		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen		3 Dokumen	
		9	Program Pemanfaatan Ruang			353.689.056,00		446.095.900,00		384.842.100,00		1.564.702.500,00		1.219.118.000,00		1.561.458.938,00		5.529.906.494,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Tersedianya SOP Layanan Informasi Dan Rekomendasi Tata Ruang	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		Ada		Ada		Ada		Ada	
			2	Adanya Kebijakan Perijinan Pemanfaatan Ruang	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		Ada		Ada		Ada		Ada	
		10	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			289.807.920,00		234.404.500,00		-		395.765.500,00		347.241.500,00		363.297.130,00		1.630.516.550,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Ketaatan Terhadap RTRW	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
			2	Adanya Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		Ada		Ada		Ada		Ada	
			3	Rasio Bangunan Gedung Ber-IMB	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		75,00%		80,00%		85,00%		85,00%	
			4	Rasio Bangunan/Rumah Yang Tidak Sesuai Dengan Pemanfaatan Ruang/RDTR	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		35,00%		30,00%		25,00%		25,00%	
		11	Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum			2.480.417.639,00		3.380.330.050,00		2.515.807.700,00		17.195.329.500,00		7.776.463.500,00		9.773.128.370,00		40.857.256.759,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		75,00%		80,00%		85,00%		85,00%	
			2	Rasio Panjang Jalan Yang Sudah Mendapatkan Penerangan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		65,00%		70,00%		75,00%		75,00%	
		12	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			29.269.731.432,00		29.346.516.300,00		16.312.494.500,00		26.299.024.850,00		25.767.812.300,00		25.119.402.822,00		152.114.982.204,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

			1	Jumlah Pintu Air Dalam Kondisi Baik	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		10 Unit		15 Unit		20 Unit		20 Unit		
			2	Persentase Saluran/ Sungai Yang Sudah Dinormalisasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
			3	Persentase Jaringan Rawa Dalam Kondisi Baik	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		65,00%		70,00%		75,00%		75,00%		
			4	Jumlah Database SDA Yang Berbasis Aplikasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Database		1 Database		1 Database		5 Database		
		13	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku			1.504.350.500,00		1.006.223.000,00		563.515.000,00		351.965.000,00		3.947.000,00		1.202.405,00		3.431.202.905,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Rasio Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		65,00%		70,00%		70,00%		
			2	Persentase Cakupan Sarana Air Bersih Terhadap Penduduk	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
		14	Program Pengendalian Banjir			7.688.302.000,00		7.089.996.350,00		4.202.655.150,00		2.404.156.850,00		204.728.200,00		99.139.589,00		21.688.978.139,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Persentase Pemeliharaan Rutin Pusat-Pusat Pengendali Banjir	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
			2	Persentase Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		65,00%		70,00%		70,00%		
			3	Persentase Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00%		55,00%		60,00%		60,00%		
		15	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong			2.769.700.000,00		8.456.695.600,00		3.371.283.100,00		-		-		3.599.559.756		18.197.238.456,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Rasio Turap /Talud/Bronjong Terhadap Aliran Sungai/Parit	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		-		75,00%		75,00%		
			2	Panjang Turap /Talud/Bronjong Dalam Kondisi Baik	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		-		3.082 Km		3.082 Km		
		16	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			13.580.287.040,00		36.214.550.900,00		31.733.151.000,00		-		-		42.109.616.013,00		123.637.604.953,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Persentase Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		-		50,00%		60,00%		
	4	**Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**																		
		1	Program Lingkungan Sehat Perumahan			1.844.878.800,00		2.521.180.600,00		1.357.914.600,00		4.566.988.900,00		-		5.728.560.248,00		16.019.523.148,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Persentase KK Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Dasar	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		65,00%		70,00%		75,00%		75,00%		
			2	Persentase KK Ber-akses Sanitasi Layak	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		65,00%		70,00%		75,00%		75,00%		
			3	Persentase Kawasan Kumuh	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		40,00%		35,00%		30,00%		30,00%		
			4	Persentase Luas Permukiman Yang Tertata	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
		2	Program Pengembangan Perumahan			-		-		-		349.451.000,00		249.625.000,00		210.978.875,00		810.054.875,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			1	Rasio Rumah Layak Huni	-	-		-		-		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
			2	Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni	-	-		-		-		35,00%		30,00%		25,00%		25,00%		
		3	Perumahan Pengelolaan Arcal Pemakaman			1.435.540.170,00		3.286.546.200,00		266.442.000,00		-		-		151.984.208,00		5.140.512.578,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			1	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 : 6		1 : 6		1 : 6		1 : 6		
		4	Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan			1.849.221.900,00		1.296.931.600,00		711.272.000,00		818.476.800,00		887.156.400,00		765.953.530,00		6.329.012.230,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Persentase Meningkatnya Kualitas Kebersihan Lingkungan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		75,00%		80,00%		85,00%		85,00%		
	5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**																		
		1	Program Pendidikan Politik Masyarakat			138.480.000,00		48.260.400,00		20.425.050,00		166.259.700,00		202.300.800,00		212.423.337,00		808.149.287,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan

			1	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Belum Ada Data	Belum Ada Data		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00		Politik
			2	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	Belum Ada Data	Belum Ada Data		2,00		2,00		1,00		2,00		2,00		9,00		
			3	Tingkat Partisipasi Pemilih	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		70,00%		75,00%		75,00%		
		2	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah				-		70.000.000,00		100.214.500,00		50.000.000,00		190.000.000,00		420.000.000,00		830.214.500	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	Jumlah Kegiatan Penegakan Perda	-	-		4 Kali		4 Kali		4 Kali		8 Kali		8 Kali		28 Kali		
		3	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaaan				70.180.000,00		96.915.000,00		43.840.000,00		200.576.250,00		141.824.400,00		100.000.000,00		653.335.650,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			1	Frekuensi Pertemuan FKUB Dengan Elemen Masyarakat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		8 Kali		24 Kali		
		4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				12.500.000,00		7.500.000,00		-		7.297.000,00		7.214.500,00		6.288.257,00		40.799.757,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			1	Jumlah Ormas Penerima Hibah/Bantuan Sosial	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		14,00		14,00		12,00		40,00		
		5	Program Kewaspadaan Dini/Daerah				-		28.596.000,00		-		109.372.300,00		114.203.000,00		181.190.290,00		433.361.590,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			1	Persentase Terjadinya Konflik Sosial Masyarakat	-	-		Belum Ada Data		-		35,00%		30,00%		25,00%		25,00%		
		6	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal				-		65.569.600,00		300.718.900,00		34.027.000,00		24.971.500,00		240.000.000,00		665.287.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	Persentase Kriminalitas Yang Tertangani	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
			2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	-	-		4 Titik PKL		4 Titik PKL		1 Titik PKL		1 Titik PKL		3 Titik PKL		13 Titik PKL		
		7	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)				-		199.999.000,00		128.453.650,00		90.800.000,00		-		69.786.571,00		489.039.221,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	Jumlah Penyakit Masyarakat (Pekat) yang ditangani	-	-		10 Kali		10 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		29 Kali		
			2	Persentase Pokmas yang Aktif	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		65,00%		70,00%		75,00%		75,00%		
		8	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan				2.423.426.088,00		3.854.714.900,00		3.616.328.850,00		3.669.577.000,00		3.554.996.300,00		3.838.141.908,00		20.957.185.046,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja
			1	Cakupan Patroli Pengamanan Wilayah / Per Satuan Wilayah	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1.000		1.250		1.500		1.500		
			2	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Kabupaten	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			3	Jumlah Linmas	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		8.750		9.250		9.750		9.750		
			4	Persentase Linmas Terlatih	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
			5	Rasio Poskamling Per 10.000 Penduduk	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		35,00		30,00		25,00		25,00		
			6	Persentase Poskamling Aktif	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			7	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		90,00%		95,00%		100,00%		100,00%		
		9	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				48.784.772,00		119.824.725,00		563.421.000,00		110.741.425,00		71.869.475,00		77.659.843,00		992.301.240,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	Angka Kejadian Bencana	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		40,00		35,00		30,00		30,00		
			2	Persentase Bencana Alam Yang Dapat Ditanggulangi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		90,00%		95,00%		100,00%		100,00%		
		10	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan				-		-		88.014.400,00		124.708.000,00		222.278.950,00		302.700.546,00		737.701.896,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Seriua Kecamatan
			1	Titik Hotspot	-	-		-		Belum Ada Data		0,00		0,00		0,00		0,00		
		11	Program Rehabilitasi Pasca Bencana				-		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		2.500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

			1	Persentase Fasilitas Yang Diperbaiki Setelah Bencana	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00		
		12		Progam Penanggulangan Kedaruratan Bencana			-		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		800.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
		13		Program Kesiapsiagaan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran		-	-		1.768.118.200,00		127.214.000,00		521.664.400,00		774.234.400,00		629.814.646,00		3.821.045.646,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja
			1	Tercapainya Respon Time Pemadam Kebakaran 11 Menit (SPM)	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		< 11 menit		< 11 menit		< 11 menit		< 11 menit		
			2	Persentase Pasar Tradisional Yang Terpasang Sistem Pemadam Kebakaran	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			3	Tercapainya Respon Time Penanggulangan Bencana < 30 Menit	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		< 30 menit		< 30 menit		< 30 menit		< 30 menit		
		14		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan			90.000.000,00		-		-		88.107.950,00		-		87.176.894,00		265.284.844,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		-		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
	6			**Urusan Sosial**																
		1		Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			-		245.000.000,00		169.350.900,00		193.840.700,00		158.425.000,00		142.065.336,00		908.681.936,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sekretariat Daerah
			1	Persentase PMKS Yang Terlayani Jaminan Sosial	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		65,00%		70,00%		75,00%		75,00%		
			2	Persentase PMKS Yang Mendapat Bansos	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00%		55,00%		60,00%		60,00%		
			3	Persentase Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Tertangani	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			4	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Serta Lanjut Usia Yang Menerima Jaminan Sosial	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			5	Persentase PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Melalui KUBE atau Sejenis Lainnya	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		65,00%		70,00%		75,00%		75,00%		
		2		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			122.080.740,00		101.355.000,00		-		3.604.483.200,00		70.741.000,00		61.720.183,00		3.960.380.123,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sekretariat Daerah
			1	Persentase Lembaga Sosial Yang Berdaya, Efektif Dan Mandiri	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%	
		3		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			54.878.300,00		-		34.163.000,00		39.410.000,00		189.598.000,00		258.488.977,00		576.538.277,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%	
			2	Persentase PMKS Mandiri	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			3	Rasio PMKS Yang Tertangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
		4		Program Keluarga Harapan			147.490.208,00		135.203.200,00		158.117.900,00		163.881.500,00		172.400.000,00		177.865.647,00		954.958.455,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	Persentase Pelaksanaan Bimtek Pendamping dan Operator PKH	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		65,00%		70,00%		75,00%		75,00%		
			2	Jumlah peserta PKH	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00		150,00		175,00		175,00		
		6		Program Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan			12.296.000,00		-		45.484.500,00		-		49.850.000,00		79.487.517,00		187.118.017,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

			1	Jumlah Penerima Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		Belum Ada Data		-		10,00		10,00		50,00		
		7		Program Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial			39.750.000,00		1.700.000.000,00		1.610.453.375,00		3.521.172.700,00		3.626.037.500,00		8.942.342.976,00		19.439.756.551,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sekretariat Daerah
			1	Jumlah Bimtek Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1,00		1,00		1,00		1,00		
2	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**																			
	1	**Urusan Tenaga Kerja**																		
		1		Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja			88.057.000,00		140.438.900,00		22.592.350,00		110.612.800,00		166.468.950,00		166.468.950,00		694.638.950,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		90,00%		95,00%		100,00%		100,00%		
			2	Kualitas Tenaga Kerja Rasio Kelulusan S1, S2, S3	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50 : 20 : 1		25 : 10 : 1		10 : 5 : 1		10 : 5 : 1		
			3	Persentase Pelatihan Yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		90,00%		95,00%		100,00%		100,00%		
		2		Program Peningkatan Kesempatan Kerja			164.932.608,00		60.912.150,00		173.631.040,00		210.669.460,00		206.564.500,00		407.188.520,00		1.223.898.278,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
			2	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,18	6,18		6,11		6,42		6,08		6,05		6,02		6,02		
			3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		2,00		2,00		2,00		8,00		
			4	Persentase Perusahaan / Industri Yang Menjalin Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,01	65,01		67,60		68,78		69,98		71,20		72,69		72,69		
		3		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			143.612.104,00		202.349.170,00		78.357.800,00		147.029.750,00		151.049.300,00		288.963.150,00		1.011.361.274,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	Persentase Tenaga Kerja Yang Terlindung Haknya	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		90,00%		95,00%		100,00%		100,00%		
			2	Penetapan Upah Minimum Kabupaten	1.390.000	1.390.000		1.580.000		1.761.700		1.907.040		2.075.000		2.248.116		2.248.116		
			3	Persentase Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan dan Perusahaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		90,00%		95,00%		100,00%		100,00%		
		4		Program Transmigrasi Lokal			28.529.424,00		32.585.000,00		141.879.200,00		23.712.400,00		25.853.000,00		141.879.200,00		394.438.224,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	Jumlah Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Kali		1 Kali		1 Kali		5 Kali		
			2	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		65,00%		70,00%		70,00%		
		5		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan			25.455.700,00		12.140.100,00		2.300.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		69.895.800,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	Persentase Monitoring Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		65,00%		70,00%		70,00%		
			2	Persentase Sosialisasi Tentang Ketenagakerjaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
		6		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			238.002.440,00		1.125.689.600,00		1.085.000,00		214.631.500,00		44.847.500,00		1.125.689.600,00		2.769.945.640,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	Persentase Identifikasi Wilayah dan Kawasan Transmigrasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		55,00%		60,00%		65,00%		65,00%		
			2	Jumlah Kepala Keluarga Penempatan Transmigran	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		10,00		0,00		50,00		60,00		

2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**																		
	1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan			73.981.648,00		164.891.500,00		200.072.400,00		205.000.000,00		-		264.491.260,00		908.436.808,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	Persentase Sosialisasi Mengenai Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	60,00%		65,00%		70,00%		70,00%		
		2	Persentase Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	60,00%		65,00%		70,00%		70,00%		
		3	Persentase Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
		4	Persentase Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	65,00%		70,00%		75,00%		75,00%		
	2	Program Penguatan Kelembagaan Pengerusutamaan Gender dan Anak			348.102.736,00		142.500.000,00		152.962.500,00		221.200.000,00		-		197.494.290,00		1.062.259.526,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	Persentase Pengaduan Korban Kekerasan Anak Yang Ditangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
		2	Persentase Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
		3	Jumlah Lembaga Layanan Aktif Tingkat Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	20,00		26,00		30,00		30,00		
		4	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan PP Dan PA	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	10,00		13,00		15,00		15,00		
	3	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan			273.859.224,00		75.000.000,00		130.534.000,00		395.000.000,00		268.820.000,00		267.823.337,00		1.411.036.561,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	30,00%		40,00%		50,00%		50,00%		
		2	Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen	11,11%	11,11%		11,11%		11,11%	11,11%		11,11%		11,11%		11,11%		
		3	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan	30,91%	30,91%		31,00%		35,38%	37,01%		38,71%		40,49%		40,49%		
	4	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan			133.152.440,00		183.000.000,00		194.575.000,00		235.000.000,00		-		270.861.666,00		1.016.589.106,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	Rasio KDRT Perempuan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	4,60		4,80		5,00		5,00		
		2	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	15,00%		15,00%		12,50%		12,50%		
		3	Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 Tahun Ke Atas	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	97,72%		99,0%		99,25%		99,25%		
		4	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	3,10		3,30		3,50		3,50		
		5	Jumlah Desa Ramah Anak	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	12,00		16,00		20,00		20,00		
		6	Jumlah Puskesmas Ramah Anak	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	12,00		16,00		20,00		20,00		
	5	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat			29.954.120,00		35.000.000,00		14.950.000,00		20.000.000,00		-		18.078.956,00		117.983.076,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kesehatan di Masyarakat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data	5,00		5,00		5,00		25,00		
3	**Urusan Pangan**																		
	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			751.999.000,00		683.593.000,00		300.862.650,00		582.262.900,00		450.672.250,00		406.808.041,00		3.176.197.841,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan

			1	Rata-rata Konsumsi Pangan Per Kapita	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		99,07%		99,29%		99,51%		99,72%		99,72%		Peternakan; Sekretariat Daerah
			2	Rata-Rata Konsumsi Protein Nabati	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		7,91%		8,72%		9,53%		10,34%		10,34%		
			3	Rata-Rata Konsumsi Protein Hewani	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		56,88%		55,92%		54,95%		53,99%		53,99%		
			4	Rata-Rata Konsumsi Ikan Per Kapita	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		4,50%		4,40%		4,30%		4,20%		4,20%		
			5	Jumlah Lumbung Pangan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		27,00		30,00		33,00		33,00		
			6	Jumlah Desa Mandiri Pangan	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
			7	Skor PPH	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		83,60%		86,40%		89,10%		91,80%		91,80%		
	4	**Urusan Pertanahan**																		
		1	Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah			5.406.838.120,00		3.373.964.872,00		7.033.147.791,00		6.979.119.300,00		11.672.094.425,00		13.614.129.498,00		42.079.294.006,00	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD
			1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat / Persentase Lahan Tanah Aset Daerah Yang Disertifikatkan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		2	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			92.678.500,00		363.186.500,00		415.343.886,00		367.330.500,00		475.570.000,00		659.570.983,00		2.373.680.369,00	Sekretariat Daerah
			1	Persrentase Penyelesasian Kasus Tanah Negara	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			2	Persentase Penyelesaian Sengketa Ijin Lokasi atau Konflik Pertanahan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	5	**Urusan Lingkungan Hidup**																		
		1	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup			4.550.736.380,00		3.053.477.950,00		1.301.369.695,00		1.563.555.831,00		471.355.000,00		299.503.158,00		11.239.998.014,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			1	Indeks Kualitas Air	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		Baik		Baik		Baik		Baik		
			2	Indeks Kualitas Udara	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		Baik		Baik		Baik		Baik		
			3	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Dokumen AMDAL	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			4	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Dokumen UKL dan UPL	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			5	Persentase Usaha Dan/Atau Kegiatan yg wajib AMDAL/UKL dan UPL Yang Diawasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			6	Jumlah Sentra Industri Rumah Tangga /UMKM Yang Memiliki IPAL	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		15,00		17,00		20,00		20,00		
		2	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup			102.160.020,00		298.773.950,00		172.576.500,00		232.119.090,00		70.000.000,00		64.902.504,00		940.532.064,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			1	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
			2	Tersedianya Dokumen Status Lingkungan Hidup	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
			3	Persentase Aduan Masyarakat Di Bidang PPLH Yang Ditangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
			4	Prosentase Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) minimal "Biru"	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00%		60,00%		70,00%		70,00%		
			5	Prosentase Tingkat Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
			6	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya ALam Dan Lingkungan Hidup	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		55,00%		65,00%		75,00%		75,00%		

			7	Tingkat Peran Serta Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya ALam Dan Lingkungan Hidup	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
		3	Program Peningkatan Pengendalian Polusi			-		37.593.700,00		39.140.000,00		81.250.000,00		60.245.000,00		67.783.266,00		286.011.966,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			1	Tingkat Pencemaran Kualitas Udara	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		Di Atas Baku Mutu		Di Atas Baku Mutu		Di Atas Baku Mutu		Di Atas Baku Mutu		
			2	Tingkat Pencemaran Kualitas Air	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		90,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			3	Prosentase kendaraan bermotor yang memenuhi Uji Emisi	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		85,00%		90,00%		95,00%		95,00%		
			4	Persentase Kegiatan Usaha Yang Mempunyai IPAL	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00%		60,00%		65,00%		65,00%		
		4	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam			246.594.880,00		75.280.000,00		121.595.153,00		103.158.559,00		130.000.000,00		114.376.081,00		791.004.673,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			1	Persentase Luas Lahan Kritis	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00%		45,00%		40,00%		40,00%		
			2	Persentase Sumber Mata Air Yang Rusak	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		15,00%		10,00%		5,00%		5,00%		
			3	Persentase Tutupan vegetasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
			4	Kualitas Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		65,00%		70,00%		70,00%		
			5	Indeks Keanekaragaman hayati	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1,00		1,00		1,00		1,00		
			6	Indeks Daya Tampung dan daya Dukung Lingkungan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		DDL < 1		DDL < 1		DDL < 1		DDL < 1		
		5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah			8.533.618.428,00		22.188.554.750,00		10.216.325.700,00		13.906.053.496,00		16.394.061.975,00		18.680.876.231,00		89.919.490.580,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Persentase Penanganan Sampah	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		55,00%		65,00%		75,00%		75,00%		
			2	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per satuan Penduduk	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		0,60		0,70		0,80		0,80		
			3	Persentase Komunitas Yang Menerapkan Asas Zero Waste Ketika Menyelenggarakan Event Publik	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		65,00%		70,00%		70,00%		
			4	Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Praktik Pemilahan Sampah	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00%		60,00%		70,00%		70,00%		
			5	Penghargaan Adipura	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1,00		1,00		1,00		5,00		
		6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			1.333.300.000,00		4.049.953.950,00		2.255.131.600,00		2.700.768.400,00		1.804.878.600,00		1.917.573.498,00		14.061.606.048,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Luas RTH Per Luas Kawasan Perkotaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		38,00		39,00		40,00		40,00		
			2	Persentase Luas RTH Milik Publik	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		15,00%		20,00%		25,00%		25,00%		
			3	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		15,00		17,00		20,00		20.00		
	6	**Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**																		
		1	Program Penataan Administrasi Kependudukan			1.186.579.074,00		1.021.893.500,00		889.341.200,00		2.514.975.292,00		2.696.405.500,00		3.177.480.604,00		11.486.675.170,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	Rasio Kepemilikan KTP Elektronik	81,53%	81,53%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			2	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran Bagi bayi (0-1 Tahun)	76,06%	76,06%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			3	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran (Semua Penduduk)	38,78%	38,78%		75,00%		80,00%		85,00%		87,51%		89,11%		89,11%		
			4	Rasio Kepemilikan Akta Kematian	53,11%	53,11%		60,34%		62,24%		64,56%		65,73%		67,12%		67,12%		
			5	Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Usia 0-16 Tahun)	-	-		-		-		-		3,11%		7,13%		7,13%		
		2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Kependudukan			16.800.000,00		13.858.000,00		7.281.000,00		4.480.500,00		3.592.000,00		2.638.407,00		48.649.907,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

			1	Persentase Dokumen/Arsip Kependudukan Yang Tersimpan Rapi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
	7	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**																		
		1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			309.728.400,00		1.504.483.300,00		293.671.500,00		1.381.764.500,00		399.779.000,00		420.714.778,00		4.310.141.478,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	Persentase Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			2	Persentase Pembinaan Pemilihan Kepala Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			3	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		10,00		10,00		10,00		50,00		
			4	Persentase Tertibnya Administrasi Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		2	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan ADD (Desa)			145.831.208,00		319.279.500,00		322.854.800,00		162.768.800,00		287.698.000,00		329.574.891,00		1.568.007.199,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	Persentase Desa Yang Menyusun APBDes dan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Sesuai Ketentuan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			-		42.309.450,00		229.452.900,00		391.733.000,00		95.420.700,00		116.934.834,00		875.850.884,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	Jumlah Kelompok Binaan LPM	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		75,00		75,00		75,00		75,00		
		4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			74.707.412,00		159.015.060,00		163.920.550,00		16.000.200,00		66.090.000,00		64.489.671,00		544.222.833,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	Jumlah BUMDes/BUMADES	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		20,00		30,00		40,00		40,00		
			2	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		15,00		20,00		25,00		25,00		
		5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			29.055.760,00		14.999.550,00		34.742.000,00		-		-		36.874.744,00		115.672.054,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	Jumlah Penerima Hibah/Bantuan Sosial	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		5,00		-		-		5,00		25,00		
		6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			465.931.318,00		561.868.500,00		535.738.400,00		696.268.000,00		639.243.500,00		680.981.328,00		3.580.031.046,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	Persentase Terlaksananya Musyawarah Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			2	Persentase Pelaksanaan Perlombaan Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		40,00%		50,00%		60,00%		60,00%		
			3	Persentase Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Rong	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			4	Persentase Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00%		55,00%		60,00%		60,00%		
			5	Jumlah Pameran Teknologi Tepat Guna	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Kali		1 Kali		1 Kali		5 Kali		
			6	Persentase Pembinaan Desa Model	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		55,00%		65,00%		75,00%		75,00%		
			7	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		
			8	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Pendampingan Desa Binaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		70,00%		80,00%		80,00%		
			9	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengembangan Karang Taruna	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		65,00%		70,00%		70,00%		
			10	Jumlah Pelatihan BKD dan BKAD	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Kali		1 Kali		1 Kali		5 Kali		
			11	Persentase Pelaksanaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		75,00%		80,00%		85,00%		85,00%		

				Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan																
			12	Persentase Indeks Desa Membangun kategori "Maju/Mandiri".	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
		7	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan PNPM				419.057.080,00		87.843.000,00		140.840.000,00		165.000.000,00		150.087.300,00		122.224.452,00		1.005.991.832,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	Persentase Kegiatan Pendampingan PNPM-MPd Generasi Sehat dan Cerdas	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		80,00%		90,00%		90,00%		
		8	Program Penataan Wilayah Administrasi Desa				314.425.684,00		253.225.300,00		519.046.600,00		304.951.000,00		147.225.000,00		126.495.266,00		1.665.368.850,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	Jumlah Pembentukan, Pemekaran dan Penghapusan Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1,00		1,00		1,00		5,00		
			2	Persentase Penyelesaian Tata Batas Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			3	Persentase Terselesainya Peta Administrasi Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			4	Jumlah Profil Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1,00		1,00		1,00		1,00		
		9	Program Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Aset Desa				101.094.896,00		54.165.000,00		88.913.250,00		126.809.500,00		162.858.000,00		179.153.407,00		712.994.053,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	Persentase Laporan Inventarisasi Aset Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		10	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan						60.388.000,00		111.355.900,00		85.000.500,00		107.407.100,00		124.037.664,00		488.189.164,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		70,00%		80,00%		80,00%		
	8	**Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga**																		
		1	Program Keluarga Berencana				329.179.400,00		290.000.000,00		138.689.200,00		388.000.000,00		1.675.945.000,00		2.320.733.037,00		5.142.546.637,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			1	Persentase Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon Bagi Keluarga Miskin	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			2	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			3	Pelaksanaan Rakerda Program KB	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1,00		1,00		1,00		5,00		
			4	Pelaksanaan Pertemuan Koordinator KB dan PLKB	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		2 Kali		2 Kali		2 Kali		10 Kali		
			5	Pelaksanaan Bulan Bhakti Keluarga Berencana (KB), Keluarga Sejehtera (KS)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		
			6	Penyusunan Grand Design Pengendalian Kependudukan Kabupaten Kubu Raya	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
		2	Program Pelayanan Kontrasepsi				75.000.000,00		87.000.000,00		67.039.600,00		70.000.000,00		-		68.802.978,00		367.842.578,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			1	Persentase Pelayanan Konseling KB	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00%		60,00%		70,00%		80,00%		
			2	Persentase Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		55,00%		65,00%		75,00%		85,00%		
		3	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak				13.175.160,00		20.000.000,00		21.000.000,00		20.000.000,00		-		22.199.772,00		96.374.932,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			1	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		15,00		20,00		25,00		25,00		
		4	Program Kesehatan Reproduksi Remaja				13.050.080,00		20.000.000,00		16.450.000,00		20.000.000,00		45.292.000,00		58.090.239,00		172.882.319,00	Dinas Pemberdayaan

			1	Persentase Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		65,00%		70,00%		75,00%		75,00%		Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		5	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri			853.143.320,00		2.277.381.000,00		1.197.471.100,00		1.373.800.000,00		2.118.690.500,00		2.541.421.058,00		10.361.906.978,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			1	Persentase Penguatan Kapasitas Kelembagaan Posyandu	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		80,00%		90,00%		90,00%	
			2	Persentase Penguatan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan Keluarga' Berencana	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		80,00%		90,00%		90,00%	
		6	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR			34.744.592,00		110.000.000,00		26.250.200,00		188.000.000,00		51.575.000,00		55.814.834,00		466.384.626,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			1	Jumlah Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		5,00		7,00		10,00		10,00	
			2	Jumlah Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		5,00		10,00		15,00		15,00	
		7	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			14.926.000,00		50.000.000,00		22.450.900,00		50.000.000,00		202.250.000,00		340.625.807,00		680.252.707,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			1	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00		75,00		100,00		100,00	
		8	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB			1.435.227.200,00		1.815.619.000,00		955.847.000,00		1.390.294.600,00		782.000.000,00		692.570.474,00		7.071.558.274,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			1	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		80,00%		90,00%		90,00%	
	9	**Urusan Perhubungan**																		
		1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			1.400.000,00		3.000.000,00		1.400.000,00		55.164.800,00		619.989.900,00		404.863.000,00		1.085.817.700,00	Dinas Perhubungan
			1	Tersedianya Stiker Tanda Pendaftaran Kapal	Belum Ada Data	Belum Ada Data		600.000		280,00		280,00		600,00		600,00		600,00	
			2	Terlaksananya Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas SDP	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		-		1,00		1,00		4,00		4,00	
			3	Terlaksananya Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		-		2,00		2,00		2,00		2,00	
			4	Dokumen Analisa Database Pelayanan Jasa Angkutan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		-		-		-		1,00		1,00	
			5	Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Supir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		-		-		1,00		1,00		1,00	
			6	Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Termirial	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		-		-		2,00		2,00		2,00	
			7	Fasilitasi Pelajar, Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		-		-		4,00		4,00		4,00	
		2	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			-		697.016.000,00		683.791.000,00		359.535.000,00		435.051.900,00		2.947.640.000,00		5.123.033.900	Dinas Perhubungan
			1	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Sungai	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		65,00%		70,00%		70,00%	
			2	Pengadaan Skala Tinggi Air	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		-		1,00		1,00	
			3	Persentase Pengerukan Alur Pelayaran	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		65,00%		70,00%		70,00%	

			4	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
			5	Persentase Pagar Pengaman Jalan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
			6	Persentase Pengamanan dan Pengawasan Angkutan Hari Raya	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			7	Persentase Pembuatan marka jalan " Zona Selamat Sekolah"	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
			8	Persentase Pemasangan Lampu Peringatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
			9	Persentase Pemasangan Patok Pengaman Jalan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
			10	Persentase Pembuatan Zebra Cross dan Marka Jalan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
			11	Persentase Pemasangan Traffic Light di Persimpangan Jalan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
		3	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			105.090.300,00		536.010.000,00		591.962.350,00		639.071.600,00		648.093.000,00		1.749.268.000,00		4.269.495.250,00	Dinas Perhubungan
			1	Persentase Kelengkapan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			2	Persentase Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
			3	Persentase Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Air	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
			4	Jumlah Buku Uji dan Plat Tanda Uji Kendaraan Bermotor	Belum Ada Data	Belum Ada Data		1.000 Buku Uji, 8.300 Plat Tanda Uji		1.500 Buku Uji, 3.000 Plat Tanda Uji, 3.555 Stiker		3.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 1.480 Stiker		4.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 3.000 Stiker		4.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 3.000 Stiker		4.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 3.000 Stiker		
		4	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (LLASDP)			-		250.000.000,00		-		500.000.000,00		800.000.000,00		400.000.000,00		1.950.000.000,00	Dinas Perhubungan
			1	Persentase/Tingkat Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Penyeberangan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
		5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas (LLAJ)			-		75.000.000,00		-		-		350.000.000,00		200.000.000,00		625.000.000,00	Dinas Perhubungan
			1	Persentase/Tingkat Pemeliharaan Terminal Angkutan Darat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		-		85,00%		90,00%		90,00%		
		6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			4.165.087.896,00		1.569.297.726,00		4.187.628.900,00		4.741.419.500,00		4.559.999.200,00		24.200.000.000,00		43.423.433.222,00	Dinas Perhubungan
			1	Jumlah Dermaga/ Steigher	174,00	174,00		14,00		27,00		18,00		20,00		20,00		20,00		
			2	Jumlah Halte	2,00	2,00		-		-		-		-		2,00		2,00		
			3	Jumlah Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		-		-		-		-		1,00		1,00		
			4	Jumlah Terminal Angkutan Barang	-	-		-		-		-		-		1,00		1,00		
		7	Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan			-		-		-		-		2.040.000.000,00		2.210.000.000,00		4.250.000.000,00	Dinas Perhubungan
			1	Dokumen Database Alur Pelayaran	-	-		-		-		-		1 Dokumen		-		1 Dokumen		
			2	Tersedianya Lahan/ Pembangunan Pelabuhan/Dermaga	-	-		-		-		-		10,00 Ha		10,00 Ha		10,00 Ha		
			3	Dokumen DED Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan	-	-		-		-		-		2 Dokumen		2 Dokumen		4 Dokumen		
			4	Dokumen Perencanaan Tempat-Tempat Pemberhentian Umum	-	-		-		-		-		1 Dokumen		-		1 Dokumen		
			5	Dokumen Database Bidang Perhubungan	-	-		-		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		

		6	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	-		-		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		
		7	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	-	-		-		-		-		3 Dokumen		3 Dokumen		6 Dokumen		
		8	Evaluasi dan Verifikasi TUKS	-	-		-		-		-		3 Dokumen		3 Dokumen		6 Dokumen		
	10	**Urusan Komunikasi Dan Informatika**																	
		1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknolgi			312.128.500,00		956.818.500,00		339.154.000,00		396.382.500,00		403.854.000,00		425.209.130,00		2.833.546.630,00	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD
			1 Persentase Interkoneksi Internet Dan Jaringan Intranet Kabupaten Ke Desa, kecamatan Dan OPD	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00%		60,00%		70,00%		70,00%		
			2 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1,00		1,00		1,00		1,00		
			3 Persentase Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00%		55,00%		60,00%		60,00%		
		2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa			4.503.239.760,00		5.544.819.000,00		8.530.588.800,00		3.994.351.800,00		3.008.907.825,00		2.775.783.862,00		28.357.691.047,00	Dinas Komunikasi dan Informatika; Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah
			1 Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemda/Bermitra Dengan Pemda	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		2,00		2,00		2,00		2,00		
		3	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informatika			50.990.200,00		87.500.000,00		-		-		-		114.622.195,00		253.112.395,00	Sekretariat Daerah
			1 Persentase Aparatur Yang memiliki Kompetensi Berbasis TIK	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		-		-		75,00%		75,00%		
		4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik			1.030.056.000,00		1.202.312.950,00		1.200.070.825,00		2.175.290.800,00		2.222.536.500,00		2.592.068.743,00		10.122.335.818,00	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD
			1 Persentase Jumlah Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			2 Persentase Jumlah Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Kabupaten Kubu Raya	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
			3 Jumlah Buletin Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Yang Diterbitkan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		12,00		12,00		12,00		60,00		
			4 Jumlah Buletin Parlementaria Yang Diterbitkan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		12,00		12,00		12,00		60,00		
		5	Program Pengembangan dan Implementasi E-Government			2.374.571.576,00		753.990.300,00		274.838.500,00		212.355.000,00		279.112.500,00		181.893.882,00		4.076.761.758,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			1 Jumlah Aplikasi Yang Dibangun	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1,00		1,00		1,00		5,00		
			2 Jumlah Dokumen E-Government Yang Diterbitkan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		5,00		5,00		5,00		25,00		
		6	Program Implementasi LPSE			667.924.858,00		318.303.600,00		731.805.000,00		678.262.500,00		1.293.293.200,00		1.476.015.342,00		5.165.604.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Daerah
			1 Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui LPSE	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100%		100%		100%		
			2 Persentase Sanggah Banding Dari Penyedia Terhadap Proses Pelelangan	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0%		0%		0%		
			3 Pemenuhan Minimal 9 Standar LPSE 2014	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		9 Standar LPSE 2014 Terpenuhi		9 Standar LPSE 2014 Terpenuhi		9 Standar LPSE 2014 Terpenuhi		9 Standar LPSE 2014 Terpenuhi		

11	**Uurusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**																		
	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif			61.776.260,00		163.285.000,00		113.302.000,00		239.000.000,00		-		335.190.710,00		912.553.970,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Persentase Usaha Mikro Dan kecil Terhadap UKM	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00%		60,00%		70,00%		70,00%		
		2	Jumlah Tenaga Kerja Koperasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		450,00		500,00		550,00		600,00		
		3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		750,00		850,00		950,00		950,00		
		4	Persentase Produktivitas UMKM	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		65,00%		70,00%		70,00%		
		5	Persentase Penambahan Jumlah Wirausaha Baru	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		20,00%		25,00%		30,00%		30,00%		
		6	Persentase Jumlah Koperasi Terhadap Jumlah UMKM	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		40,00%		45,00%		50,00%		50,00%		
	2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			906.808.884,00		599.140.100,00		341.137.200,00		169.868.000,00		264.800.000,00		207.013.383,00		2.488.767.567,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah UMKM	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00		75,00		100,00		100,00		
		2	Aset UMKM	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		472.904.000		692.710.000		838.379.00		838.379.000		
		3	Omset UMKM	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		782.095.000		895.930.000		958.050.000		838.379.000		
	3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah			487.529.502,00		713.654.600,00		143.363.900,00		175.287.500,00		125.850.000,00		95.989.490,00		1.741.674.992,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah UMKM Yang Mendapat Bantuan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00		75,00		100,00		100,00		
		2	Jumlah UMKM Yang Melakukan Kemitraan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00		75,00		100,00		100,00		
		3	Jumlah UMKM Yang Mendapat Pelatihan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00		75,00		100,00		100,00		
		4	Jumlah UMKM Yang Mengikuti Magang	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00		75,00		100,00		100,00		
		5	Jumlah Koperasi Yang Mampu Mengakses Pembiayaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00		65,00		80,00		80,00		
		6	Jumlah UMKM Yang Mampu Mengakses Pembiayaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00		65,00		80,00		80,00		
	4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			134.577.076,00		668.103.303,00		190.578.000,00		171.326.500,00		196.106.500,00		211.444.391,00		1.572.135.770,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Aset Koperasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		589.064.000		769.995.000		880.340.000		880.340.000		
		2	Omset Koperasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		864.906.000		906.367.000		927.836.000		927.836.000		
		3	Rasio Jumlah Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1,00		1,00		1,00		1,00		
12	**Urusan Penanaman Modal**																		
	1	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi			231.457.000,00		316.100.000,00		292.597.000,00		235.731.500,00		296.761.500,00		311.885.371,00		1.684.532.371,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1	Jumlah Promosi Investasi	5,00	5,00		5,00		5,00		6,00		7,00		7,00		7,00		
		2	Jumlah Kerjasama Investasi	-	-		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
		3	Jumlah Koordinasi Penanaman Modal	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		
		4	Jumlah Dokumen LKPM dan Direktori Perusahaan	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
	2	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi			599.097.180,00		222.500.000,00		40.660.000,00		112.995.000,00		84.250.000,00		56.909.456,00		1.116.411.636,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1	Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)	3.484.556.090.000	3.484.556.090.000		3.486.851.231.878		4.016.235.877.407		4.625.993.353.402		5.328.326.114.037		6.137.289.228.193		6.137.289.228.193		
		2	Jumlah Proyek Investasi (PMDN)	225,00	225,00		237,00		249,00		262,00		276,00		290,00		290		
		3	Jumlah Proyek Investasi (PMA)	18,00	18,00		18,00		18,00		19,00		19,00		20,00		20,00		
	3	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah			450.458.400,00		240.000.000,00		-		75.000.000,00		61.700.000,00		37.535.550,00		864.693.950,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

			1	Jumlah Sertifikat Kualitas Mutu Pelayanan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		175,00		200,00		225,00		225,00		Pintu
			2	Persentase Pelayanan Publik Berbasis Web/Online	100,00%	100,00%		20,00%		-		20,00%		20%		100%		100%		
		4	Program Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan				403.467.132,00		882.400.000,00		604.440.830,00		752.414.900,00		497.212.000,00		518.427.809,00		3.658.362.671,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			1	Jumlah Izin Keluar	1.350	1.350		2.750		3.000		3.200,00		3.300,00		3.500,00		3.500,00		
			2	Jumlah Sosialisasi Kebijakan, Perizinan dan Non Perizinan	4,00	4,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
			3	Nilai/Score IKM	81,00	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		85,00		85,00		
			4	Jumlah Penanganan Pengaduan	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		
			5	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
	13	**Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga**																		
		1	Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga				-		65.830.000,00		-		40.000.000,00		-		31.180.140,00		137.010.140,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			1	Jumlah Organisasi Olahraga Rekreasi	-	-		Belum Ada Data		-		5,00		5,00		5,00		5,00		
			2	Jumlah Komunitas Olah Raga Aktif	-	-		Belum Ada Data		-		35,00		35,00		35,00		35,00		
		2	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga				902.921.840,00		643.136.650,00		407.798.800,00		1.274.271.900,00		325.000.000,00		264.929.306,00		3.818.058.496,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			1	Jumlah Cabang Olah Raga Yang Berprestasi Tingkat Provinsi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1,00		3,00		5,00		5,00		
			2	Jumlah Cabang Olah Raga Yang Berprestasi Tingkat Nasional	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		36,00		35,00		36,00		36,00		
			3	Jumlah Prestasi Olah Raga	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		37,00		35,00		36,00		36,00		
		3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga				84.000.000,00		-		-		120.000.000,00		170.000.000,00		215.033.175,00		589.033.175,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			1	Rasio Gelanggang Olah Raga Per 1.000 Penduduk	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		-		60,00		60,00		65,00		65,00		
			2	Rasio Lapangan Olah Raga Per 10.000 Penduduk	40,00	40,00		-		-		60,00		60,00		65,00		65,00		
		4	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				334.998.720,00		457.030.000,00		509.723.100,00		694.730.500,00		450.000.000,00		477.360.398,00		2.923.862.718,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			1	Jumlah Pemuda Pelopor	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		5,00		5,00		5,00		25,00		
			2	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		2,00		2,00		2,00		10,00		
	14	**Urusan Kebudayaan**																		
		1	Program Pengembangan Nilai Budaya				359.333.200,00		607.702.800,00		166.406.600,00		806.575.200,00		812.117.900,00		720.723.190,00		3.471.858.890,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1	Persentase Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
			2	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	1,00	1,00		1,00		1,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
			3	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		15,00		20,00		25,00		25,00		
			4	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		15,00		17,00		20,00		20,00		
		2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				30.000.000,00		25.028.300,00		14.448.300,00		39.518.300,00		43.470.130,00		47.817.143,00		200.282.173,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	1,00	1,00		11,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		
			2	Persentase Grup Kesenian Aktif	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		65,00%		70,00%		75,00%		75,00%		
		3	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya				-		72.000.000,00		75.000.000,00		82.200.000,00		90.420.000,00		99.462.000,00		419.082.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1	Jumlah Tenaga Teknis/Juru Pelihara Tempat Bersejarah	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		15,00		20,00		25,00		25,00		

15	**Urusan Perpustakaan**																		
	1	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan			191.306.000,00		952.868.785,00		1.448.398.875,00		723.495.250,00		390.250.000,00		482.929.155,00		4.189.248.065,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		1 Jumlah Perpustakaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00		85,00		100,00		100,00		
		2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100.000,00		150.000,00		175.000,00		175.000,00		
		3 Jumlah Referensi Digital	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		650,00		700,00		750,00		750,00		
16	**Urusan Kearsipan**																		
	1	Program Penyclamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah			99.585.600,00		29.991.000,00		125.325.325,00		100.372.300,00		77.995.300,00		100.735.900,00		534.005.425,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD
		1 Presentasi SKPD Yang telah Melakukan Arsip Baku	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		80,00%		90,00%		90,00%		
		2 Persentase SKPD, Desa/Kelurahan Yang Dibina Dalam Pengelolaan Arsip Dinamis	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		75,00%		80,00%		85,00%		85,00%		
	2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			75.320.000,00		123.057.000,00		-		-		45.050.000,00		49.555.000,00		292.982.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		1 Tersedianya Sistem Arsip Elektronik	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		-		Tersedia		Tersedia		Tersedia		
		2 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Pengarsipan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		-		2 Kali		2 Kali		10,00%		
	3	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			-		-		80.531.950,00		76.110.000,00		69.538.000,00		142.609.000,00		368.788.950,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		1 Persentase Pelaksanaan Sistem Kearsipan Sesuai Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK)	-	-		-		Belum Ada Data		60,00%		70,00%		80,00%		80,00%		
	4	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan			-		-		45.997.625,00		12.500.000,00		10.462.000,00		6.386.180,00		75.345.805,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		1 Frekuensi Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	-	-		-		Belum Ada Data		3 Kali		3 Kali		3 Kali		15 Kali		
		2 Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	-	-		-		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
URUSAN PILIHAN																			
	1	**Urusan Kelautan Dan Perikanan**																	
		1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan			132.039.972,00		540.000.000,00		127.310.000,00		86.498.200,00		174.298.000,00		150.000.000,00		1.210.146.372,00	Dinas Perikanan
		1 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.372,00	2.372,00		2.609,00		2.809,00		3.156,00		3.472,00		3.472,00		3.472,00		
		2 Jumlah Kelompok Budidaya Ikan	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
		2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap			4.716.596.192,00		2.450.944.400,00		1.317.633.000,00		1.758.196.700,00		855.519.000,00		4.775.000.000,00		15.873.889.292,00	Dinas Perikanan
		1 Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21.996,00	21.996,00		22.986,00		24.020,00		24.981,00		25.855,00		26.760,00		26.760,00		
		3 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan			182.789.160,00		260.000.000,00		118.790.632,00		330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		1.551.579.792,00	Dinas Perikanan
		1 Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan (Unit)	2,00	2,00		2,00		4,00		4,00		3,00		2,00		2,00		
		4 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan			30.000.000,00		100.000.000,00		-		180.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		730.000.000,00	Dinas Perikanan
		1 Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	31,00	31,00		31,25		-		31,75		32,00		32,25		32,25		
		5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			-		23.014.325,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		263.014.325,00	Dinas Perikanan
		1 Jumlah Kelompok Yang Dibina	-	-		15,00		15,00		20,00		25,00		30,00		30,00		
		6 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar			2.356.977.004,00		1.303.768.250,00		879.092.000,00		1.219.703.670,00		1.524.203.000,00		5.760.000.000,00		13.043.743.924,00	Dinas Perikanan
		1 Persentase Luasan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		

		7	Program Peningkatan Kehidupan Nelayan			245.310.000,00		215.745.400,00		29.981.500,00		321.378.200,00		110.000.000,00		500.000.000,00		1.422.415.100,00	Dinas Perikanan
			1 Jumlah Nelayan Yang Difasilitasi	200,00	200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		
		8	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			3.040.424.172,00		2.924.660.950,00		649.508.260,00		600.000.000,00		650.000.000,00		4.180.000.000,00		12.044.593.382,00	Dinas Perikanan
			1 Jumlah Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Yang Dibina dan Diberdayakan	63,00	63,00		70,00		77,00		-		-		120,00		120,00		
		9	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan			30.000.000,00		75.000.000,00		205.000.000,00		-		-		100.000.000,00		410.000.000,00	Dinas Perikanan
			1 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan dan Kelautan Yang Dibina	14,00	14,00		15,00		16,00		-		-		19,00		19,00		
		10	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran, Pengolahan Hasil Perikanan			2.157.964.074,00		1.390.584.050,00		82.812.000,00		432.200.900,00		152.300.000,00		3.000.000.000,00		7.215.861.024,00	Dinas Perikanan
			1 Jumlah Produksi Ikan Hasil Olahan (Ton)	1.775,00	1.775,00		1.925,00		2.148,00		2.362,00		2.559,00		2.839,00		2.859,00		
		11	Program Pemberdayaan Pengolahan Hasil Perikanan			42.240.000,00		74.976.500,00		47.829.500,00		123.151.500,00		437.550.000,00		30.000.000,00		755.747.500,00	Dinas Perikanan
			1 Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Yang Dibina	120,00	120,00		135,00		150,00		165,00		180,00		195,00		195,00		
	2	**Urusan Pariwisata**																	
		1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			868.044.736,00		115.000.000,00		43.085.650,00		15.000.000,00		-		5.438.493,00		1.046.568.879,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			1 Jumlah Objek Wisata	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		10,00		10,00		10,00		10,00		
			2 Jumlah Wisata Agro-Eco-Culture	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		2,00		2,00		2,00		2,00		
			3 Jumlah Desa Wisata	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		5,00		5,00		5,00		5,00		
		2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			209.550.000,00		188.800.000,00		93.826.000,00		194.352.000,00		45.000.000,00		33.082.436,00		764.610.436,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			1 Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Belum Ada Data	Belum Ada Data		28,28%		24,62%		30,31%		32,49%		34,82%		34,82%		
			2 Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.312,00	2.312,00		2.517,00		3.295,00		3.532,00		3.927,00		4.366,00		4.366,00		
			3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	57.855,00	57.855,00		60.508,00		45.139,00		52.262,00		56.235,00		60.520,00		60.520,00		
			4 Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	1-2 hari	1-2 hari		1-2 hari		1-2 hari		1-2 hari		1-2 hari		1-2 hari		1-2 hari		
		3	Program Pengembangan Sumber Daya Bidang Ekonomi Kreatif			-		245.000.000,00		583.401.150,00		750.000.000,00		750.000.000,00		992.053.419,00		3.320.454.569,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			1 Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif	-	-		Belum Ada Data		20,00		20,00		BAD		BAD		BAD		
		4	Program Pengembangan Kemitraan			222.197.492,00		296.000.000,00		663.885.250,00		3.120.000.000,00		178.000.000,00		170.277.071,00		4.650.359.813,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			1 Adanya Forum Komunikasi Antar Pelaku Wisata	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		BAD		BAD		BAD		
	3	**Urusan Pertanian**																	
		1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian			5.053.049.920,00		23.402.659.300,00		5.371.332.033,78		5.161.835.408,00		5.036.600.000,00		30.667.907.500,00		74.703.384.161,78	Dinas Pertanian
			1 Luas Tanam Padi (Ha)	59.945,00	59.945,00		52.679,00		45.360,00		52.000,00		53.000,00		54.000,00		54.000,00		
			2 Luas Tanam Jagung (Ha)	3.957,00	3.957,00		2.768,00		1.148,00		1.200,00		1.300,00		1.400,00		1.400,00		
		2	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan			-		2.300.000.000,00		2.635.000.000,00		2.985.000.000,00		3.387.750.000,00		3.850.012.500,00		15.157.762.500,00	Dinas Pertanian
			1 Produksi Padi (Ton)	-	-		180.426,00		155.358,00		191.800,00		202.075,00		208.925,00		208.925,00		
			2 Produksi Jagung (Ton)	-	-		8.033,00		3.338,00		5.000,00		5.000		5.000,00		5.000,00		
		3	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			-		3.437.190.200,00		778.471.600,00		893.434.900,00		268.962.000,00		1.241.379.900,00		6.619.438.600,00	Dinas Pertanian
			1 Persentase Produktivitas Produksi Padi per Ha	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		

			2	Persentase Produktivitas Produksi Jagung per Ha	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
		4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)				-		3.713.126.108,00		457.427.450,00		917.956.550,00		556.216.500,00		2.205.634.300,00		7.850.360.908,00	Dinas Pertanian
			1	Rata-rata Konsumsi Pangan Per Kapita	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		99,07%		99,29%		99,51%		99,72%		99,72%		
			2	Rata-Rata Konsumsi Protein Nabati	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		7,91%		8,72%		9,53%		10,34%		10,34%		
			3	Rata-Rata Konsumsi Protein Hewani	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		56,88%		55,92%		54,95%		53,99%		53,99%		
			4	Rata-Rata Konsumsi Ikan Per Kapita	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		4,50%		4,40%		4,30%		4,20%		4,20%		
			5	Jumlah Lumbung Pangan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		27,00		30,00		33,00		33,00		
			6	Jumlah Desa Mandiri Pangan	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
			7	Skor PPH	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		83,60%		86,40%		89,10%		91,80%		91,80%		
		5	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura				-		1.520.000.000,00		1.718.000.000,00		1.945.250.000,00		2.207.137.500,00		2.508.708.125,00		9.899.095.625,00	Dinas Pertanian
			1	Produksi Jeruk (Ton/Ha)	-	-		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		
			2	Produksi Cabe Rawit (Ton/Ha)	-	-		Belum Ada Data		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
			3	Produksi Bawang Merah (Ton/Ha)	-	-		Belum Ada Data		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		
		6	Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				718.049.980,00		392.530.000,00		346.528.000,00		-		-		271.810.493,00		1.728.918.473,00	Dinas Pertanian
			1	Jumlah Komoditas Yang Bersertifikat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
		7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				7.048.518.650,00		5.226.506.800,00		1.503.113.665,00		522.558.710,00		251.007.000,00		1.907.579.788,00		16.459.316.613,00	Dinas Pertanian
			1	Cakupan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		Skala Daerah		Skala Daerah		Skala Nasional		Skala Nasional		
		8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				820.688.508,00		201.018.000,00		120.074.875,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		1.891.781.383,00	Dinas Pertanian
			1	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,00	100,00		101,00		101,00		102,00		102,00		103,00		103,00		
		9	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan				678.308.200,00		2.540.168.000,00		1.888.020.491,00		1.546.267.100,00		955.018.900,00		1.853.376.494,00		9.461.159.185,00	Dinas Pertanian
			1	Rasio Kelompok Tani Terhadap Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		22,00		21,00		20,00		20,00		
		10	Program Sistem Informasi/Database Pertanian				90.214.770,00		128.119.000,00		129.105.225,00		126.760.800,00		109.972.700,00		114.415.888,00		698.588.383,00	Dinas Pertanian
			1	Tersedianya Sistem Informasi/Database Pertanian	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		Tersedia		Tersedia		Tersedia		Tersedia		
			2	Jumlah Buku Profil Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
		11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				-		15.000.000,00		17.902.200,00		18.092.900,00		-		19.259.595,00		70.254.695,00	Dinas Pertanian
			1	Jumlah Penerima Hibah/Bansos	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		3,00		3,00		3,00		15,00		
	4	**Urusan Perkebunan**																		
		1	Program Peningkatan Produksi Perkebunan				121.887.232,00		300.675.000,00		-		-		-		472.244.460,00		894.806.692,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
			1	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		-		-		200.000,00		200.000,00		
			2	Produktivitas Tanaman Perkebunan (Ton/ha)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		-		-		-		50,00		50,00		
		2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				66.630.444,00		230.500.000,00		81.814.000,00		54.060.000,00		53.584.650,00		51.299.595,00		537.888.689,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
			1	Rasio Kelompok Tani Terhadap Petani	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		20,00		20,00		20,00		20,00		
		3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				548.190.552,00		75.000.000,00		40.944.400,00		48.951.000,00		80.591.500,00		54.923.825,00		848.601.277,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan

			1	Persentase Pengawalan dan Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Kubu Raya	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		60,00%		70,00%		80,00%		80,00%		
		4	Program Pengembangan Agribisnis				1.152.431.216,00		1.165.975.500,00		201.391.500,00		1.414.032.500,00		248.691.500,00		183.008.022,00		4.365.530.238,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
			1	Jumlah Ijin Usaha Perkebunan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		150,00		175,00		200,00		200,00		
		5	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kehutanan				57.700.356,00		200.266.900,00		66.045.000,00		-		78.250.000,00		84.442.447,00		486.704.703,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan; Sekretariat Daerah
			1	Luasan Hutan Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		20,00 Ha		25,00 Ha		30,00 Ha		30,00 Ha		
			2	Jumlah Titik Lokasi Hutan Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		10,00		10,00		15,00		15,00		
			3	Luasan Hutan Kemasyarakatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		25,00 Ha		30,00 Ha		35,00 Ha		35,00 Ha		
			4	Jumlah Titik Lokasi Hutan Kemasyarakatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		15,00		15,00		20,00		20,00		
			5	Luasan Hutan Tanaman Rakyat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		25,00 Ha		30,00 Ha		35,00 Ha		35,00 Ha		
			6	Jumlah Titik Lokasi Hutan Tanaman Rakyat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		15,00		15,00		20,00		20,00		
			7	Luasan Hutan Rakyat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		25,00 Ha		30,00 Ha		35,00 Ha		35,00 Ha		
			8	Jumlah Titik Lokasi Hutan Rakyat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		15,00		15,00		20,00		20,00		
			9	Luasan Hutan Adat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		30,00 Ha		35,00 Ha		40,00 Ha		40,00 Ha		
			10	Jumlah Titik Lokasi Hutan Adat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		20,00		20,00		25,00		25,00		
	5	**Urusan Peternakan**																		
		1	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				1.525.147.574,00		575.966.750,00		250.360.250,00		333.675.500,00		128.046.300,00		78.014.992,00		2.891.211.366,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
			1	Jumlah Populasi Ternak Besar (ekor)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		16.028,00		16.190,00		16.434,00		16.572,00		16.572,00		
			2	Jumlah Populasi Ternak Kecil (ekor)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		63.557,00		64.489,00		65.778,00		66.535,00		66.535,00		
			3	Jumlah Populasi Unggas (ekor)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		17.774.428		17.971.998		18.182.969		18.321.225		18.321.225		
			4	Jumlah Produksi Telur (Ton)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		6.361,00		6.501,00		6,631,00		6.724,00		6.724,00		
			5	Jumlah Produksi Susu (Ton)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		BAD		BAD		BAD		
			6	Jumlah Produksi Daging (Ton)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		14.575,00		14.699,00		14.993,00		15.135,00		15.135,00		
		2	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak				678.129.622,00		1.947.287.522,00		379.231.321,00		127.218.100,00		101.258.100,00		69.223.441,00		3.302.348.106,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
			1	Jumlah Kasus Penyakit Ternak	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		40,00		45,00		50,00		50,00		
			2	Persentase Kasus Penyakit Ternak Yang Tertangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		80,00%		90,00%		100,00%		100,00%		
		3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				-		-		-		-		68.566.700,00		82.280.040,00		150.846.740,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
			1	Jangkauan Pemasaran Produksi Peternakan	-	-		-		-		Lokal, Regional, Nasional		Lokal, Regional, Nasional		Lokal, Regional, Nasional		Lokal, Regional, Nasional		
		4	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)				-		208.075.600,00		97.428.250,00		73.538.700,00		56.746.500,00		41.007.997,00		476.797.047,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
			1	Produksi Pakan Ternak (Stek)	-	-		75.000,00		78.750,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		393.750,00		
	6	**Urusan Perdagangan**																		
		1	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan				141.761.940,00		2.546.814.000,00		102.459.100,00		-		-		91.949.104,00		2.882.984.144,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
			1	Jumlah Kelangkaan Bahan Pokok	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2	Jumlah Sengketa Konsumen Yang Tertangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00		100,00		100,00		100,00		
		2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				363.383.794,00		299.899.000,00		144.928.700,00		255.095.650,00		236.393.500,00		216.914.970,00		1.516.615.614,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
			1	Jumlah Pelaku Usaha Formal Yang Mendapatkan Izin Usaha	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00		50,00		60,00		60,00		

			2	Jumlah Pasar Tradisional Yang Direvitalisasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		5,00		5,00		5,00		5,00		
			3	Jumlah Kegiatan Promosi Produk Unggulan dan Komoditi Kabupaten Kubu Raya	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		2,00		2,00		2,00		10,00		
			4	Peningkatan Jumlah Kewirausahaan Pedagang Non Formal	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00%		55,00%		60,00%		60,00%		
		3	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan				-		-		1.676.410.600,00		2.957.157.000,00		5.189.000.000,00		7.562.256.923,00		17.384.824.523,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
			1	Jumlah Pembinaan Pedagang Kaki Lima	-	-		-		Belum Ada Data		1 Kali		1 Kali		1 Kali		5 Kali		
			2	Jumlah Asosiasi Pedagang Kaki Lima	-	-		-		Belum Ada Data		10,00		10,00		15,00		15,00		
		4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				-		-		-		80.436.600,00		61.490.300,00		53.762.947,00		195.689.847,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
			1	Jumlah Produk Berkualitas Ekspor	-	-		-		-		1,00		2,00		3,00		3,00		
			2	Jumlah Kerjasama Standarisasi Mutu Produk	-	-		-		-		2,00		2,00		4,00		4,00		
		5	Program Penyelenggaraan Metrologi Legal				1.136.207.512,00		2.153.413.730,00		97.643.580,00		389.430.000,00		278.853.500,00		210.552.202,00		4.266.100.524,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
			1	Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		4 Kali		4 Kali		4 Kali		20 Kali		
	7	**Urusan Perindustrian**																		
		1	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah				104.015.960,00		31.890.000,00		2.360.000,00		-		-		668.112,00		138.934.072,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
			1	Tingkat Pertumbuhan Industri (Kecil, Menengah, Besar)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		5,00%		5,20%		5,30%		5,30%		
			2	Kapasitas Produksi Industri (Kecil, Menengah, Besar)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		25.787,00		25.963,00		26.165,00		26.165,00		
			3	Jumlah Unit Usaha Industri	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		500,00		525,00		550,00		550,00		
			4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1.500,00		1.575,00		1.650,00		1.650,00		
			5	Persentase Industri Kecil Yang Telah Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		50,00%		50,00%		55,00%		55,00%		
			6	Persentase IKM Yang Memperoleh Sertifikasi *Good Manufacturing Product*	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		40,00%		40,00%		50,00%		50,00%		
		2	Program Penataan Struktur Industri				69.789.660,00		28.999.950,00		24.372.900,00		131.419.700,00		31.848.500,00		27.223.789,00		313.654.499,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
			1	Penetapan Industri Inti/Prioritas	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1,00		1,00		1,00		1,00		
			2	Omset Industri	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		374.789.000		398.261.000		413.860.000		413.860.000		
			3	Jumlah Sentra Industri	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		5,00		5,00		5,00		5,00		
			4	Jumlah Klaster Industri	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		5,00		5,00		5,00		5,00		
		3	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial				479.925.568,00		291.771.900,00		399.147.325,00		244.040.000,00		268.119.000,00		238.648.293,00		1.921.652.086,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
			1	Jumlah Sentra Yang Telah Membentuk Asosiasi Atau Sejenisnya	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		5,00		5,00		5,00		5,00		
		4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				40.770.000,00		40.500.000,00		24.372.900,00		-		-		20.531.911,00		126.174.811,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
			1	Jumlah IKM Yang Menerapkan Teknologi Industri Tepat Guna	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		10,00		10,00		10,00		10,00		
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
	1	**Urusan Perencanaan**																		
		1	Program Perencanaan Pembangunan Dearah				1.303.308.090,00		1.126.305.050,00		711.642.764,00		1.369.189.400,00		1.257.577.600,00		1.248.625.884,00		7.016.648.788,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	Tersedianya Dokumen RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		

			2	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan			
			3	Terfasilitasinya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan			
			4	Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
			5	Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
		2	Program Pengembangan Data/Informasi			634.760.950,00		567.715.150,00		353.718.250,00		372.270.000,00		598.405.800,00		591.388.551,00		3.118.258.701,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	Tersedianya dokumen profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
			2	Tersedianya penataan dan pengelolaan Informasi Geospasial (GI) Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		
			3	Terfasilitasinya Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		
			4	Tersedianya pelayanan perizinan penelitian	1 Kegiatan	1 Kegiatan		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		4 Kegiatan		
			5	Tersedianya Profil Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka dan Profil Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Kubu Raya	10 Dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		50 Dokumen		
		3	Program Perencanaan Sosial Budaya			75.053.408,00		389.504.050,00		90.343.750,00		282.241.500,00		182.697.000,00		218.274.808,00		1.238.114.516,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			2	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			368.831.416,00		409.878.025,00		420.927.200,00		451.968.500,00		455.797.700,00		475.511.445,00		2.582.914.286,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	Jumlah Dokumen Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
			2	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		
		5	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam			312.687.830,00		273.128.050,00		239.337.400,00		271.796.400,00		332.606.400,00		336.739.859,00		1.766.295.939,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	Fasilitasi Kegiatan PPSP dan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		
			2	Persentase Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

		6	Program Perencanaan Tata Ruang			1.013.425.936,00		213.746.700,00		189.767.100,00		1.170.547.300,00		194.500.000,00		139.812.217,00		2.921.799.253,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penaataan Ruang; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		
			2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang	-	-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		2 Kegiatan		
			3	Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kubu Raya	-	-		1 Kegiatan		-		-		-		1 Kegiatan		
		7	Program Kerjasama Pembangunan			77.892.300,00		75.050.000,00		19.465.926,00		120.579.500,00		-		134.498.740,00		427486.466,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	Koordinasi Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	-	-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		4 Kegiatan		
			2	Pelaksanaan Rakor Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-		-		-		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan	
		8	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar			-		40.375.000,00		-		393.750.000,00		1.151.500.000,00		3.518.150.479,00		5.103.775.479,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	Tersedianya Dokumen *Readness Criteria*	-	-		5 Dokumen		-		5 Dokumen		5 Dokumen		-		15 Dokumen	
			2	Tersedianya Dokumen Kajian Kawasan Strategis Dan Cepat Tumbuh	-	-		5 Dokumen		-		5 Dokumen		5 Dokumen		-		15 Dokumen	
		9	Program Penelitian dan Pengembangan			-		-		-		-		100.375.000,00		120.450.000,00		220.825.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-		-		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	2	**Urusan Keuangan**																	
		1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			2.732.593.220,00		2.725.925.625,00		1.645.210.843,00		1.790.583.500,00		2.053.717.175,00		2.049.962.646,00		12.337.993.009,00	Semua SKPD
			1	Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
			2	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
			3	Predikat SAKIP	C	C		CC		CC		B		B		B		BB	
		2	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			10.792.763.198,00		8.442.898.705,00		10.092.704.905,61		11.937.521.050,00		9.318.709.200,00		9.048.995.693,00		59.633.592.752,00	Semua SKPD
			1	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Dan Kinerja	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
			2	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
			3	Persentase SKPD Yang Melaporkan Inventaris Barang Tepat Waktu	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
			4	Persentase Akuntabilitas Pelaporan Aset Daerah	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
	3	**Urusan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan**																	
		1	Program Penataan Kelembagaan			623.298.370,00		25.318.500,00		89.644.000,00		36.986.400,00		145.010.800,00		108.328.123,00		1.028.586.193,00	Sekretariat DPRD
			1	Pelantikan DPRD	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Kali		1 Kali		1 Kali		5 Kali			
			2	Pelantikan Kepala Daerah	1 Kali	1 Kali		-		-		-		1 Kali		1 Kali			
		2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur			975.906.700,00		1.478.275.025,00		3.036.476.375,00		1.430.897.300,00		4.834.827.500,00		6.658.486.453,00		18.414.869.353,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			1	Jumlah PNS yang Mengikuti Ujian Dinas	9,00	9,00		24,00		65,00		82,00		122,00		55,00		348,00	

			2	Jumlah PNS yang Mengikuti Penyesuaian Ijazah	45,00	45,00		66,00		281,00		146,00		234,00		241,00		968,00		
			3	Persentase Jumlah Peserta Diklatpim II	28,50%	28,50%		28,50%		57,10%		85,70%		100,00%		100,00%		100,00%		
			4	Persentase Jumlah Peserta Diklatpim III	36,50%	36,50%		36,50%		73,17%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			5	Persentase Jumlah Peserta Diklatpim IV	36,10%	36,10%		36,10%		72,30%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			6	Jumlah Peserta Diklat Formal	627,00	627,00		469,00		571,00		579,00		580,00		584,00		2.783,00		
			7	Jumlah Peserta Bimtek PNS	80,00	80,00		225,00		225,00		225,00		225,00		225,00		1.125,00		
			8	Jumlah Peserta Diklat Prajabatan	0,00	0,00		213,00		200,00		150,00		100,00		50,00		713,00		
			9	Jumlah Peserta Bimtek CPNS	57,00	57,00		200,00		150,00		100,00		50,00		50,00		550,00		
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				1.150.296.317,00		2.262.912.525,00		658.196.125,00		1.368.534.900,00		705.948.675,00		640.273.912,00		6.786.162.454,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			1	Jumlah Rapat Badan Pertimbangan Disiplin Pegawai (Baperdispeg)	20,00	20,00		18,00		18,00		17,00		17,00		16,00		86,00		
			2	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang Diproses	15,00	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		75,00		
		4	Program Pendidikan Kedinasan				412.486.200,00		341.612.100,00		129.915.000,00		184.530.000,00		357.252.300,00		347.126.809,00		1.772.922.409,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			1	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1.000,00		1.250,00		1.500,00		1.500,00		
		5	Program Fasilitasi Pintlah/Purna Tugas PNS				-		30.050.000,00		26.789.250,00		35.129.000,00		42.965.500,00		46.982.781,00		181.916.531,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			1	Jumlah SK Pensiun PNS	-	-		160,00		200,00		230,00		250,00		270,00		1.110,00		
	4	**Urusan Kerja Sama Dearah**																		
		1	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				144.869.200,00		70.000.000,00		73.972.825,00		449.000.000,00		366.000.000,00		440.535.696,00		1.544.378.721,00	Sekretariat Daerah
			1	Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		5,00		5,00		5,00		25,00		
	5	**Urusan Pengawasan**																		
		1	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan				-		147.430.000,00		-		19.999.900,00		-		7.366.290,00		174.796.190,00	Inspektorat Daerah
			1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal Dan BPK	100,00%	100,00%		20,00%		40,00%		60,00%		80,00%		100,00%		100%		
			2	Level APIP	-	-		-		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		
			3	Persentase OPD Yang Menerapkan SPIP	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan				57.397.284,00		107.038.000,00		16.292.000,00		35.080.000,00		39.000.000,00		34.958.199,00		299.765.483,00	Inspektorat Daerah
			1	Persentase Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti Bintek Atau Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				1.692.880.602,00		2.047.006.680,00		1.320.186.350,00		1.230.198.950,00		1.274.922.600,00		1.204.634.558,00		8.769.829.740,00	Inspektorat Daerah
			1	Jumlah LHP	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		37 Dokumen		37 Dokumen		37 Dokumen		185 Dokumen		
			2	Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		37 Dokumen		37 Dokumen		37 Dokumen		185 Dokumen		
	6	**Urusan Hukum Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan**																		
		1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				2.429.192.820,00		3.595.168.000,00		2.417.789.075,00		2.729.310.500,00		3.200.580.600,00		3.382.066.358,00		17.754.107.353,00	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD
			1	Rasio Realisasi Propemperda	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			2	Persentese Raperda Yang Disetujui DPRD	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			3	Rasio Perda Yang Dibatalkan Terhadap	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		

				Raperda Yang Ditetapkan Menjadi Perda																
			4	Persentase Permasalahan Hukum Yang Dapat Ditangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		40,00%		50,00%		60,00%		60,00%		
		2	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			9.301.001.600,00		11.400.213.500,00		8.806.644.800,00		13.179.317.100,00		16.304.132.090,00		18.241.110.676,00		77.232.419.766,00	Sekretariat DPRD
			1	Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan	7,00	7,00		21,00		22,00		24,00		24,00		28,00		119,00		
			2	Jumlah Pelaksanaan Reses	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00		
			3	Jumlah Usulan Raperda Inisiatif dan Produk Hukum	3,00	3,00		6,00		6,00		7,00		8,00		8,00		33,00		
			4	Persentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		3	Program Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah			186.091.400,00		163.391.500,00		119.885.946,00		261.146.500,00		255.246.500,00		271.898.301,00		1.257.660.147,00	Sekretariat Daerah
			1	Laporan Realisasi Kegiatan SKPD	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		4	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah			221.526.950,00		204.448.500,00		82.303.036,00		211.590.200,00		211.590.200,00		209.656.989,00		1.141.115.875,00	Sekretariat Daerah
			1	Terkendalinya Laju Inflasi Daerah	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		0,25		0,27		0,29		0,29		
			2	Jumlah SKPD yang Mengembangkan Ekonomi Kreatif	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		5,00		5,00		5,00		5,00		
	7	**Urusan Pemerintahan Umum**																		
		1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			668.203.000,00		736.600.000,00		1.159.869.000,00		1.396.030.000,00		2.252.334.500,00		2.871.956.005,00		9.084.992.505,00	Sekretariat Daerah
			1	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		10 Kali		10 Kali		10 Kali		10 Kali		
			2	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		10 Kali		10 Kali		10 Kali		10 Kali		
			3	Dialog Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		10 Kali		10 Kali		10 Kali		10 Kali		
			4	Rapat Koordinasi Unsur Muspida	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		10 Kali		10 Kali		10 Kali		10 Kali		
			5	Rapat Kerja Unsur Pimpinan Kecamatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		10 Kali		10 Kali		10 Kali		10 Kali		
		2	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat			373.736.000,00		318.886.625,00		168.034.200,00		234.603.000,00		252.283.000,00		233.212.915,00		1.580.755.740,00	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD
			1	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		3	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			969.429.300,00		277.402.000,00		420.171.600,00		566.570.000,00		571.000.000,00		513.641.495,00		3.318.214.395,00	Sekretariat Daerah
			1	Koordinasi Penegasan Batas Daerah	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			2	Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			3	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			4	Penataan dan Monitoring Administrasi Kecamatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			5	Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		4	Program Penataan Kecamatan/Kelurahan			132.331.000,00		-		22.400.000,00		-		160.000.000,00		162.641.191,00		497.372.191,00	Sekretariat Daerah
			1	Jumlah Pemekaran Kecamatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		Belum Ada Data		-		1,00		1,00		1,00		

			2	Jumlah Pembentukan Kelurahan / Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		-		Belum Ada Data		-		5,00		5,00		5,00		
		5	Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama				931.850.380,00		1.080.487.650,00		5.455.513.732,00		2.361.383.900,00		1.290.552.500,00		1.377.404.744,00		12.497.192.906,00	Sekretariat Daerah
			1	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		20,00		25,00		30,00		30,00		
			2	Jumlah Majelis Taklim yang Difasilitasi dan Dibina	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		10,00		15,00		20,00		20,00		
			3	Jumlah Lembaga Keagamaan yang Dibina	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		15,00		20,00		25,00		25,00		
			4	Jumlah Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji yang dibina/difasilitasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		250,00		300,00		350,00		350,00		
		6	Program Pemberdayaan Kecamatan				5.826.990.606,00		3.114.029.114,00		2.305.930.400,00		3.823.193.932,00		3.318.886.100,00		2.965.527.490,00		21.354.557.642,00	Sekretariat Daerah; Semua Kecamatan
			1	Tersedianya Profil Kecamatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
			2	Laporan Tahunan, Twiwulan dan Harian Camat	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
			3	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		
			4	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		Belum Ada Data		100,00%		100,00%		100,00%		
PROGRAM PADA SETIAP SKPD																				
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				31.190.218.712,44		36.655.301.247,00		38.966.596.081,79		25.128.149.614,00		26.901.103.770,00		26.116.828.408,00		184.958.197.834,00	Semua SKPD
			1	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				33.817.404.882,60		55.977.946.720,00		54.999.620.016,00		25.498.226.404,00		18.811.364.860,00		16.729.243.901,00		205.833.806.783,00	Semua SKPD
			1	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2.761.921.588,00		2.888.613.425,00		2.220.317.929,00		3.549.078.350,00		3.948.274.850,00		4.240.788.212,00		19.608.994.354,00	Semua SKPD
			1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				3.381.075.086,00		476.589.750,00		434.640.450,00		702.887.900,00		756.045.715,00		560.333.650,00		6.311.572.551,00	Semua SKPD
			1	Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		5	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				-		1.583.636.000,00		1.824.572.313,00		2.585.910.900,00		3.345.332.725,00		4.033.065.796,00		13.372.517.734,00	Semua SKPD
			1	Database E-Formasi	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
			2	Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	-	-		Belum Ada Data		Belum Ada Data		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
			3	Zona Pelayanan Publik	-	-		-		-		Hijau		Hijau		Hijau		Hijau		
			4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
			5	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	-	-		60,00%		70,00%		80,00%		80,00%		100,00%		100,00%		

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Raya Tahun Tahun 2014-2019 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, dijelaskan pada Tabel 8.1. dan Tabel 8.2. sebagai berikut :

Tabel 8.1.
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	B	B	B	B	B
2	Nilai SAKIP	-	C	CC	CC	B	B	B
3	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	90	90	90	90	90
5	Zona Pelayanan Publik	-	-	-	-	Hijau	Hijau	Hijau
6	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	-	60,00	70,00	80,00	80,00	100,00
7	% Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	8,92	6,68	7,31	10,00	15,00	20,00
8	Level 3	Level	-	-	2	2	3	3
9	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Tahun	12,34	12,55	12,84	13,01	13,18	13,36
10	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,60	6,50	6,80	7,30	7,60	7,90
11	Rata-Rata Nilai Kelulusan	-	7,40	7,50	7,60	7,80	7,90	8,00
12	Sekolah Terakreditasi "A"	-	0	0	8	10	12	14
13	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,64	69,74	69,77	69,81	69,86	69,90
14	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran	Belum Ada Data	104	130	120	110	102
15	Angka Kematian Balita (AKB)	Per 1.000 kelahiran hidup	48	25	49	40	27	23
16	% Puskesmas Terakreditasi	%	0	5	10	12	16	20
17	% Permasalahan Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	%	100,00	100,00	50,00	0,00	25,00	100,00
18	Angka kriminal	Kasus	529	489	3.688	2.500	2.000	1.500
19	% Pertumbuhan ekonomi	%	6,28	6,36	6,37	7,30	7,40	7,50
20	Indeks Gini	-	0,42	0,32	0,34	0,34	0,32	0,30
21	Pengeluaran per kapita per tahun	Ribu	7.973,33	7.993,68	8.145,00	8.203,04	8.261,50	8.320,37
22	% Tingkat kemiskinan	%	6,27	6,00	5,70	5,40	5,10	4,80
23	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Juta	Belum Ada Data	3.486.851,231	4.016.235,877	4.625.993,353	5.328.326,114	6.137.289,228

24	Jumlah investor berskala nasional	-	243	255	267	281	295	311
25	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,18	6,11	6,42	6,02	5,10	4,80
26	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,79	1,22	1,72	1,70	1,67	1,65
27	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Juta	2.442.677,3	2.513.050,5	2.688.748,5	2.776.162,5	2.866.418,3	2.959.608,5
28	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Juta	5.386.861,1	6.069.702,0	6.727.703,2	7.245.090,9	7.802.267,8	8.402.293,9
29	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	Juta	72.636,6	84.714,7	91.371,8	98.635,0	106.475,6	114.939,4
30	Kunjungan wisata	Orang	57.855	60.508	45.139	52.262	56.235	60.510
31	Indeks Mobilitas	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	0,65	0,75	0,85
32	Indeks Konektivitas	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	0,60	0,70	0,80
33	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00	75,00	80,00
34	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	80,32	80,32	94,79	95,15	96,00	97,00
35	Ketaatan terhadap RTRW	%	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	75,00	80,00	85,00
36	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00	75,00	80,00
37	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00	72,00	75,00
38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Baik	Baik	Baik

Tabel 8.2.
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KUBU RAYA

Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah					Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**Terkait Pelayanan Dasar**										
	1	**Pendidikan**									
		1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun								
			1	Peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket A	98,45%	98,74%	99,72%	-	-	-	-
			2	Peningkatan APK SD/SDLB/MI/Paket A	112,94%	113,82%	113,82%	-	-	-	-
			3	Peningkatan APM SMP/SMPLB/Mts/ Paket B	75,71%	81,37%	89,08%	-	-	-	-
			4	Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	90,89%	92,27%	95,64%	-	-	-	-
			5	Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	101,12%	101,25%	102,58%	-	-	-	-
			6	Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMA/SMALB/SMK/MA/ Paket C	68,15%	68,24%	68,26%	-	-	-	-
			7	Persentase Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A	0,11%	0,52%	0,57%	-	-	-	-
			8	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	0,51%	0,59%	0,67%	-	-	-	-
			9	Persentase Angka Mengulang Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A	2,43%	2,45%	2,43%	-	-	-	-
			10	Persentase Angka Mengulang Sekolah SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	0,86%	0,88%	0,86%	-	-	-	-
			11	Persentase Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-
			12	Persentase Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	99,87%	99,95%	99,97%	-	-	-	-
			13	Rata-Rata Hasil Ujian SD/MI	6,39	6,43	6,56	-	-	-	-
			14	Rata-Rata Hasil Ujian SMP/MTs	7,00	7,03	7,41	-	-	-	-
		2	Program Pendidikan Anak Usia Dini								
			1	Peningkatan APK TK/RA/PAUD	62,72%	62,82%	62,86%	46,58%	92,00%	93,00%	93,00%
		3	Program Pendidikan Non Formal								
			1	Rata-Rata Lama Sekolah	6,41	6,56	6,57	6,62	6,67	6,72	6,72
			2	Rata-rata Harapan Lama Sekolah	12,34	12,55	12,84	13,,01	13,18	13,35	13,35
			3	Angka Melek Huruf	97,68%	97,74%	97,75%	97,76%	99,00%	99,25%	99,25%
		4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
			1	Persentase Guru Yang Berkualifikasi S1/D4	56,82%	66,73%	76,58%	78,56%	90,00%	94,00%	94,00%
			2	Persentase Guru Yang Bersertifikasi Pendidik	26,51%	32,44%	33,49%	34,86%	70,00%	75,00%	75,00%
			3	Persentase Sekolah Yang Terakreditasi	10,12%	10,38%	11,04%	12,82%	80,00%	80,00%	80,00%
		5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan								
			1	Persentase Sekolah Yang Menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
		6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
			1	Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	2,00	5,00	5,00	5,00
		7	Program Peningkatan Kinerja Sekolah Cerdas								
			1	Jumlah Sekolah Berprestasi	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5,00	5,00	5,00	5,00
		8	Program Pendidikan Sekolah Dasar								
			1	Peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket A	-	-	-	91,61%	95,00%	97,00%	97,00%
			2	Peningkatan APK SD/SDLB/MI/Paket A	-	-	-	101,61%	100,00%	100,00%	100,00%
			3	Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	-	-	-	111,52%	100,00%	100,00%	100,00%

			4	Persentase Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A	-	-	-	0,83%	0,20%	0,10%	0,10%
			5	Persentase Angka Mengulang Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A	-	-	-	2,42%	2,42%	2,40%	2,40%
			6	Persentase Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			7	Rata-Rata Hasil Ujian SD/MI	-	-	-	5,68	7,30	7,40	7,40
		9	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
			1	Peningkatan APM SMP/SMPLB/Mts/ Paket B	-	-	-	91,00%	93,00%	95,00%	95,00%
			2	Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	-	-	-	90,02%	99,00%	100,00%	100,00%
			3	Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMA/SMALB/SMK/MA/ Paket C	-	-	-	74,67%	100,00%	100,00%	100,00%
			4	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	-	-	-	1,69%	0,59%	0,56%	0,56%
			5	Persentase Angka Mengulang Sekolah SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	-	-	-	0,84%	0,82%	0,80%	0,80%
			6	Persentase Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	-	-	-	98,43%	100,00%	100,00%	100,00%
			7	Rata-Rata Hasil Ujian SMP/MTs	-	-	-	5,06	7,10	7,30	7,30
	2	**Kesehatan**									
		1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
			1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Belum Ada Data	72,00%	74,00%	76,00%	78,00%	80,00%	80,00%
			2	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	Belum Ada Data	71,00%	72,00%	73,00%	74,00%	75,00%	75,00%
			3	Cakupan Kunjungan Nifas Lengkap (KFL)	Belum Ada Data	80,00%	82,00%	84,00%	88,00%	90,00%	90,00%
			4	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL)	Belum Ada Data	75,00%	78,00%	81,00%	85,00%	90,00%	90,00%
			5	Cakupan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah	Belum Ada Data	30,00%	40,00%	50,00%	55,00%	60,00%	60,00%
			6	Persentase Penderita Gangguan Jiwa Bebas Pasung	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			7	Cakupan Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
			8	Proporsi Bebas Cries Gigi Pada Usia 6 Tahun	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	85,00%	100,00%	100,00%
			9	Persentase Puskesmas Melaksanakan Program UKCS	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
			10	Persentase Puskesmas Melaksanakan Screening Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
			11	Persentase Puskesmas Melaksanakan Pemeriksaan dan Surveilans Jamaah Haji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita								
			1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi (Kunjungan Bayi)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%
			2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	85,00%	90,00%	95,00%	95,00%
			3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%
		3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
			1	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	93,55%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2	Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas	47,38%	50,00%	55,00%	60,00%	60,00%	70,00%	70,00%
			3	Rasio Kebutuhan : Ketersediaan Obat	93,55%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			4	Persentase Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			5	Persentase Apotek, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan Yang Memiliki Izin	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			6	Persentase Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Berizin	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
		4	Program Pengawasan Obat dan Makanan								
			1	Persentase Pengawasan Penyalahgunaan Obat dan Bahan Berbahaya di Masyarakat	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	75,00%	80,00%	90,00%	90,00%
			2	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Bagi Masyarakat	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	75,00%	80,00%	90,00%	90,00%
		5	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya								
			1	Ratio Bed Rawat Inap per 10.000 Penduduk	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 : 5.250	1 : 5.100	1 : 5.000	1 : 5.000
			2	Rasio Puskesmas, poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 : 11.000	1 : 10.500	1 : 10.000	1 : 10.000
			3	Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	Belum Ada Data	Belum Ada Data	10,00	10,00	15,00	20,00	20,00
		6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
			1	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Oleh Sarana Kesehatan (Rumah Sakit)	Belum Ada Data	-	Belum Ada Data	-	-	70,00%	70,00%

			2	Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas/Balai Pengobatan/Praktek Bersama dan Perorangan	Belum Ada Data	-	Belum Ada Data	-	-	90,00%	90,00%
			3	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Terakreditasi	Belum Ada Data	-	3,00	-	-	9,00	9,00
			4	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Belum Ada Data	-	10,00	12,00	16,00	20,00	20,00
			5	Persentase Kasus Gawat Darurat Yang Ditangani Dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
			6	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memiliki Ijin Operasional	Belum Ada Data	-	Belum Ada Data	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
		7	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin								
			1	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Belum Ada Data	1,46%	1,61%	1,95%	3,08%	4,71%	4,71%
		8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
			1	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	100,00%	99,20%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (TSR)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			3	Persentase Prevalensi HIV	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%
			4	Perentase ODHA Yang Mendapat Pengobatan ARV	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			5	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
			6	Persentase Kasus DBD Ditangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			7	Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	< 25	< 25	< 25	< 25
			8	Persentase Penemuan Penderita Diare	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
			9	Jumlah Kematian Balita Karena Diare	0	0	0	0	0	0	0
			10	Persentase Anak Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	70,90%	69,70%	73,60%	90,00%	95,00%	95,00%	95,00%
			11	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	62,90%	67,80%	61,00%	57,60%	80,00%	85,00%	85,00%
			12	Penemuan Kasus AFP Non Polio per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00
			13	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Yang Dilakukan Penanggulangan < 24 Jam	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			14	Angka Kesakitan Malaria (API/1000 Penduduk)	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
			15	Persentase Penanganan Penderita Malaria	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			16	Persentase Kasus Filariasis Yang Mendapat Pengobatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			17	Persentase Cakupan Penemuan Kasus Baru Kusta Tanpa Cacat	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	95,00%	95,00%
			18	Persentase Kasus Kusta Yang Selesai	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
		9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
			1	Prevalensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Belum Ada Data	10,00	50,00	65,00	80,00	90,00	90,00
			2	Persentase Ibu hamil KEK Yang Mendapat Makanan Tambahan	Belum Ada Data	10,00%	50,00%	65,00%	80,00%	90,00%	90,00%
			3	Prevalensi Ibu Hamil Anemia	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	32,00	30,00	28,00	28,00
			4	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Tambah Darah	Belum Ada Data	85,00%	85,00%	87,00%	88,00%	90,00%	90,00%
			5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	Belum Ada Data	39,00%	42,00%	44,00%	47,00%	50,00%	50,00%
			6	Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	Belum Ada Data	39,00%	42,00%	44,00%	47,00%	50,00%	50,00%
			7	Prevalensi Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	8,00	8,00	8,00	8,00
			8	Prevalensi Kasus Balita Gizi Buruk	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	0,65%	0,65%	0,50%	0,50%
			9	Persentase Anak Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			10	Persentase prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Baduta (Bawah 2 Tahun)	Belum Ada Data	29,10%	29,30%	34,80%	30,00%	25,00%	25,00%
			11	Persentase Remaja Putri Yang Mendapat Tablet Tambah Darah	Belum Ada Data	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	30,00%	30,00%
			12	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Balita Usia 6-24 Tahun Dari Keluarga Miskin	Belum Ada Data	46,00%	60,00%	75,00%	80,00%	90,00%	90,00%
		10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								
			1	Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	85,00%	90,00%	90,00%
			2	Persentase Cakupan Rumah Tangga Sehat	60,00%	65,00%	70,00%	72,00%	75,00%	75,00%	75,00%
			3	Persentase Posyandu Dengan Strata Mandiri	2,00%	2,00%	5,00%	4,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat								

			1	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	24,00	24,00	24,00	32,00	39,00	45,00	45,00
			2	Jumlah Desa ODF	10,00	10,00	10,00	14,00	16,00	20,00	20,00
			3	Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			4	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
			5	Persentase Penduduk Dengan Akses Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan	60,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			6	Persentase Penduduk Dengan Akses Jamban Sehat	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			7	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Lingkungan	50,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			8	Persentase Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	50,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
		12	Program Peningkatan Kesehatan Lansia								
			1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	95,00%	100,00%	100,00%
		13	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak								
			1	Cakupan Persalinan Yang Ditolong Oleh Nakes Yang Mempunyai Kompetensi Kebidanan	Belum Ada Data	90,00%	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%	95,00%
		14	Program Penyusunan Sistem Informasi Kesehatan								
			1	Penyusunan Profil Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
		15	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Kesehatan								
			1	Persentase Peningkatan Mutu Manajemen Kesehatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
		16	Program Monitoring Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya								
			1	Persentase Monitoring dan Pendataan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Belum Ada Data	-	-	85,00%	90,00%	100,00%	100,00%
	3	**Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**									
		1	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan								
			1	Rasio Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik Dan Sedang	36,00%	44,00%	52,00%	59,00%	67,00%	75,00%	75,00%
			2	Rasio Jembatan Kondisi Baik Dan Sedang	36,00%	44,00%	52,00%	59,00%	67,00%	75,00%	75,00%
			3	Kejelasan Status Jalan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Ada	Ada	Ada	Ada
			4	Panjang Jalan Antar Kecamatan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang	240.186 Km	303.511 Km	271.300 Km	282.543 Km	294.252 Km	306.446 Km	306.446 Km
			5	Tingkat Aksesibilitas (Panjang Jalan/Luas Wilayah)	34,38	43,45	38,84	40,45	42,12	43,87	43,87
			6	Panjang Jalan Kawasan Perbatasan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	14.792 Km	15.931 Km	17.563 Km	17.563 Km
			7	Tersedianya Jalan Lingkar Untuk Meningkatkan Aksesibilitas	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Ada	Ada	Ada	Ada
		2	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan								
			1	Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan/ Jembatan Kabupaten	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	75 Km	75 Km	75 Km	BAD
			2	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin Per Tahun	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	150 Km	150 Km	150 Km	750 Km
			3	Jumlah Jembatan Kondisi Rusak Yang Direhabilitasi Per Tahun	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5 Unit	5 Unit	5 Unit	25 Unit
		3	Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan								
			1	Rasio Panjang Jalan Rusak Akibat Bencana Yang Direhabilitasi	-	-	-	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			2	Rasio Jumlah Jembatan Rusak Akibat Bencana Yang Direhabilitasi	-	-	-	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
		4	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong								
			1	Rasio Drainase Jalan Kondisi Baik Dan Sedang	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%
			2	Rasio Drainase Lingkungan Permukiman Kondisi Baik Dan Sedang	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%
		5	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan								
			1	Tercukupinya Sapras Kebinamargaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	-	-	-	-
		6	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya								
			1	Jumlah Sungai Percontohan Bebas Sampah	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	-	-	-
			2	Persentase Panjang Sempadan Sungai Utama Berupa Ruang Terbuka Hijau	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	-	-	-
		7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah								

			1	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum Yang Aman	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			2	Persentase Satuan Permukiman (RW) Yang Memiliki IPAL Komunal	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
			3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
			4	Persentase Desa Yang Memiliki BPSPAM	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
		8	Program Perencanaan Tata Ruang								
			1	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kabupaten Kubu Raya	-	Belum Ada Data	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
		9	Program Pemanfaatan Ruang								
			1	Tersedianya SOP Layanan Informasi Dan Rekomendasi Tata Ruang	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Ada	Ada	Ada	Ada
			2	Adanya Kebijakan Perijinan Pemanfaatan Ruang	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Ada	Ada	Ada	Ada
		10	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang								
			1	Ketaatan Terhadap RTRW	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2	Adanya Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	Ada	Ada	Ada	Ada
			3	Rasio Bangunan Gedung Ber-IMB	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
			4	Rasio Bangunan/Rumah Yang Tidak Sesuai Dengan Pemanfaatan Ruang/RDTR	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	35,00%	30,00%	25,00%	25,00%
		11	Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum								
			1	Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
			2	Rasio Panjang Jalan Yang Sudah Mendapatkan Penerangan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
		12	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya								
			1	Jumlah Pintu Air Dalam Kondisi Baik	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	10 Unit	15 Unit	20 Unit	20 Unit
			2	Persentase Saluran/ Sungai Yang Sudah Dinormalisasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			3	Persentase Jaringan Rawa Dalam Kondisi Baik	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
			4	Jumlah Database SDA Yang Berbasis Aplikasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Database	1 Database	1 Database	5 Database
		13	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku								
			1	Rasio Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
			2	Persentase Cakupan Sarana Air Bersih Terhadap Penduduk	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
		14	Program Pengendalian Banjir								
			1	Persentase Pemeliharaan Rutin Pusat-Pusat Pengendali Banjir	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
			2	Persentase Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
			3	Persentase Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00%	55,00%	60,00%	60,00%
		15	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong								
			1	Rasio Turap /Talud/Bronjong Terhadap Aliran Sungai/Parit	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	-	75,00%	75,00%
			2	Panjang Turap /Talud/Bronjong Dalam Kondisi Baik	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	-	3.082 Km	3.082 Km
		16	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh								
			1	Persentase Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	-	50,00%	60,00%
	4	**Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**									
		1	Program Lingkungan Sehat Perumahan								
			1	Persentase KK Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Dasar	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
			2	Persentase KK Ber-akses Sanitasi Layak	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
			3	Persentase Kawasan Kumuh	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	40,00%	35,00%	30,00%	30,00%
			4	Persentase Luas Permukiman Yang Tertata	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
		2	Program Pengembangan Perumahan								
			1	Rasio Rumah Layak Huni	-	-	-	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			2	Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni	-	-	-	35,00%	30,00%	25,00%	25,00%
		3	Perumahan Pengelolaan Areal Pemakaman								
			1	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6
		4	Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan								
			1	Persentase Meningkatnya Kualitas Kebersihan Lingkungan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%

5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**									
	1	Program Pendidikan Politik Masyarakat								
		1	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Belum Ada Data	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00
		2	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	Belum Ada Data	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	9,00
		3	Tingkat Partisipasi Pemilih	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	70,00%	75,00%	75,00%
	2	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah								
		1	Jumlah Kegiatan Penegakan Perda	-	4 Kali	4 Kali	4 Kali	8 Kali	8 Kali	28 Kali
	3	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaaan								
		1	Frekuensi Pertemuan FKUB Dengan Elemen Masyarakat	Belum Ada Data	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	8 Kali	24 Kali
	4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
		1	Jumlah Ormas Penerima Hibah/Bantuan Sosial	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	14,00	14,00	12,00	40,00
	5	Program Kewaspadaan Dini/Daerah								
		1	Persentase Terjadinya Konflik Sosial Masyarakat	-	Belum Ada Data	-	35,00%	30,00%	25,00%	25,00%
	6	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal								
		1	Persentase Kriminalitas Yang Tertangani	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
		2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	-	4 Titik PKL	4 Titik PKL	1 Titik PKL	1 Titik PKL	3 Titik PKL	13 Titik PKL
	7	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)								
		1	Jumlah Penyakit Masyarakat (Pekat) yang ditangani	-	10 Kali	10 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	29 Kali
		2	Persentase Pokmas yang Aktif	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
	8	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan								
		1	Cakupan Patroli Pengamanan Wilayah / Per Satuan Wilayah	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1.000	1.250	1.500	1.500
		2	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Kabupaten	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
		3	Jumlah Linmas	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	8.750	9.250	9.750	9.750
		4	Persentase Linmas Terlatih	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
		5	Rasio Poskamling Per 10.000 Penduduk	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	35,00	30,00	25,00	25,00
		6	Persentase Poskamling Aktif	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
		7	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%
	9	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam								
		1	Angka Kejadian Bencana	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	40,00	35,00	30,00	30,00
		2	Persentase Bencana Alam Yang Dapat Ditanggulangi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%
	10	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan								
		1	Titik Hotspot	-	-	Belum Ada Data	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Program Rehabilitasi Pasca Bencana								
		1	Persentase Fasilitas Yang Diperbaiki Setelah Bencana	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00
	12	Progam Penanggulangan Kedaruratan Bencana								
		1	Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
	13	Program Kesiapsiagaan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran								
		1	Tercapainya Respon Time Pemadam Kebakaran 11 Menit (SPM)	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	< 11 menit	< 11 menit	< 11 menit	< 11 menit
		2	Persentase Pasar Tradisional Yang Terpasang Sistem Pemadam Kebakaran	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
		3	Tercapainya Respon Time Penanggulangan Bencana < 30 Menit	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	< 30 menit	< 30 menit	< 30 menit	< 30 menit
	14	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan								
		1	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Belum Ada Data	-	-	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
6	**Sosial**									
	1	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
		1	Persentase PMKS Yang Terlayani Jaminan Sosial	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
		2	Persentase PMKS Yang Mendapat Bansos	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00%	55,00%	60,00%	60,00%
		3	Persentase Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Tertangani	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
		4	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Serta Lanjut Usia Yang Menerima Jaminan Sosial	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%

			5	Persentase PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Melalui KUBE atau Sejenis Lainnya	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
		2	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
			1	Persentase Lembaga Sosial Yang Berdaya, Efektif Dan Mandiri	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
		3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								
			1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Belum Ada Data	-	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			2	Persentase PMKS Mandiri	Belum Ada Data	-	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			3	Rasio PMKS Yang Tertangani	Belum Ada Data	-	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
		4	Program Keluarga Harapan								
			1	Persentase Pelaksanaan Bimtek Pendamping dan Operator PKH	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
			2	Jumlah peserta PKH	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00	150,00	175,00	175,00
		6	Program Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan								
			1	Jumlah Penerima Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan	Belum Ada Data	-	Belum Ada Data	-	10,00	10,00	50,00
		7	Program Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial								
			1	Jumlah Bimtek Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1,00	1,00	1,00	1,00
2	**Tidak Terkait Pelayanan Dasar**										
	1	**Tenaga Kerja**									
		1	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja								
			1	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%
			2	Kualitas Tenaga Kerja Rasio Kelulusan S1, S2, S3	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50 : 20 : 1	25 : 10 : 1	10 : 5 : 1	10 : 5 : 1
			3	Persentase Pelatihan Yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%
		2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja								
			1	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			2	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,18	6,11	6,42	6,08	6,05	6,02	6,02
			3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	2,00	2,00	2,00	8,00
			4	Persentase Perusahaan / Industri Yang Menjalin Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,01	67,60	68,78	69,98	71,20	72,69	72,69
		3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								
			1	Persentase Tenaga Kerja Yang Terlindung Haknya	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%
			2	Penetapan Upah Minimum Kabupaten	1.390.000	1.580.000	1.761.700	1.907.040	2.075.000	2.248.116	2.248.116
			3	Persentase Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan dan Perusahaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%
		4	Program Transmigrasi Lokal								
			1	Jumlah Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
			2	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
		5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan								
			1	Persentase Monitoring Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
			2	Persentase Sosialisasi Tentang Ketenagakerjaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
		6	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi								
			1	Persentase Identifikasi Wilayah dan Kawasan Transmigrasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	55,00%	60,00%	65,00%	65,00%
			2	Jumlah Kepala Keluarga Penempatan Transmigran	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	10,00	0,00	50,00	60,00
	2	**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**									
		1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan								
			1	Persentase Sosialisasi Mengenai Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
			2	Persentase Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%

			3	Persentase Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			4	Persentase Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
		2	Program Penguatan Kelembagaan Pengerusutamaan Gender dan Anak								
			1	Persentase Pengaduan Korban Kekerasan Anak Yang Ditangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			2	Persentase Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			3	Jumlah Lembaga Layanan Aktif Tingkat Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	20,00	26,00	30,00	30,00
			4	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan PP Dan PA	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	10,00	13,00	15,00	15,00
		3	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan								
			1	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	30,00%	40,00%	50,00%	50,00%
			2	Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
			3	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan	30,91%	31,00%	35,38%	37,01%	38,71%	40,49%	40,49%
		4	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan								
			1	Rasio KDRT Perempuan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	4,60	4,80	5,00	5,00
			2	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	15,00%	15,00%	12,50%	12,50%
			3	Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 Tahun Ke Atas	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	97,72%	99,0%	99,25%	99,25%
			4	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	3,10	3,30	3,50	3,50
			5	Jumlah Desa Ramah Anak	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	12,00	16,00	20,00	20,00
			6	Jumlah Puskesmas Ramah Anak	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	12,00	16,00	20,00	20,00
		5	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat								
			1	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kesehatan di Masyarakat	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5,00	5,00	5,00	25,00
	3	**Pangan**									
		1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan								
			1	Rata-rata Konsumsi Pangan Per Kapita	Belum Ada Data	Belum Ada Data	99,07%	99,29%	99,51%	99,72%	99,72%
			2	Rata-Rata Konsumsi Protein Nabati	Belum Ada Data	Belum Ada Data	7,91%	8,72%	9,53%	10,34%	10,34%
			3	Rata-Rata Konsumsi Protein Hewani	Belum Ada Data	Belum Ada Data	56,88%	55,92%	54,95%	53,99%	53,99%
			4	Rata-Rata Konsumsi Ikan Per Kapita	Belum Ada Data	Belum Ada Data	4,50%	4,40%	4,30%	4,20%	4,20%
			5	Jumlah Lumbung Pangan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	27,00	30,00	33,00	33,00
			6	Jumlah Desa Mandiri Pangan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
			7	Skor PPH	Belum Ada Data	Belum Ada Data	83,60%	86,40%	89,10%	91,80%	91,80%
	4	**Pertanahan**									
		1	Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah								
			1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat / Persentase Lahan Tanah Aset Daerah Yang Disertifikatkan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		2	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan								
			1	Persrentase Penyelesasian Kasus Tanah Negara	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2	Persentase Penyelesaian Sengketa Ijin Lokasi atau Konflik Pertanahan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	5	**Lingkungan Hidup**									
		1	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup								
			1	Indeks Kualitas Air	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Baik	Baik	Baik	Baik
			2	Indeks Kualitas Udara	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Baik	Baik	Baik	Baik
			3	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Dokumen AMDAL	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			4	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Dokumen UKL dan UPL	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			5	Persentase Usaha Dan/Atau Kegiatan yg wajib AMDAL/UKL dan UPL Yang Diawasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%

			6	Jumlah Sentra Industri Rumah Tangga /UMKM Yang Memiliki IPAL	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	15,00	17,00	20,00	20,00
		2		Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup							
			1	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
			2	Tersedianya Dokumen Status Lingkungan Hidup	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
			3	Persentase Aduan Masyarakat Di Bidang PPLH Yang Ditangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
			4	Prosentase Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) minimal "Biru"	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%
			5	Prosentase Tingkat Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
			6	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya ALam Dan Lingkungan Hidup	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	55,00%	65,00%	75,00%	75,00%
			7	Tingkat Peran Serta Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya ALam Dan Lingkungan Hidup	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
		3		Program Peningkatan Pengendalian Polusi							
			1	Tingkat Pencemaran Kualitas Udara	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Di Atas Baku Mutu	Di Atas Baku Mutu	Di Atas Baku Mutu	Di Atas Baku Mutu
			2	Tingkat Pencemaran Kualitas Air	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			3	Prosentase kendaraan bermotor yang memenuhi Uji Emisi	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	85,00%	90,00%	95,00%	95,00%
			4	Persentase Kegiatan Usaha Yang Mempunyai IPAL	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00%	60,00%	65,00%	65,00%
		4		Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam							
			1	Persentase Luas Lahan Kritis	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00%	45,00%	40,00%	40,00%
			2	Persentase Sumber Mata Air Yang Rusak	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%
			3	Persentase Tutupan vegetasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
			4	Kualitas Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
			5	Indeks Keanekaragaman hayati	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1,00	1,00	1,00	1,00
			6	Indeks Daya Tampung dan daya Dukung Lingkungan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	DDL < 1	DDL < 1	DDL < 1	DDL < 1
		5		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah							
			1	Persentase Penanganan Sampah	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	55,00%	65,00%	75,00%	75,00%
			2	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per satuan Penduduk	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	0,60	0,70	0,80	0,80
			3	Persentase Komunitas Yang Menerapkan Asas Zero Waste Ketika Menyelenggarakan Event Publik	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
			4	Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Praktik Pemilahan Sampah	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%
			5	Penghargaan Adipura	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1,00	1,00	1,00	5,00
		6		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
			1	Luas RTH Per Luas Kawasan Perkotaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	38,00	39,00	40,00	40,00
			2	Persentase Luas RTH Milik Publik	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%
			3	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	15,00	17,00	20,00	20,00
	6	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**									
		1		Program Penataan Administrasi Kependudukan							
			1	Rasio Kepemilikan KTP Elektronik	81,53%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran Bagi bayi (0-1 Tahun)	76,06%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			3	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran (Semua Penduduk)	38,78%	75,00%	80,00%	85,00%	87,51%	89,11%	89,11%
			4	Rasio Kepemilikan Akta Kematian	53,11%	60,34%	62,24%	64,56%	65,73%	67,12%	67,12%
			5	Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Usia 0-16 Tahun)	-	-	-	-	3,11%	7,13%	7,13%
		2		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Kependudukan							
			1	Persentase Dokumen/Arsip Kependudukan Yang Tersimpan Rapi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
	7	**Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**									
		1		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							
			1	Persentase Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

			2	Persentase Pembinaan Pemilihan Kepala Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			3	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	10,00	10,00	10,00	50,00
			4	Persentase Tertibnya Administrasi Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		2	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan ADD (Desa)								
			1	Persentase Desa Yang Menyusun APBDes dan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Sesuai Ketentuan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
			1	Jumlah Kelompok Binaan LPM	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	75,00	75,00	75,00	75,00
		4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan								
			1	Jumlah BUMDes/BUMADES	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	20,00	30,00	40,00	40,00
			2	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	15,00	20,00	25,00	25,00
		5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
			1	Jumlah Penerima Hibah/Bantuan Sosial	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5,00	-	-	5,00	25,00
		6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								
			1	Persentase Terlaksananya Musyawarah Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			2	Persentase Pelaksanaan Perlombaan Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	40,00%	50,00%	60,00%	60,00%
			3	Persentase Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Rong	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			4	Persentase Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00%	55,00%	60,00%	60,00%
			5	Jumlah Pameran Teknologi Tepat Guna	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
			6	Persentase Pembinaan Desa Model	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	55,00%	65,00%	75,00%	75,00%
			7	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
			8	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Pendampingan Desa Binaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%
			9	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengembangan Karang Taruna	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
			10	Jumlah Pelatihan BKD dan BKAD	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
			11	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
			12	Persentase Indeks Desa Membangun kategori "Maju/Mandiri".	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
		7	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan PNPM								
			1	Persentase Kegiatan Pendampingan PNPM-MPd Generasi Sehat dan Cerdas	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%
		8	Program Penataan Wilayah Administrasi Desa								
			1	Jumlah Pembentukan, Pemekaran dan Penghapusan Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1,00	1,00	1,00	5,00
			2	Persentase Penyelesaian Tata Batas Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			3	Persentase Terselesainya Peta Administrasi Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			4	Jumlah Profil Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1,00	1,00	1,00	1,00
		9	Program Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Aset Desa								
			1	Persentase Laporan Inventarisasi Aset Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		10	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								
			1	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%
	8	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga**									
		1	Program Keluarga Berencana								
			1	Persentase Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon Bagi Keluarga Miskin	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			2	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			3	Pelaksanaan Rakerda Program KB	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1,00	1,00	1,00	5,00
			4	Pelaksanaan Pertemuan Koordinator KB dan PLKB	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	2 Kali	2 Kali	2 Kali	10 Kali
			5	Pelaksanaan Bulan Bhakti Keluarga Berencana (KB), Keluarga Sejehtera (KS)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
			6	Penyusunan Grand Design Pengendalian Kependudukan Kabupaten Kubu Raya	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
		2	Program Pelayanan Kontrasepsi								

			1	Persentase Pelayanan Konseling KB	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
			2	Persentase Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	55,00%	65,00%	75,00%	85,00%
		3	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak								
			1	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	15,00	20,00	25,00	25,00
		4	Program Kesehatan Reproduksi Remaja								
			1	Persentase Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
		5	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri								
			1	Persentase Penguatan Kapasitas Kelembagaan Posyandu	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%
			2	Persentase Penguatan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan Keluarga Berencana	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%
		6	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR								
			1	Jumlah Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5,00	7,00	10,00	10,00
			2	Jumlah Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5,00	10,00	15,00	15,00
		7	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga								
			1	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00	75,00	100,00	100,00
		8	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB								
			1	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%
	9	**Perhubungan**									
		1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan								
			1	Tersedianya Stiker Tanda Pendaftaran Kapal	Belum Ada Data	600.000	280,00	280,00	600,00	600,00	600,00
			2	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas SDP	Belum Ada Data	-	-	1,00	1,00	4,00	4,00
			3	Terlaksananya Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Belum Ada Data	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
			4	Dokumen Analisa Database Pelayanan Jasa Angkutan	Belum Ada Data	-	-	-	-	1,00	1,00
			5	Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Supir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan	Belum Ada Data	-	-	-	1,00	1,00	1,00
			6	Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	Belum Ada Data	-	-	-	2,00	2,00	2,00
			7	Fasilitasi Pelajar, Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Belum Ada Data	-	-	-	4,00	4,00	4,00
		2	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas								
			1	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Sungai	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
			2	Pengadaan Skala Tinggi Air	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	-	1,00	1,00
			3	Persentase Pengerukan Alur Pelayaran	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
			4	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			5	Persentase Pagar Pengaman Jalan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			6	Persentase Pengamanan dan Pengawasan Angkutan Hari Raya	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			7	Persentase Pembuatan marka jalan " Zona Selamat Sekolah"	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			8	Persentase Pemasangan Lampu Peringatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			9	Persentase Pemasangan Patok Pengaman Jalan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			10	Persentase Pembuatan Zebra Cross dan Marka Jalan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			11	Persentase Pemasangan Traffic Light di Persimpangan Jalan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
		3	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor								
			1	Persentase Kelengkapan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			2	Persentase Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			3	Persentase Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Air	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			4	Jumlah Buku Uji dan Plat Tanda Uji Kendaraan Bermotor	Belum Ada Data	1.000 Buku Uji, 8.300 Plat Tanda Uji	1.500 Buku Uji, 3.000 Plat Tanda Uji, 3.555 Stiker	3.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 1.480 Stiker	4.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 3.000 Stiker	4.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 3.000 Stiker	4.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 3.000 Stiker
		4	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan								

			(LLASDP)								
			1	Persentase/Tingkat Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Penyeberangan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
		5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas (LLAJ)								
			1	Persentase/Tingkat Pemeliharaan Terminal Angkutan Darat	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	-	85,00%	90,00%	90,00%
		6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan								
			1	Jumlah Dermaga/Steigher	174,00	14,00	27,00	18,00	20,00	20,00	20,00
			2	Jumlah Halte	2,00	-	-	-	-	2,00	2,00
			3	Jumlah Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-	-	-	-	1,00	1,00
			4	Jumlah Terminal Angkutan Barang	-	-	-	-	-	1,00	1,00
		7	Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan								
			1	Dokumen Database Alur Pelayaran	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen
			2	Tersedianya Lahan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga	-	-	-	-	10,00 Ha	10,00 Ha	10,00 Ha
			3	Dokumen DED Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen
			4	Dokumen Perencanaan Tempat-Tempat Pemberhentian Umum	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen
			5	Dokumen Database Bidang Perhubungan	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
			6	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
			7	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen
			8	Evaluasi dan Verifikasi TUKS	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen
	10	**Komunikasi Dan Informatika**									
		1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknolgi								
			1	Persentase Interkoneksi Internet Dan Jaringan Intranet Kabupaten Ke Desa, kecamatan Dan OPD	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%
			2	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1,00	1,00	1,00	1,00
			3	Persentase Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00%	55,00%	60,00%	60,00%
		2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa								
			1	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemda/Bermitra Dengan Pemda	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	2,00	2,00	2,00	2,00
		3	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informatika								
			1	Persentase Aparatur Yang memiliki Kompetensi Berbasis TIK	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	-	-	75,00%	75,00%
		4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik								
			1	Persentase Jumlah Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			2	Persentase Jumlah Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Kabupaten Kubu Raya	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			3	Jumlah Buletin Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Yang Diterbitkan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	12,00	12,00	12,00	60,00
			4	Jumlah Buletin Parlementaria Yang Diterbitkan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	12,00	12,00	12,00	60,00
		5	Program Pengembangan dan Implementasi E-Government								
			1	Jumlah Aplikasi Yang Dibangun	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1,00	1,00	1,00	5,00
			2	Jumlah Dokumen E-Government Yang Diterbitkan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5,00	5,00	5,00	25,00
		6	Program Implementasi LPSE								
			1	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui LPSE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
			2	Persentase Sanggah Banding Dari Penyedia Terhadap Proses Pelelangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	0%
			3	Pemenuhan Minimal 9 Standar LPSE 2014	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	9 Standar LPSE 2014 Terpenuhi	9 Standar LPSE 2014 Terpenuhi	9 Standar LPSE 2014 Terpenuhi	9 Standar LPSE 2014 Terpenuhi
	11	**Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**									
		1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif								
			1	Persentase Usaha Mikro Dan kecil Terhadap UKM	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%
			2	Jumlah Tenaga Kerja Koperasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	450,00	500,00	550,00	600,00

			3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	750,00	850,00	950,00	950,00
			4	Persentase Produktivitas UMKM	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
			5	Persentase Penambahan Jumlah Wirausaha Baru	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	20,00%	25,00%	30,00%	30,00%
			6	Persentase Jumlah Koperasi Terhadap Jumlah UMKM	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	40,00%	45,00%	50,00%	50,00%
		2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								
			1	Jumlah UMKM	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00	75,00	100,00	100,00
			2	Aset UMKM	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	472.904.000	692.710.000	838.379.00	838.379.000
			3	Omset UMKM	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	782.095.000	895.930.000	958.050.000	838.379.000
		3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah								
			1	Jumlah UMKM Yang Mendapat Bantuan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00	75,00	100,00	100,00
			2	Jumlah UMKM Yang Melakukan Kemitraan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00	75,00	100,00	100,00
			3	Jumlah UMKM Yang Mendapat Pelatihan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00	75,00	100,00	100,00
			4	Jumlah UMKM Yang Mengikuti Magang	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00	75,00	100,00	100,00
			5	Jumlah Koperasi Yang Mampu Mengakses Pembiayaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00	65,00	80,00	80,00
			6	Jumlah UMKM Yang Mampu Mengakses Pembiayaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00	65,00	80,00	80,00
		4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								
			1	Aset Koperasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	589.064.000	769.995.000	880.340.000	880.340.000
			2	Omset Koperasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	864.906.000	906.367.000	927.836.000	927.836.000
			3	Rasio Jumlah Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1,00	1,00	1,00	1,00
	12	**Penanaman Modal**									
		1	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi								
			1	Jumlah Promosi Investasi	5,00	5,00	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00
			2	Jumlah Kerjasama Investasi	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			3	Jumlah Koordinasi Penanaman Modal	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			4	Jumlah Dokumen LKPM dan Direktori Perusahaan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		2	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi								
			1	Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)	3.484.556.090.000	3.486.851.231.878	4.016.235.877.407	4.625.993.353.402	5.328.326.114.037	6.137.289.228.193	6.137.289.228.193
			2	Jumlah Proyek Investasi (PMDN)	225,00	237,00	249,00	262,00	276,00	290,00	290
			3	Jumlah Proyek Investasi (PMA)	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	20,00	20,00
		3	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah								
			1	Jumlah Sertifikat Kualitas Mutu Pelayanan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	175,00	200,00	225,00	225,00
			2	Persentase Pelayanan Publik Berbasis Web/Online	100,00%	20,00%	-	20,00%	20%	100%	100%
		4	Program Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan								
			1	Jumlah Izin Keluar	1.350	2.750	3.000	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
			2	Jumlah Sosialisasi Kebijakan, Perizinan dan Non Perizinan	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
			3	Nilai/Score IKM	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00	85,00
			4	Jumlah Penanganan Pengaduan	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			5	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	13	**Kepemudaan Dan Olah Raga**									
		1	Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga								
			1	Jumlah Organisasi Olahraga Rekreasi	-	Belum Ada Data	-	5,00	5,00	5,00	5,00
			2	Jumlah Komunitas Olah Raga Aktif	-	Belum Ada Data	-	35,00	35,00	35,00	35,00
		2	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga								
			1	Jumlah Cabang Olah Raga Yang Berprestasi Tingkat Provinsi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1,00	3,00	5,00	5,00
			2	Jumlah Cabang Olah Raga Yang Berprestasi Tingkat Nasional	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	36,00	35,00	36,00	36,00
			3	Jumlah Prestasi Olah Raga	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	37,00	35,00	36,00	36,00
		3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga								

			1	Rasio Gelanggang Olah Raga Per 1.000 Penduduk	Belum Ada Data	-	-	60,00	60,00	65,00	65,00
			2	Rasio Lapangan Olah Raga Per 10.000 Penduduk	40,00	-	-	60,00	60,00	65,00	65,00
		4	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan								
			1	Jumlah Pemuda Pelopor	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5,00	5,00	5,00	25,00
			2	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	2,00	2,00	2,00	10,00
	14	**Kebudayaan**									
		1	Program Pengembangan Nilai Budaya								
			1	Persentase Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
			2	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
			3	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	15,00	20,00	25,00	25,00
			4	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	15,00	17,00	20,00	20,00
		2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya								
			1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	1,00	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
			2	Persentase Grup Kesenian Aktif	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
		3	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya								
			1	Jumlah Tenaga Teknis/Juru Pelihara Tempat Bersejarah	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	15,00	20,00	25,00	25,00
	15	**Perpustakaan**									
		1	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan								
			1	Jumlah Perpustakaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00	85,00	100,00	100,00
			2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00
			3	Jumlah Referensi Digital	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	650,00	700,00	750,00	750,00
	16	**Kearsipan**									
		1	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah								
			1	Presentasi SKPD Yang telah Melakukan Arsip Baku	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%
			2	Persentase SKPD, Desa/Kelurahan Yang Dibina Dalam Pengelolaan Arsip Dinamis	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
		2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi								
			1	Tersedianya Sistem Arsip Elektronik	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	-	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Pengarsipan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	-	2 Kali	2 Kali	10,00%
		3	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan								
			1	Persentase Pelaksanaan Sistem Kearsipan Sesuai Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK)	-	-	Belum Ada Data	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%
		4	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan								
			1	Frekuensi Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	-	-	Belum Ada Data	3 Kali	3 Kali	3 Kali	15 Kali
			2	Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	-	-	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
URUSAN PILIHAN											
	1	**Kelautan Dan Perikanan**									
		1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan								
			1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.372,00	2.609,00	2.809,00	3.156,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00
			2	Jumlah Kelompok Budidaya Ikan	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap								
			1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21.996,00	22.986,00	24.020,00	24.981,00	25.855,00	26.760,00	26.760,00
		3	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan								
			1	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan (Unit)	2,00	2,00	4,00	4,00	3,00	2,00	2,00
		4	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan								
			1	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	31,00	31,25	-	31,75	32,00	32,25	32,25
		5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								

			1	Jumlah Kelompok Yang Dibina	-	15,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
		6		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar							
			1	Persentase Luasan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
		7		Program Peningkatan Kehidupan Nelayan							
			1	Jumlah Nelayan Yang Difasilitasi	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		8		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir							
			1	Jumlah Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Yang Dibina dan Diberdayakan	63,00	70,00	77,00	-	-	120,00	120,00
		9		Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan							
			1	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan dan Kelautan Yang Dibina	14,00	15,00	16,00	-	-	19,00	19,00
		10		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran, Pengolahan Hasil Perikanan							
			1	Jumlah Produksi Ikan Hasil Olahan (Ton)	1.775,00	1.925,00	2.148,00	2.362,00	2.559,00	2.859,00	2.859,00
		11		Program Pemberdayaan Pengolahan Hasil Perikanan							
			1	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Yang Dibina	120,00	135,00	150,00	165,00	180,00	195,00	195,00
	2	**Pariwisata**									
		1		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata							
			1	Jumlah Objek Wisata	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	10,00	10,00	10,00	10,00
			2	Jumlah Wisata Agro-Eco-Culture	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	2,00	2,00	2,00	2,00
			3	Jumlah Desa Wisata	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5,00	5,00	5,00	5,00
		2		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata							
			1	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Belum Ada Data	28,28%	24,62%	30,31%	32,49%	34,82%	34,82%
			2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.312,00	2.517,00	3.295,00	3.532,00	3.927,00	4.366,00	4.366,00
			3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	57.855,00	60.508,00	45.139,00	52.262,00	56.235,00	60.520,00	60.520,00
			4	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari
		3		Program Pengembangan Sumber Daya Bidang Ekonomi Kreatif							
			1	Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif	-	Belum Ada Data	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		4		Program Pengembangan Kemitraan							
			1	Adanya Forum Komunikasi Antar Pelaku Wisata	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	3	**Pertanian**									
		1		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian							
			1	Luas Tanam Padi (Ha)	59.945,00	52.679,00	45.360,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00
			2	Luas Tanam Jagung (Ha)	3.957,00	2.768,00	1.148,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
		2		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan							
			1	Produksi Padi (Ton)	-	180.426,00	155.358,00	191.800,00	202.075,00	208.925,00	208.925,00
			2	Produksi Jagung (Ton)	-	8.033,00	3.338,00	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000,00
		3		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan							
			1	Persentase Produktivitas Produksi Padi per Ha	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			2	Persentase Produktivitas Produksi Jagung per Ha	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
		4		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)							
			1	Rata-rata Konsumsi Pangan Per Kapita	Belum Ada Data	Belum Ada Data	99,07%	99,29%	99,51%	99,72%	99,72%
			2	Rata-Rata Konsumsi Protein Nabati	Belum Ada Data	Belum Ada Data	7,91%	8,72%	9,53%	10,34%	10,34%
			3	Rata-Rata Konsumsi Protein Hewani	Belum Ada Data	Belum Ada Data	56,88%	55,92%	54,95%	53,99%	53,99%
			4	Rata-Rata Konsumsi Ikan Per Kapita	Belum Ada Data	Belum Ada Data	4,50%	4,40%	4,30%	4,20%	4,20%
			5	Jumlah Lumbung Pangan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	27,00	30,00	33,00	33,00
			6	Jumlah Desa Mandiri Pangan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
			7	Skor PPH	Belum Ada Data	Belum Ada Data	83,60%	86,40%	89,10%	91,80%	91,80%

		5	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura								
			1	Produksi Jeruk (Ton/Ha)	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			2	Produksi Cabe Rawit (Ton/Ha)	-	Belum Ada Data	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
			3	Produksi Bawang Merah (Ton/Ha)	-	Belum Ada Data	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		6	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan								
			1	Jumlah Komoditas Yang Bersertifikat	Belum Ada Data	Belum Ada Data	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan								
			1	Cakupan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Skala Daerah	Skala Daerah	Skala Nasional	Skala Nasional
		8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								
			1	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,00	101,00	101,00	102,00	102,00	103,00	103,00
		9	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan								
			1	Rasio Kelompok Tani Terhadap Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	22,00	21,00	20,00	20,00
		10	Program Sistem Informasi/Database Pertanian								
			1	Tersedianya Sistem Informasi/Database Pertanian	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2	Jumlah Buku Profil Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
		11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
			1	Jumlah Penerima Hibah/Bansos	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	3,00	3,00	3,00	15,00
	4	**Perkebunan**									
		1	Program Peningkatan Produksi Perkebunan								
			1	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	-	-	200.000,00	200.000,00
			2	Produktivitas Tanaman Perkebunan (Ton/ha)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	-	-	-	50,00	50,00
		2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								
			1	Rasio Kelompok Tani Terhadap Petani	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	20,00	20,00	20,00	20,00
		3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan								
			1	Persentase Pengawalan dan Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Kubu Raya	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%
		4	Program Pengembangan Agribisnis								
			1	Jumlah Ijin Usaha Perkebunan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	150,00	175,00	200,00	200,00
		5	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kehutanan								
			1	Luasan Hutan Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	20,00 Ha	25,00 Ha	30,00 Ha	30,00 Ha
			2	Jumlah Titik Lokasi Hutan Desa	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	10,00	10,00	15,00	15,00
			3	Luasan Hutan Kemasyarakatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	25,00 Ha	30,00 Ha	35,00 Ha	35,00 Ha
			4	Jumlah Titik Lokasi Hutan Kemasyarakatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	15,00	15,00	20,00	20,00
			5	Luasan Hutan Tanaman Rakyat	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	25,00 Ha	30,00 Ha	35,00 Ha	35,00 Ha
			6	Jumlah Titik Lokasi Hutan Tanaman Rakyat	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	15,00	15,00	20,00	20,00
			7	Luasan Hutan Rakyat	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	25,00 Ha	30,00 Ha	35,00 Ha	35,00 Ha
			8	Jumlah Titik Lokasi Hutan Rakyat	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	15,00	15,00	20,00	20,00
			9	Luasan Hutan Adat	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	30,00 Ha	35,00 Ha	40,00 Ha	40,00 Ha
			10	Jumlah Titik Lokasi Hutan Adat	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	20,00	20,00	25,00	25,00
	5	**Peternakan**									
		1	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan								
			1	Jumlah Populasi Ternak Besar (ekor)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	16.028,00	16.190,00	16.434,00	16.572,00	16.572,00
			2	Jumlah Populasi Ternak Kecil (ekor)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	63.557,00	64.489,00	65.778,00	66.535,00	66.535,00
			3	Jumlah Populasi Unggas (ekor)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	17.774.428	17.971.998	18.182.969	18.321.225	18.321.225
			4	Jumlah Produksi Telur (Ton)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	6.361,00	6.501,00	6,631,00	6.724,00	6.724,00
			5	Jumlah Produksi Susu (Ton)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	BAD	BAD	BAD
			6	Jumlah Produksi Daging (Ton)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	14.575,00	14.699,00	14.993,00	15.135,00	15.135,00
		2	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak								

			1	Jumlah Kasus Penyakit Ternak	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	40,00	45,00	50,00	50,00
			2	Persentase Kasus Penyakit Ternak Yang Tertangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
		3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan								
			1	Jangkauan Pemasaran Produksi Peternakan	-	-	-	Lokal, Regional, Nasional	Lokal, Regional, Nasional	Lokal, Regional, Nasional	Lokal, Regional, Nasional
		4	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)								
			1	Produksi Pakan Ternak (Stek)	-	75.000,00	78.750,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	393.750,00
	6	**Perdagangan**									
		1	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan								
			1	Jumlah Kelangkaan Bahan Pokok	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	Jumlah Sengketa Konsumen Yang Tertangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri								
			1	Jumlah Pelaku Usaha Formal Yang Mendapatkan Izin Usaha	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00	50,00	60,00	60,00
			2	Jumlah Pasar Tradisional Yang Direvitalisasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5,00	5,00	5,00	5,00
			3	Jumlah Kegiatan Promosi Produk Unggulan dan Komoditi Kabupaten Kubu Raya	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	2,00	2,00	2,00	10,00
			4	Peningkatan Jumlah Kewirausahaan Pedagang Non Formal	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00%	55,00%	60,00%	60,00%
		3	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan								
			1	Jumlah Pembinaan Pedagang Kaki Lima	-	-	Belum Ada Data	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
			2	Jumlah Asosiasi Pedagang Kaki Lima	-	-	Belum Ada Data	10,00	10,00	15,00	15,00
		4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor								
			1	Jumlah Produk Berkualitas Ekspor	-	-	-	1,00	2,00	3,00	3,00
			2	Jumlah Kerjasama Standarisasi Mutu Produk	-	-	-	2,00	2,00	4,00	4,00
		5	Program Penyelenggaraan Metrologi Legal								
			1	Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	4 Kali	4 Kali	4 Kali	20 Kali
	7	**Perindustrian**									
		1	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah								
			1	Tingkat Pertumbuhan Industri (Kecil, Menengah, Besar)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5,00%	5,20%	5,30%	5,30%
			2	Kapasitas Produksi Industri (Kecil, Menengah, Besar)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	25.787,00	25.963,00	26.165,00	26.165,00
			3	Jumlah Unit Usaha Industri	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	500,00	525,00	550,00	550,00
			4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1.500,00	1.575,00	1.650,00	1.650,00
			5	Persentase Industri Kecil Yang Telah Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	50,00%	50,00%	55,00%	55,00%
			6	Persentase IKM Yang Memperoleh Sertifikasi *Good Manufacturing Product*	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	40,00%	40,00%	50,00%	50,00%
		2	Program Penataan Struktur Industri								
			1	Penetapan Industri Inti/Prioritas	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1,00	1,00	1,00	1,00
			2	Omset Industri	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	374.789.000	398.261.000	413.860.000	413.860.000
			3	Jumlah Sentra Industri	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5,00	5,00	5,00	5,00
			4	Jumlah Klaster Industri	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5,00	5,00	5,00	5,00
		3	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial								
			1	Jumlah Sentra Yang Telah Membentuk Asosiasi Atau Sejenisnya	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5,00	5,00	5,00	5,00
		4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri								
			1	Jumlah IKM Yang Menerapkan Teknologi Industri Tepat Guna	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	10,00	10,00	10,00	10,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	1	**Perencanaan**									
		1	Program Perencanaan Pembangunan Dearah								
			1	Tersedianya Dokumen RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen

			2	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
			3	Terfasilitasinya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
			4	Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
			5	Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
		2	Program Pengembangan Data/Informasi								
			1	Tersedianya dokumen profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
			2	Tersedianya penataan dan pengelolaan Informasi Geospasial (GI) Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
			3	Terfasilitasinya Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
			4	Tersedianya pelayanan perizinan penelitian	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan
			5	Tersedianya Profil Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka dan Profil Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Kubu Raya	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	50 Dokumen
		3	Program Perencanaan Sosial Budaya								
			1	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi								
			1	Jumlah Dokumen Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
			2	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
		5	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam								
			1	Fasilitasi Kegiatan PPSP dan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
			2	Persentase Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		6	Program Perencanaan Tata Ruang								
			1	Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
			2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	2 Kegiatan
			3	Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kubu Raya	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan
		7	Program Kerjasama Pembangunan								
			1	Koordinasi Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	4 Kegiatan
			2	Pelaksanaan Rakor Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan
		8	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar								
			1	Tersedianya Dokumen *Readness Criteria*	-	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	-	15 Dokumen
			2	Tersedianya Dokumen Kajian Kawasan Strategis Dan Cepat Tumbuh	-	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	-	15 Dokumen
		9	Program Penelitian dan Pengembangan								
			1	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	2	**Keuangan**									
		1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan								
			1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			3	Predikat SAKIP	C	CC	CC	B	B	B	BB
		2	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
			1	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Dan Kinerja	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

			3	Persentase SKPD Yang Melaporkan Inventaris Barang Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			4	Persentase Akuntabilitas Pelaporan Aset Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	3	**Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan**									
		1	Program Penataan Kelembagaan								
			1	Pelantikan DPRD	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
			2	Pelantikan Kepala Daerah	1 Kali	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali
		2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur								
			1	Jumlah PNS yang Mengikuti Ujian Dinas	9,00	24,00	65,00	82,00	122,00	55,00	348,00
			2	Jumlah PNS yang Mengikuti Penyesuaian Ijazah	45,00	66,00	281,00	146,00	234,00	241,00	968,00
			3	Persentase Jumlah Peserta Diklatpim II	28,50%	28,50%	57,10%	85,70%	100,00%	100,00%	100,00%
			4	Persentase Jumlah Peserta Diklatpim III	36,50%	36,50%	73,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			5	Persentase Jumlah Peserta Diklatpim IV	36,10%	36,10%	72,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			6	Jumlah Peserta Diklat Formal	627,00	469,00	571,00	579,00	580,00	584,00	2.783,00
			7	Jumlah Peserta Bimtek PNS	80,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	1.125,00
			8	Jumlah Peserta Diklat Prajabatan	0,00	213,00	200,00	150,00	100,00	50,00	713,00
			9	Jumlah Peserta Bimtek CPNS	57,00	200,00	150,00	100,00	50,00	50,00	550,00
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
			1	Jumlah Rapat Badan Pertimbangan Disiplin Pegawai (Baperdispeg)	20,00	18,00	18,00	17,00	17,00	16,00	86,00
			2	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang Diproses	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
		4	Program Pendidikan Kedinasan								
			1	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00
		5	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS								
			1	Jumlah SK Pensiun PNS	-	160,00	200,00	230,00	250,00	270,00	1.110,00
	4	**Kerja Sama Dearah**									
		1	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah								
			1	Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5,00	5,00	5,00	25,00
	5	**Pengawasan**									
		1	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan								
			1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal Dan BPK	100,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100%
			2	Level APIP	-	-	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			3	Persentase OPD Yang Menerapkan SPIP	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan								
			1	Persentase Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti Bintek Atau Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								
			1	Jumlah LHP	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	185 Dokumen
			2	Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	185 Dokumen
	6	**Hukum Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan**									
		1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan								
			1	Rasio Realisasi Propemperda	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2	Persentese Raperda Yang Disetujui DPRD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			3	Rasio Perda Yang Dibatalkan Terhadap Raperda Yang Ditetapkan Menjadi Perda	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			4	Persentase Permasalahan Hukum Yang Dapat Ditangani	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	40,00%	50,00%	60,00%	60,00%

		2		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah							
			1	Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan	7,00	21,00	22,00	24,00	24,00	28,00	119,00
			2	Jumlah Pelaksanaan Reses	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00
			3	Jumlah Usulan Raperda Inisiatif dan Produk Hukum	3,00	6,00	6,00	7,00	8,00	8,00	33,00
			4	Persentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		3		Program Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah							
			1	Laporan Realisasi Kegiatan SKPD	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		4		Program Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah							
			1	Terkendalinya Laju Inflasi Daerah	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	0,25	0,27	0,29	0,29
			2	Jumlah SKPD yang Mengembangkan Ekonomi Kreatif	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	5,00	5,00	5,00	5,00
	7	**Pemerintahan Umum**									
		1		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah							
			1	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali
			2	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali
			3	Dialog Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali
			4	Rapat Koordinasi Unsur Muspida	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali
			5	Rapat Kerja Unsur Pimpinan Kecamatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali
		2		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat							
			1	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		3		Program Penataan Daerah Otonomi Baru							
			1	Koordinasi Penegasan Batas Daerah	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2	Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			3	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			4	Penataan dan Monitoring Administrasi Kecamatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			5	Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		4		Program Penataan Kecamatan/Kelurahan							
			1	Jumlah Pemekaran Kecamatan	Belum Ada Data	-	Belum Ada Data	-	1,00	1,00	1,00
			2	Jumlah Pembentukan Kelurahan / Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan	Belum Ada Data	-	Belum Ada Data	-	5,00	5,00	5,00
		5		Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama							
			1	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	20,00	25,00	30,00	30,00
			2	Jumlah Majelis Taklim yang Difasilitasi dan Dibina	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	10,00	15,00	20,00	20,00
			3	Jumlah Lembaga Keagamaan yang Dibina	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	15,00	20,00	25,00	25,00
			4	Jumlah Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji yang dibina/difasilitasi	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	250,00	300,00	350,00	350,00
		6		Program Pemberdayaan Kecamatan							
			1	Tersedianya Profil Kecamatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
			2	Laporan Tahunan, Twiwulan dan Harian Camat	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
			3	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			4	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PELAYANAN UMUM PADA SETIAP SKPD											
		1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			1	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			1	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
			1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

		4	Progran Perencanaan Pembangunan Daerah								
			1	Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		5	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah								
			1	Database E-Formasi	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
			2	Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	-	Belum Ada Data	Belum Ada Data	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
			3	Zona Pelayanan Publik	-	-	-	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
			4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
			5	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	-	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun, dan sisa waktu akhir periode perencanaan 3 (tiga) tahun. Penyusunan RPJMD Perubahan ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2015-2019, sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, perlu peran dan kerjasama seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, maka untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pada periode selanjutnya terutama sekali untuk tahun pertama kepemimpinan Kepala Daerah yang baru maka RPJMD Perubahan ini tetap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RAPBD Kabupaten Kubu Raya. Sinkronisasi dalam penyusunan RKPD pada tahun transisi juga tidak boleh terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 dan RPJMN maupun RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan pada masa tersebut.

RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 disusun untuk penyesuaian dan penyelarasan berkenaan dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah dan kewenangan daerah, yang digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah maupun stakeholder yang berkepentingan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya untuk 3 tahun ke depan. Dokumen RPJMD Perubahan ini menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kubu Raya. Gambaran pencapaian target-terget kinerja akan terlihat pada evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya. Untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanannya sebagai berikut :